

QUO VADIS PENDIDIKAN DAN GERAKAN SOSIAL
AGAMA LOKAL DI INDONESIA;
STUDI ATAS AGAMA LOKAL PARMALIM, SAPTA
DARMA DAN AGAMA DJAWA SUNDA

PENULIS:
NANANG HASAN SUSANTO
NUR KHOLIS

SEDANG PROSES TERBIT DI:

PENERBIT NEM (NOMOR ANGGOTA IKAPI: 171/JTE/2019)
JL. RAYA WANGANDOWO, KEC. BOJONG, KAB. PEKALONGAN, JAWA
TENGAH, 51156. MOBILE: 085325217257. EMAIL:
PENERBITNEM@GMAIL.COM, WEBSITE: PENERBITNEM.COM

KATA PENGANTAR

Seruan syukur kami panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, laporan bentuk buku berbasis penelitian 2022 ini dapat diselesaikan sesuai target waktu.

Dalam pengantar ini, peneliti hanya ingin menyampaikan harapan besar, agar buku hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemerhati dan praktisi dunia Pendidikan, agama, sosial dan budaya, khususnya komunitas marginal agama lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dan masyarakat umum untuk menyikapi perbedaan, sekaligus membuat kebijakan yang lebih memenuhi rasa keadilan.

Pekalongan, 30 Desember 2022
Ketua Peneliti

Nanang Hasan Susanto

DAFTAR ISI

Diskriminasi Pendidikan, Gerakan Sosial Baru dan Pendidikan Untuk Bertahan Hidup 3 Agama Lokal di Indonesia

Abstraksi	: i
Kata Pengantar	: ii
Daftar Isi	: iii
BAB I PENDAHULUAN	: 1
BAB II DISKRIMINASI PENDIDIKAN, PENDIDIKAN NILAI DAN GERAKAN SOSIAL BARU 3 AGAMA LOKAL DI INDONESIA	: 7
1. Diskriminasi Pendidikan	: 7
2. Pendidikan Nilai	: 28
3. Gerakan Sosial Baru	: 30
BAB III SEJARAH BERDIRI, AJARAN POKOK, PENDIDIKAN NILAI SERTA GERAKAN SOSIAL YANG DILAKUKAN 3 AGAMA LOKAL DI INDONESIA	: 57
1. Mengenal Agama Lokal Agama Djawa Soenda (Ads)	: 57
2. Mengenal Agama Lokal Parmalim	: 90
3. Mengenal Agama Lokal Sapta Darma	: 102
BAB IV DISKRIMINASI PENDIDIKAN, PENDIDIKAN UNTUK BERTAHAN DAN GERAKAN SOSIAL BARU 3 AGAMA LOKAL DI INDONESIA	: 113
1. Bentuk Diskriminasi Pendidikan 3 Agama Lokal di Indonesia	: 113
2. Pendidikan Nilai yang diajarkan dan dikembangkan untuk menjaga tradisi	: 129
3. Gerakan sosial baru yang dilakukan untuk menjaga nilai dan tradisi	: 144
BAB V PENUTUP	: 161
Daftar Pustaka	: 163

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

Meskipun UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 secara tegas memberikan kebebasan kepada seluruh warga Negara untuk memeluk agama sekaligus beribadah sesuai dengan kepercayaannya, tapi diskriminasi terhadap pemeluk agama lokal sudah terjadi sejak lama. Menurut Makin, diskriminasi tersebut dilatarbelakangi oleh faktor politik, baik pada rezim Orde Lama (Orla) maupun orde baru (Orba), yakni untuk menjaga stabilitas dan harmoni, sekaligus untuk mendapat legitimasi dari pemeluk agama mainstream.¹ Padahal, komunitas penghayat mengklaim keberadaannya sebagai penjaga warisan budaya Nusantara.² Salah satu diskriminasi tersebut adalah pada bidang pendidikan. Syarat menjadi Guru berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, harus lah berpendidikan S1. Karena banyak kader agama lokal yang belum memiliki kualifikasi Pendidikan S1, maka Pendidikan agama komunitas penghayat yang dilakukan pada lembaga pendidikan formal harus diajarkan oleh penganut agama lain.

Berbagai diskriminasi yang dirasakan komunitas penghayat menyatukan mereka bersatu dalam sebuah gerakan social³, untuk mendapat pengakuan resmi Negara. Gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan berbagai komunitas penghayat seperti dari Parmalin Sumatra Utara, Sapta Darma Jawa Tengah, dan Agama Djawa Sunda Jawa Barat berhasil⁴. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 977/PUU-XIV/2016, permohonan para komunitas agama lokal dikabulkan, dan memutuskan bahwa agama lokal dapat dimasukkan ke dalam identitas kewarganegaraan, baik di Kartu Keluarga (KK), maupun Kartu tanpa Penduduk (KTP). Menurut Setara Institute, amar putusan ini merupakan tonggak sejarah penting dalam menghapuskan praktek diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan setiap warga Negara⁵

Meskipun begitu, putusan MK tidak secara otomatis membuat diskriminasi yang dialami komunitas penghayat berakhir. Berdasarkan pengakuan Pungkas, Kanti (ADS) dan Pagar Demanra Sirait (komunitas Parmalin), diskriminasi pasca putusan MK masih terus

¹ Al Makin, *Nabi-Nabi Nusantara; Kisah Lia Eden Dan Lainnya*, (Yogyakarta: UIN Suka Pers, 2017), 355–56.

² Kiki Muhamad Hakiki, "Kiki Muhamad Hakiki, 'Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan).'" *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11.1 (2011): 159-174, Hal. 161., " *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2011): 161.

³ Robert Miesel, *Teori Pergerakan Sosial*. (Yogyakarta: Resist Book, 2004).

⁴ Wisnoe Moerti, "Jalan Panjang Penganut Aliran Kepercayaan Sampai Diakui Negara.," November 8, 2017, <http://www.merdeka.com>.

⁵ Setara Institute, "Putusan MK Yang Kabulkan Kolom Kepercayaan Bagi Komunitas Agama Lokal Di KTP Patut Diapresiasi," July 11, 2017, <http://www.tribunnews.com>.

berlangsung, seperti kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kependudukan⁶. Hal ini sesuai dengan teori Gramsci, bahwa relasi timpang minoritas-mayoritas selalu memperlihatkan sisi penting dalam interaksi kebudayaan. Dalam konteks relasi tersebut, artikulasi identitas selalu bertendensi hegemonik dari kelompok super ordinat pada kelompok sub-ordinat⁷.

Untuk bisa bertahan hidup, Pendidikan seringkali dijadikan sebagai wahana untuk menjaga ideologi, merawat nilai bahkan menyebarkan nilai kepada orang lain. Karenanya, pendidikan bisa dijadikan sebagai wahana agama lokal, untuk bisa bertahan hidup. Penelitian ini mencoba mengungkap diskriminasi pendidikan agama, gerakan social yang dilakukan, sekaligus pendidikan yang dikembangkan bagi internal komunitas untuk bisa bertahan hidup dari komunitas penghayat Parmalin Sumatra Utara, Sapta Darma Jawa Tengah Dan Agama Djawa Sunda, Jawa Barat.

⁶ Renaldi, "Diskriminasi Belum Tentu Berakhir Walau Gugatan Agama Asli Indonesia Menang Di MK.," November 8, 2017, <https://www.kaskus.co.id>.

⁷ A Kholiq, "Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 12, no. 1 (2013): 117.

BAGIAN DUA

DISKRIMINASI PENDIDIKAN, PENDIDIKAN NILAI DAN GERAKAN SOSIAL BARU 3 AGAMA LOKAL DI INDONESIA

1. MENGENAL DISKRIMINASI PENDIDIKAN

A. Pengertian

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia online, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)⁸. Sementara itu, dalam free online dictionary yang dikutip Tannock, diskriminasi diartikan sebagai perlakuan berdasarkan kelas sosial atau kategori, bukannya pada kemampuan, kapasitas dan kapabilitas⁹.

Di Indonesia, Secara formal, batasan diskriminasi di atur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat (3). Undang -Undang tersebut menyatakan, Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau pengguna hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya¹⁰.

Menurut Fulthoni, diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan pada perbedaan ras, suku bangsa, dan agama¹¹. Meskipun pengertian diskriminasi pada umumnya menekankan pada aspek ketidakadilan, namun dalam aspek sosiologi, ketidakadilan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, kecuali hanya sebagai suatu hierarki empiris dari perbedaan tingkat pendapatan¹². Kata kunci lain yang memudahkan kita dalam memahami diskriminasi adalah pernyataan Sadily, bahwa diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi¹³.

⁸ KBBI, Nopember 2022, <https://kbbi.web.id/diskriminasi>.

⁹ Stuart Tannock, "The Problem of Education-based Discrimination.," *British Journal of Sociology of Education* 29, no. 5 (2008): 441.

¹⁰ "UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Ayat 3," n.d.

¹¹ Fulthoni, *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Bergama*, 9.

¹² Turner, *Teori Sosial, Dari Klasik Sampai Postmodern*, xiii.

¹³ Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, 227.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata ‘diskriminasi’ berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara¹⁴

Diskriminasi terbagi dalam beberapa hal, antara lain:

1. Diskriminasi pekerjaan, misalnya seorang ditolak bekerja hanya karena ia seorang anggota minoritas;
2. Diskriminasi politik, misalnya anggota minoritas yang berhak memilih karena kewarganegaraannya ditolak untuk memilih;
3. Diskriminasi di tempat umum, misalnya golongan dominan (berkuasa) menolak untuk menerima anggota minoritas;
4. Diskriminasi perumahan, misalnya anggota minoritas ditolak untuk menyewakan atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal¹⁵.

Istilah diskriminasi berdasar identitas budaya didefinisikan sebagai segala bentuk sikap dan perilaku yang membedakan atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak-haknya atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik¹⁶. Menurut Madyaningrum dan Monica, Bentuk diskriminasi jika dikaitkan dengan Negara ada 2, yaitu:

1. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.
2. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan¹⁷.

Jika ditelusuri pada konstitusi, Undang-undang yang mengatur tentang diskriminasi salah satunya terdapat pada UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selain itu, UUD 1945 pasal 281 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dasar konstitusi tentang diskriminasi juga dapat dilihat pada

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 254.

¹⁵ Poerwadarminta, 254.

¹⁶ Monica Eviandaru Madyaningrum, “Diskriminasi Berdasar Identitas Sosial-Budaya Dan Pendidikan HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Sosial,” *Jurnal Insan Media Psikologi* 12, no. 1 (2012).

¹⁷ Madyaningrum, 35.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab X tentang warga negara, pasal 27 ayat (1) berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹⁸. Tidak hanya Undang-undang Dasar, dalam Undang-undang No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 48 disebutkan, bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat 10 juga menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya¹⁹.

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat akrab dalam kehidupan manusia, karena ia ada bersamaan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Pendidikan berasal dari kata "didik", yang dalam bentuk kata kerja (*verb*) berarti mendidik, memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan). Jika dilihat dalam bentuk kata benda (*noun*), pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan²⁰. Pengertian pendidikan berdasarkan Undang-undang adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara²¹.

B. Sebab-sebab Terjadinya Diskriminasi

Dalam teori identitas sosial Jones, seseorang yang tergabung dalam sebuah kelompok, akan cenderung menganggap kelompoknya lebih unggul dari kelompok lain. Menurut teori ini, kelompok merupakan komponen penting dalam pembentukan identitas diri seseorang. Maka sebagai konsekuensinya, setiap individu akan berusaha memiliki kebanggaan akan kelompoknya agar sebagai akibatnya ia merasa bangga dengan dirinya. Kebanggaan ini biasanya dibangun dengan cara membentuk dan mengenakan berbagai atribut positif pada kelompok yang dinilai dapat mengunggulkan kelompoknya dari kelompok yang lain. Dari

¹⁸ Undang-undang Dasar 1945, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Beserta Amandemennya*. (Solo: Adzana Putra, 2004), 18.

¹⁹ Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan.,” *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1 (2004): 168.

²⁰ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.), 263; Aziza Meria, Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dalam Membangun Karakter Bangsa.’ *Al-Ta Lim Journal* 19.1 (2012): 87-92, Hal. 87,” *Al-Ta’lim Journal* 19, no. 1 (2012): 87.

²¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1,” n.d., 1.

sinilah kecenderungan untuk merendahkan kelompok lain dengan menggunakan stereotip dan prasangka dapat bermula²².

Selain konsep di atas, ranah kedua yang juga banyak dikembangkan dalam studi psikologi sosial adalah konsep-konsep yang bertujuan menjelaskan strategi-strategi sosial dan kognitif yang dikembangkan seseorang untuk secara psikologis mempertahankan keunggulan kelompoknya dibanding kelompok lain. Diantara konsep-konsep dalam kelompok ini misalnya adalah konsep '*out-group homogeneity*'. Konsep ini menerangkan kecenderungan seseorang untuk melihat secara seragam individu-individu yang menjadi anggota kelompok lain. Dalam konsep ini diterangkan bahwa, ketika seseorang mengenakan stereotip dan prasangka pada individu-individu dari kelompok lain, orang tersebut akan melakukan proses de-individualisasi pada anggota-anggota kelompok lain tersebut. Proses de-individualisasi menggambarkan bias kognitif yang terjadi ketika seseorang cenderung melihat seluruh anggota kelompok lain sebagai satu entitas yang sama. Dalam proses ini, anggota-anggota kelompok yang lain, tidak dilihat sebagai individu yang masing-masing memiliki keunikan identitas. Bias kognitif inilah yang diasumsikan mendasari bekerjanya stereotip dan prasangka. Ketika satu kelompok distereotipkan memiliki atribut negatif tertentu misalnya, maka diyakini bahwa atribut tersebut dapat ditemui pada seluruh anggota kelompok tanpa kecuali²³.

Selain konsep *outgroup homogeneity*, konsep lain yang juga menjelaskan bias kognitif yang dimiliki seseorang yang mendasari bekerjanya stereotip dan prasangka dalam relasi antar kelompok adalah konsep *illusory correlation*. Konsep ini menerangkan proses ketika seseorang mempersepsikan dua hal sebagai sesuatu yang saling terkait dalam hubungan sebab akibat padahal dalam kenyataannya tidak. Misalnya sebagai contoh adalah stereotip tentang peran gender yang terlanjur diterima sebagai suatu kepastian dalam masyarakat. Seringkali distereotipkan bahwa laki-laki lebih agresif daripada perempuan. Dalam bias gender ini, *illusory correlation* terjadi ketika seseorang meyakini bahwa ada hubungan sebab akibat yang otomatis antara berjenis kelamin laki-laki dengan pemilikan sifat atau perilaku agresif. Diskriminasi berdasar identitas social budaya seringkali memang merupakan produk sistemik dari sejarah serta situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya suatu masyarakat²⁴.

Diskriminasi juga seringkali terjadi karena alasan agama. Perbedaan antara yang benar dan yang salah berdasarkan dogma agama seringkali diartikan sebagai legitimasi untuk

²² J.M Jones, *Prejudice and Racism*, 2nd ed. (New York: The McGraw-Hill Companies Inc, 1997).

²³ Madyaningrum, "Diskriminasi Berdasar Identitas Sosial-Budaya Dan Pendidikan HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Sosial.," 4.

²⁴ Madyaningrum, 5.

mendiskriminasi orang yang dianggap salah berdasarkan doktrin agama tersebut. Agama seringkali memiliki dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Adanya keanekaragaman agama yang ada di Indonesia membuat masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Perbedaan ini timbul karena adanya doktrin-doktrin dari agama-agama, suku, ras, perbedaan kebudayaan, dan dari kelompok minoritas dan mayoritas. Diskriminasi, bahkan konflik terkait dengan agama juga seringkali disebabkan oleh:

1. Perbedaan Doktrin. Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu. Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi (*revealed religion*), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan.
2. Perbedaan Suku dan Ras. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.
3. Perbedaan Kebudayaan Agama. Sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Tempat-tempat terjadinya konflik antar kelompok masyarakat agama Islam - Kristen, perbedaan antara dua kelompok yang konflik. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional: sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu bentuk rumah gereja lebih berwajah budaya Barat yang mewah. Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata

sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

4. Masalah Mayoritas dan Minoritas. Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Masalah mayoritas dan minoritas ini timbul dikarenakan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kelompok mayoritas dari pada kelompok minoritas sehingga timbul konflik yang tak terelakan. Dikarenakan saling menunjukkan pembenaran dari masing-masing pemahaman dari doktrin-doktrin yang di berikan dalam kelompok mayoritas dan minoritas. Mengakibatkan timbulnya konflik dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas²⁵.

Selain karena faktor agama, terjadinya diskriminasi menurut Sargeant yang dikutip Sulaiman didasarkan atas tujuh alasan, yakni alasan agama atau kepercayaan, ketidakmampuan, usia, orientasi seksual, rasial, etnis, dan kebangsaan (nationality)²⁶. Teori Sargeant tentang penyebab terjadinya diskriminasi ini menggambarkan luasnya faktor sosial, yang sewaktu-waktu bisa mengakibatkan terjadinya diskriminasi.

C. Sejarah Diskriminasi Pendidikan

Berkaitan dengan sejarah perkembangan diskriminasi dalam bidang pendidikan, dapat dibagi kedalam era penjajahan, orde lama, orde baru dan masa reformasi.

1. Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan, kebijakan politik pemerintahan berada di tangan penjajah. Pada masa itu Belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya, terutama terhadap ummat Islam, dan agama selain agama yang dibawa penjajah. Hal ini baru berubah, setelah Belanda mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan diperkerjakan di pemerintahan Belanda²⁷.

2. Masa Orde Lama

²⁵ Stev Koresy Rumagit, "Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia.," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 59–60.

²⁶ Sulaiman, "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah," *Jurnal SMART* 4, no. 2 (2018): 210.

²⁷ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Pranada Media, 2003), 12.

Pada masa ini penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut masa krusial pasca kemerdekaan dimana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan terjadi interplay (tarik ulur) antara pihak yang sekuler dengan agamis. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupaya menjadi "win-win solution" dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni, maupun agama. Pada dasarnya upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil, hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain sehingga kemelut bernegara selalu ada di masa tersebut

3. Masa Orde Baru.

Berbeda dengan kebijakan di era orde lama, kebijakan di era orde baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Di masa ini jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangat kental. Orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader kader yang 'yes man', selalu patuh buta terhadap kepentingan pusat. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif dan daya inovatif, yang ada hanyalah birokrat yang "sendikho dhawuh". Bahkan sistem pada masa ini berhasil membunuh idealisme. Orang-orang atau cendekia yang idealis, kritis, dan inovatif tiba-tiba memble ketika masuk pada jalur birokrasi. Disadari bahwa sistem pendidikan nasional pada masa itu sebab kuatnya intervensi kekuasaan sangat mewarnai di setiap aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional pada masa orba, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Beberapa pelatihan di sekolah sekolah atau instusi-institusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinasi ideologi penguasa. Praktek penataran P4 merupakan salah satu bukti riil dari indoktrinasi ideologi penguasa pada waktu itu. Di era ini pula terjadi penyeragaman-penyseragaman sehingga budaya daerah, seni daerah, dan kearifan lokal mengalami nasib yang tragis, bahkan banyak yang telah mati. Yang tersisa hanyalah seni dan budaya yang sifatnya mondial. Bahkan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya bermakna berbeda-beda tetapi satu jua telah dimaknai menjadi sesuatu entitas yang serba seragam.

4. Masa Reformasi

Pemerintahan Reformasi ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Mahasiswa sudah memiliki kebebasan yang luar biasa. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional N0 20 tahun 2003. Di era

reformasi ini penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara *top-down* diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah *bottom-up*. Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ini ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan, bahkan banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokratisasi dan desentralisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah²⁸.

Pada masa reformasi, tuntutan terhadap penghilangan diskriminasi terus menguat. Akhirnya, pada tahun 2008 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Anti Diskriminasi. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka segala bentuk diskriminasi berdasar identitas sosial-budaya seseorang dapat dilihat sebagai tindak pidana. Namun, beberapa bulan setelah pengesahan undang-undang tersebut, surat kabar nasional *Jakarta Post* memuat laporan berjudul "*Ethnic Chinese still face hurdles to get ID cards: Survey*" (16 Desember 2008). Laporan ini hanyalah satu contoh dari sejumlah laporan sejenis yang dapat ditemukan di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa meski Undang-Undang Anti Diskriminasi telah disahkan, praktek diskriminatif tetap terjadi di tengah masyarakat. Contoh ini menggambarkan ungkapan yang menyatakan bahwa "*Stateways cannot change folkways*" yang berarti bahwa upaya menghilangkan sikap dan praktik diskriminatif di tengah masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan piranti hukum²⁹.

Menguatnya tuntutan pendidikan yang anti diskriminasi tidak dapat dilepaskan dari fenomena global. Hal ini dapat dilihat pada proses pendidikan multikultural yang mencuat di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an. Waktu itu terjadi gerakan reformasi yang ditujukan pada perubahan pendidikan yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat "minoritas," yaitu masyarakat yang berada di luar "*white-male-Protestant-Anglo Saxon* (WMPA)."

Pendidikan multikultural sendiri diartikan sebagai sebuah reformasi di bidang pendidikan untuk membuat berbagai perubahan terkait dengan dunia pendidikan. Pendidikan multikultural yang awalnya berkembang di Amerika ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi baik itu didasarkan kepada perbedaan suku, ras, warna kulit dan sebagainya yang sebelumnya banyak terjadi di Amerika³⁰. Gerakan pendidikan multikultural ini adalah gerakan

²⁸ Sarnoto, "Konsep Politik Pendidikan Di Indonesia."

²⁹ Madyaningrum, "Diskriminasi Berdasar Identitas Sosial-Budaya Dan Pendidikan HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Sosial.," 3.

³⁰ James A Banks, *An Introduction to Multicultural Education*. (Boston: Allyn and Bacon, 2002), 1.

untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan (skills), dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia³¹.

Berbagai kelompok minoritas yang berbeda, seperti Amerika Afrika, Amerika asli, Amerika Asia dan Amerika latin dalam sejarahnya seringkali mendapat perlakuan diskriminatif. Kuatnya diskriminasi di Amerika Serikat itu digambarkan Banks dengan menegaskan bahwa betapa sulitnya orang kulit berwarna di Amerika Serikat mendapatkan kesetaraan hukum, sosial, dan politik sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka bisa secara hukum tersisihkan sebagai (untuk menjadi) warga negara, atau, jika secara hukum sudah tidak ada masalah, untuk mendapatkan pendidikan tersisihkan juga, dan jika secara akademik tidak ada masalah, dalam kenyataan hidup masih terganjal juga oleh diskriminasi rasial³².

Gerakan protes terhadap adanya diskriminasi pada aspek pendidikan di Amerika tidak hanya disuarakan oleh kalangan minoritas, tapi juga oleh kalangan mayoritas yang merasa didiskriminasikan. Misalnya saja gerakan menolak diskriminasi yang dilakukan oleh kaum perempuan yang merasa didiskriminasikan. Khusus di Amerika Serikat, karena yang dominan adalah kultur *White Male Protestant Anglo Saxon* (WMPA)³³³⁴ otomatis kaum perempuan termasuk yang terdiskriminasi atau terpinggirkan. Jadi, selain kelompok etnis dan budaya “minoritas” (tidak harus selalu berarti jumlahnya lebih sedikit dari WMPA), perempuan pun termasuk yang terdiskriminasi.

Oleh karena adanya diskriminasi memperoleh pendidikan, maka warga kelompok etnis dan budaya “berbeda dari WMPA” tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, dan karenanya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak, sehingga mereka termasuk kaum miskin. Selain itu, dalam hal pekerjaan pun mereka termasuk terdiskriminasi. “Warga kelompok minoritas sulit mendapatkan pekerjaan, dan ada kebijakan diskriminatif yang jelas.”³⁵. Bahkan, kaum perempuan mendapatkan penghasilan yang jauh di bawah laki-laki, walau jenis pekerjaan yang dikerjakannya sama.

³¹ Banks, 5; Tatang M Amirin, “Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia.,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 1, no. 1 (2012): 3.

³² Banks, *An Introduction to Multicultural Education.*, 5.

³³ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 141.

³⁴ Zamroni. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), hal. 141

³⁵ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural.*, 141.

Pada perkembangannya kemudian, gerakan menghilangkan adanya diskriminasi pendidikan juga berkembang diarahkan bagi orang-orang penyandang cacat atau “disabel.”. Perlu dicatat bahwa dalam nukilan di atas disebutkan bahwa subjek sasaran pendidikan multicultural dalam rangka memperoleh kesetaraan pendidikan itu adalah: (1) kaum perempuan, (2) kelompok etnis, (3) kelompok minoritas kebahasaan, (4) kelompok berpendapatan rendah, dan (5) penyandang kecacatan. Seperti telah disinggung di muka, kelompok berpendapatan rendah miskin karena etnis atau rasnya terdiskriminasi. Bahasa (tidak mampu berbahasa Inggris yang dijadikan pengantar pengajaran di sekolah), juga terkait asal-usulnya yang etnis non-bahasa Inggris. Sementara itu, kecacatan merupakan sesuatu yang khusus, karena tidak terkait dengan etnisitas, walaupun, karena status ekonomi kelompok minoritas itu rendah, penyandang cacat itu banyak dari kalangan minoritas³⁶.

Berawal dari gerakan menolak diskriminasi di Amerika yang kemudian lebih populer disebut sebagai pendidikan multikultural ini, gerakan anti diskriminasi pendidikan berkembang ke seluruh dunia. Di Indonesia, penolakan diskriminasi pendidikan secara eksplisit tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 4 ayat 1, bahwa: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Selain UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dukungan Negara terhadap praktek diskriminasi juga terlihat dalam Undang-Undang Anti Diskriminasi Tahun 2008. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka segala bentuk diskriminasi berdasar identitas sosial-budaya seseorang dapat dilihat sebagai tindak pidana. Namun, beberapa bulan setelah pengesahan undang-undang tersebut, surat kabar nasional *Jakarta Post* memuat laporan berjudul "*Ethnic Chinese still face hurdles to get ID cards: Survey*" (16 Desember 2008). Laporan ini hanyalah satu contoh dari sejumlah laporan sejenis yang dapat ditemukan di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa meski Undang-Undang Anti Diskriminasi telah disahkan, praktek diskriminatif tetap terjadi di tengah masyarakat. Contoh ini menggambarkan ungkapan yang menyatakan bahwa "*Stateways cannot change folkways*" yang berarti bahwa upaya menghilangkan sikap dan praktik diskriminatif di tengah masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan piranti hukum³⁷.

³⁶ Amirin, "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia.," 4-5.

³⁷ Madyaningrum, "Diskriminasi Berdasar Identitas Sosial-Budaya Dan Pendidikan HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Sosial.," 3.

2. PENDIDIKAN NILAI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nilai berarti harga (taksiran harga)³⁸. Secara istilah, beberapa sarjana mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang dianggap penting, baik, dan perlu dijaga. Mislanya saja, Menurut Steeman nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup³⁹. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.

Nilai menurut Rokeach merupakan suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek⁴⁰. Sedangkan menurut Linda dan Richard Eyre Yang dimaksud dengan nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan orang lain⁴¹. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik dan memperlakukan orang lain secara lebih baik.

Definisi lain mengenai nilai diutarakan oleh Tyler, yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas atau idea yang dinyatakan oleh individu yang mengendalikan pendidikan dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan⁴². Selanjutnya dijelaskan bahwa sejak manusia belajar menilai suatu objek, aktivitas dan ide sehingga objek ini menjadi pengatur penting minat, sikap dan kepuasan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus menolong siswa menemukan dan menguatkan nilai yang bermakna dan signifikan bagi siswa dalam memperoleh kebahagiaan personal dan memberi kontribusi positif terhadap masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan keyakinan dalam menentukan suatu pilihan untuk menjadikan hidup seseorang menjadi lebih baik. Dengan menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku pada suatu daerah sebagai acuan untuk memperoleh kehidupan yang “dianggap” lebih baik. Sebagai sesuatu yang dianggap baik, nilai antar satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Cara pandang sebuah masyarakat terhadap kehidupan, akan menentukan nilai yang dipegang, dan dianggap baik.

³⁸ <https://kbbi.web.id/nilai>, diakses tanggal 8 Nopember 2022

³⁹ Adisusilo Sutarjo, *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi Dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 56.

⁴⁰ Mardapi Djemari, *Pengukuran Penilaian & Evaluasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 106.

⁴¹ Adisusilo, Sutarjo. 2013. *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 56, 57

⁴² Mardapi Djemari, 2012. *Pengukuran Penilaian & Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta : Nuha Medika, 106

Meskipun demikian, ada juga nilai yang bersifat universal. Semua daerah, komunitas, agama, suku dan bangsa apapun menganggap nilai ini sebagai sesuatu yang baik dan perlu dijaga. Misalnya saja nilai kejujuran, kesopanan, kerja keras, menghormati orang lain, dll.

Untuk menjaga, merawat, melestarikan sesuatu yang dianggap penting dan baik itu, pendidikan memegang peranan penting. Setiap bangsa memiliki budaya, sekaligus nilai-nilai intrinsik yang unik⁴³. Terjaga atau punahnya nilai-nilai yang unik tersebut, sangat bergantung pada pendidikan yang dilakukan. Sederhananya, pendidikan merupakan wahana untuk mentransmisikan, sekaligus menjaga sebuah nilai. Inilah signifikansi pendidikan nilai.

Terkait dengan agama lokal, untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan nilai-nilai yang diyakini oleh komunitas dapat dilakukan melalui pendidikan. Bahkan, pada konteks diskriminasi, pendidikan menjadi wahana efektif untuk melakukan perlawanan. Pada konteks ini, pendidikan nilai seringkali dijadikan sebagai wahana strategis untuk mempertahankan diri, sekaligus menyebarkan sebuah ideologi, sehingga keberadaan sebuah komunitas dapat bertahan⁴⁴. Bahkan, melalui program pendidikan, segala sesuatu yang dicita-citakan akan menjadi mungkin. Karena, pendidikan adalah membuka pintu, membuka pemikiran, dan akhirnya membuka kemungkinan terwujudnya cita-cita⁴⁵. Menurut Takwin, kesamaan nilai yang bersumber dari kesamaan ideologi merupakan rahasia kemampuan bertahan hidup sebuah komunitas. Melalui perjuangan terhadap nilai yang diyakini benar, sebuah komunitas akan bersatu dan terus bertahan⁴⁶. Untuk menjaga, merawat, bahkan menyebarkan kesamaan nilai itu, tentu dilakukan melalui proses-proses pendidikan nilai.

3. GERAKAN SOSIAL BARU

A. Pengertian Gerakan Sosial

Secara formal, gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang meliputi kolektivitas itu sendiri. Dalam pengertian yang lain, menjelaskan bahwa, “gerakan sosial adalah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong

⁴³ Sixten SR Haraldson, “Role of Education in Preserving Traditional Cultures and as Development Factor.,” *Health Policy and Education* 3, no. 4 (1983): 291.

⁴⁴ Haris, “The Role of Muslims in the Struggle Against Violent Extremist Ideology in Indonesia,” 163; Sirozi, “The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia: Ja’far Umar Thalib of Laskar Jihad (Jihad Fighters) and His Educational Background.,” 83.

⁴⁵ M. Sirozi, *The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia: Ja'far Umar Thalib of Laskar Jihad (Jihad Fighters) and His Educational Background. The Muslim World*, Vol. 95 No. 1, 2005, 83.

⁴⁶ Takwin, B. (2009). *Akar-Akar Ideologi*. Jalasutra.

atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi masyarakat itu". Ciri utama gerakan sosial sebagaimana yang disampaikan oleh Horton, adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan⁴⁷.

Berbagai pengertian gerakan sosial diatas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Lauer, bahwa "gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengendalikan perubahan atau untuk mengubah arah perubahan"⁴⁸. Gerakan sosial, lahir pada mulanya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas terhadap suatu kondisi atau keadaan. Kelompok itu semula tidak terorganisasi, dan tidak terarah, serta tidak memiliki perencanaan yang matang. Orang-orang saling membagi duka, dan mengeluh. Pemimpin dan organisasi dalam kebanyakan gerakan, biasanya muncul tidak lama setelah situasi keresahan sosial tercipta. Setelah mengalami tahap penurunan kegiatan, kadang kala gerakan-gerakan itu sempat menciptakan organisasi permanen, dan seringkali pula gerakan itu hilang begitu saja tanpa bekas yang berarti.

Lebih detail, begawan sejarah, Sartono Kartodirdjo, menguraikan bahwa, gerakan sosial adalah gerakan perjuangan yang dilakukan oleh golongan sosial tertentu melawan eksploitasi ekonomi, sosial, politik, agama, dan kultural, oleh kelompok penekan, apakah itu penguasa atau negara. Termasuk dalam gerakan semacam ini, di antaranya, adalah kaum petani dan buruh⁴⁹. Sehubungan dengan konsep yang dikemukakan di atas, dengan menelusuri perkembangan kisah gerakan sosial yang semakin beraneka ragam dalam konteks kontemporer, maka tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial⁵⁰.

Pada kesempatan lain, sosiolog terkemuka Gidden mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui kegiatan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Selain itu, pendapat ini juga didukung oleh Sydney Tarrow , gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Dari sini dapat

⁴⁷ B.P Horton, *Sosiologi*. (Jakarta: Erlangga, 1999).

⁴⁸ J Lauer, *The New Theoretical Movement*, Dalam Neil J. Smelser (Ed.), *Handbook of Sociology*. (Newbury Park: Sage, 1976).

⁴⁹ S Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

⁵⁰ Syamsu A Kamaruddin, "Pemberontakan Petani UNRA 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Sulawesi Selatan Pada Masa Pendudukan Jepang).," *Hubs-Asia* 10, no. 1 (2012): 21–22.

disimpulkan bahwa gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang bersifat menentang untuk menentang tujuan yang kolektif pula⁵¹.

Robert Miesel menyebutkan beberapa ciri karakteristik gerakan sosial : (1) Gerakan sosial dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris. (2) Gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. (3) Aktivitas utama dari gerakan sosial adalah memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan, (4) Bentuk organisasi dan strategi-strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk-bentuk tindakan yang terlembagakan dan (5) Fenomena perilaku kolektif (demonstrasi) sangat berhubungan dengan gerakan sosial, karena merupakan unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah gerakan⁵².

Perbedaan mencolok antara gerakan sosial dengan organisasi formal lainnya seperti partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan yang lebih terorganisasi, gerakan sosial seringkali hanya diorganisasi secara informal, meski ia memiliki kaitan dengan partai politik dan juga kelompok-kelompok yang terlembagakan, dan bahkan sesuatu gerakan sosial bisa mengarah kepembentukan partai politik. Tidak semua bentuk perlawanan politik yang bertebaran diberbagai belahan dunia bisa disebut dengan gerakan sosial. Bagi Tarrow, konsep gerakan harus memiliki empat properti dasar berikut :

- a. Tantangan kolektif, yang membedakan gerakan sosial dari tindakan-tindakan kolektif lain, seperti memberikan suara (voting), permainan sepakbola dan lain-lain adalah bahwa gerakan sosial selalu ditandai oleh tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu terhadap para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain, atau aturan-aturan kultural tertentu. Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem yang represif, tantangan kolektif disimbolkan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Bahkan dinegara-negara demokrasi liberal, orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan suatu gerakan mempertontonkannya melalui kata-kata, corak pakaian, dan perilaku pribadi yang mencirikan tujuan kolektif mereka. Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

⁵¹ Suharko, "Gerakan Sosial Baru Di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani.," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2006): 3.

⁵² Miesel, *Teori Pergerakan Sosial.*, 56–58.

gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi focal point (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, menciptakan konstituen untuk diwakili.

- b. Tujuan bersama, Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaimbersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.
- c. Solidaritas dan identitas kolektif, sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.
- d. Memelihara politik perlawanan, Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu periode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguao menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau merubah menjadi sekte religius, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi,. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial.⁵³

⁵³ Suharko, Suharko. "Gerakan Sosial Baru ...", hlm. 5-7.

B. Dari Gerakan Sosial Menuju gerakan Sosial Baru: Kajian Teoritis

Seiring dengan perkembangan zaman pada semua aspek, Gerakan Sosial pun mengalami perkembangan, baik dari sudut pandang kuantitas maupun kualitas. Pada aspek kerangka teori, perkembangan gerakan sosial yang dilakukan membuat para sarjana mengembangkan teori gerakan sosial yang cenderung baru yang kemudian disebut sebagai teori Gerakan Sosial Baru (GSB). Munculnya teori GSB ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang kemudian melahirkan tumbuhnya kesadaran kemanusiaan.

Modernitas merupakan keadaan yang paling subur untuk tumbuhnya bermacam gerakan sosial, dalam berbagai bentuk dan isu. Gerakan sosial merupakan ciri dari masyarakat modern⁵⁴. Menurut pendapat Bonner yang dikutip Asrawijaya⁵⁵, di negara-negara berkembang, kajian tentang gerakan sosial dan transformasi sosial tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan. Perbedaan kekayaan, kekuasaan dan kedudukan yang sangat tajam membentuk ketimpangan sosial yang selanjutnya menimbulkan pengalaman dan kesan eksploitasi, penindasan, ketidakadilan dan pencabulan hak yang menggerakkan konflik kelompok.

Di Indonesia Gerakan Sosial sudah berlangsung sejak era kolonialisme, tujuan dari gerakan sosial ini adalah sebagai upaya bentuk protes terhadap penguasa atau pemerintahan yang sedang berlangsung kala itu. Misalkan saja Gerakan Samin Surosentiko di Pegunungan Kendeng, Pemberontakan Petani di Banten 1888, dan yang lainnya. Di mana gerakan ini mengajarkan sebuah ideologi tertentu dalam upaya perlawanan secara pasif maupun aktif terhadap pemerintahan kolonial yang dipandang menyengsarakan rakyat.

Di era modern pun bermunculan gerakan sosial seperti gerakan sosial kaum tarekat, NII, Hizbut Tahrir Indonesia, gerakan petani di Banten, Batang, Pekalongan, Cilacap dan Cipari, gerakan sosial di tanah Makasar "Batara Gowa", serta gerakan mistik Mukhdi Akbar di Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan. Selanjutnya di tahun 2011-2015 lahir dan berkembangnya gerakan sosial Gafatar.⁵⁶

Perkembangan zaman yang begitu cepat membuat para sarjana studi gerakan sosial memformulasi kembali perspektif teori gerakan sosial yang pada periode pertama berpengaruh cukup kuat yang didominasi oleh psikologi sosial klasik. Periode selanjutnya lahir dan menandai semangat baru dalam merumuskan ulang berbagai pendekatan studi gerakan sosial

⁵⁴ Wellhendri Azwar, *Gerakan Sosial Kaum Tarekat*. (Padang: Imam Bonjol Press, 2015).

⁵⁵ Enkin Asrawijaya, "Dinamika Gerakan Sosial Gafatar.," *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 1, no. 1 (2018): 51–52.

⁵⁶ Asrawijaya, Enkin. "Dinamika Gerakan Sosial Gafatar." *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial* 1.01 (2018): 47-66, hal. 51-52.

lama, ke dalam formulasi baru yang disebut Gerakan Sosial Baru (New Social Movement). Pada masyarakat kontemporer yang banyak berubah, telah menjadikan Gerakan Sosial Baru (GSB) memiliki citra baru dalam berbagai tampilan wajah, tipe-tipe, bentuk serta model gerakan sosial.

Pada Periode kedua ini, semangat GSB lebih menitik-beratkan perspektif studi pada tindakan rasional di dalam pemaksaan-pemaksaan yang bersifat struktural. Dalam hal ini, bahwa sifat dari gerakan sosial dipengaruhi oleh konteks struktural yang berkembang saat itu, sehingga bentuk dan model gerakan sosial pun memiliki tipe-tipe dan rumusan-rumusan bersifat makro ketimbang mikro sosiologis dalam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi. Menurut Robert Miesel, terdapat dua paradigma besar yang saling berbeda muncul dalam kurun waktu ini, yakni paradigma ketegangan struktural (structural strain paradigma); selanjutnya paradigma ini kemudian digabungkan, lalu sampai pada batas tertentu diganti oleh paradigma Marxis dan paradigma pengalangan sumber daya (resource mobilization paradigma). Sedangkan paradigma GSB kontemporer yakni paradigma berorientasi identitas dengan citra pemikiran sosiolog Eropa, luput dari pembahasan Miesel di atas. Menuju arah baru studi gerakan sosial (new social movement).

Untuk melengkapi kekurangan itu, Rajendra Singh (teoritisi gerakan sosial India) menggaris bawahi, bahwa dalam periode GSB paling tidak terdapat dua aliran utama (mainstream) yaitu teori mobilisasi sumber daya (resources mobilization theory) yang muncul di Amerika Serikat dan dipengaruhi oleh pemikiran Mancur Olson, Oberschall, McCarthy dan Zald, Gamson, Charles Tilly dan Tarrow. Kemudian paradigma kedua yaitu teori yang berorientasi identitas berasal dari Eropa, yang lebih ekspresif dipengaruhi oleh pemikir besar seperti, Pizzorno, Jean Cohen dan belakangan perspektif pemikiran yang agak lebih terbuka berasal dari Alain Touraine. Di sini rupanya paradigma ketegangan struktural (structural strain paradigma) luput dari perhatian Rajendra, mungkin dalam pemahamannya bahwa paradigma ketegangan struktural (structural strain paradigma) merupakan bagian atau kelanjutan bentuk lain dari paradigma mobilisasi sumber daya (resource mobilization paradigma), sebagai paradigma yang sama-sama berorientasi pada proses politik (political proces). Namun hal yang terbaru dalam perkembangan paradigma GSB kontemporer maka ia menambahkan paradigma berorientasi identitas dari Alain Touraine dan kawan-kawan⁵⁷.

⁵⁷ Joni Rusmanto, *Gerakan Sosial : Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan Dan Kelemahannya* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2013), 21–22.

Sementara itu, Pada abad 20-an, muncul gerakan dan perlawanan terhadap dominasi politik yang lebih variatif dan kompleks dengan intensitas semakin bertambah. Muncul gerakan memperjuangkan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1955-1968, setelah itu banyak bermunculan gerakan memperjuangkan anti-perang, lingkungan, feminisme dan lain sebagainya. Gerakan feminisme tercatat muncul dan semakin menggeliat setelah Deklarasi PBB Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1984⁵⁸. Gerakan anti-perang terjadi signifikan pada tahun 1960an di Amerika menghadapi isu Perang Vietnam. Gerakan lingkungan muncul pada 1970-an dengan munculnya LSM Lingkungan dan juga Partai Hijau yang berdiri di negara-negara Eropa Barat. Berbagai fenomena ini juga turut mendukung munculnya teori Gerakan Sosial Baru (GSB)⁵⁹.

Menurut para ahli, teori Gerakan Sosial Baru muncul seiring dengan perubahan bentuk masyarakat. Perkembangan masyarakat kekinian tentu juga menjadi pertimbangan perihal bagaimana mengamati bentuk gerakan sosial yang muncul, strategi yang digunakan, serta visi dan perubahan yang ingin dicapai. Para teroretikus sosial juga telah mengembangkan pemikirannya dalam merumuskan masyarakat kontemporer. Alain Touraine menyebut masyarakat kekinian sebagai masyarakat terprogram (*programmed society*), Daniel Bell memakai istilah masyarakat Post-Industri, Jean Baudrillard menyebutnya sebagai masyarakat postmodern, Jean-François Lyotard menggunakan istilah masyarakat terkomputerisasi (*computerized society*), Anthony Giddens punya istilah kapitalisme lanjut. Pada intinya, pemikiran mereka menyebut adanya pengaruh perkembangan teknologi, kapitalisme dan industri yang eksekutif terhadap kebudayaan masyarakat.

Selain itu, bentuk masyarakat dan relasi sosial tentu juga semakin kompleks. Touraine mengidentifikasi ada empat tipe masyarakat berdasarkan ciri antagonismenya yakni masyarakat agraris, merkantilisme, industri dan terprogram. Keempat tipe tersebut cenderung tidak disebut sebagai progres atau evolusi masyarakat, tetapi mereka diandaikan bisa saling tumpang tindih. Antagonisme dalam masyarakat agraris adalah antar pekerja dan tuan tanah. Merkantilisme antar budak dan saudagar. Dalam masyarakat industri yang berkonflik adalah kelas buruh dan pemodal. Sedangkan dalam masyarakat yang terprogram, antagonismenya lebih kompleks. Ciri khas dalam masyarakat terprogram adalah produksi hal simbolik atau kultural yang membentuk atau mentransformasikan representasi esensi manusia dan dunia eksternal.

⁵⁸ Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 60.

⁵⁹ Situmorang, 25.

Gagasan Touraine bermaksud mengenali tipe (cara) produksi baru, kekuatan baru dan konflik sosial baru dalam masyarakat kontemporer. Kekuatan baru yang bisa diidentifikasi adalah kelompok yang lahir dari pertumbuhan sektor jasa, serta produksi pengetahuan/informasi yang melimpah. Mereka eksis sebagai profesional karena level pendidikannya. Mereka memiliki kemampuan memproduksi pengetahuan atau informasi untuk memaknai hal tertentu. Kemampuannya dalam hal kultural membuatnya kerap beraktivitas berdasarkan identifikasi atau sistem makna tertentu. Konflik sosial dalam hal ini cenderung berkuat di persoalan produksi dan sirkulasi pengetahuan atau informasi, kondisi sosial berbasis produksi dan penggunaan pengetahuan atau informasi, dan konstruksi makna kaitannya dengan identitas personal maupun kolektif.

Aktor sosial yang berkonflik yakni mereka yang memiliki orientasi kultural yang berbeda, dalam seperangkat kultural yang membentuk ketimpangan relasi sosial diantara mereka. Mereka berjuang dalam arena produksi kultural, mengubah seperangkat sistem makna, yang melaluinya relasi sosial dimapankan. Touraine menyebut konflik sosial baru ini yakni antara kebijakan struktur ekonomi-politik dengan partisipasi terhadapnya (kebijakan negara dan partisipasi publik), atau kelompok masyarakat yang marjinal dengan yang dominan. Gerakan sosial baru merupakan fenomena yang muncul dalam konflik sosial baru tersebut⁶⁰.

Touraine melanjutkan, bahwa gerakan sosial mesti dipahami sebagai suatu tipe khusus dari konflik sosial. Banyak macam perilaku kolektif seperti; *panic, craze, fashion, current opinion* dan inovasi kultural, yang tidak tergolong konflik. Sebuah konflik punya pengandaian awal sebuah definisi jernih tentang aktor-aktor yang bertentangan atau bersaing serta sumber daya yang mereka perebutkan. Konflik harus dimaknai melalui taruhan yang dianggap bernilai dan dihasratkan oleh dua atau lebih pihak yang bertentangan. Menurut Touraine, semua konflik memiliki: a). Sekumpulan aktor terorganisir b). Taruhan nilai atau yang dihasratkan, c). pergumulan dan kompetisi antar pihak yang bermusuhan untuk mencapai apa yang dipertaruhkan tersebut. Di dalam struktur luas paradigma konflik ini, perlu untuk memilah berbagai jenis konflik sosial, sebagaimana yang Touraine rumuskan sebagai berikut:

- a. Pengejaran kepentingan kolektif secara kompetitif.
- b. Konflik jenis ini dimaknai sebagai ekspresi dari relasi antara input dan output para aktor di dalam sebuah organisasi, atau ekspresi dari perampasan relatif yang mereka alami.
- c. Rekonstruksi identitas sosial, budaya atau politis.

⁶⁰ Yongky Gigih Prasisko, "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 Dan Proses Demokratisasi Indonesia.," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3, no. 2 (2016): 10–12.

- d. Di sini lawan didefinisikan sebagai orang asing atau penyerbu ketimbang sebagai kelas atas atau elit kekuasaan. Para aktornya memaknai diri mereka sebagai sebuah komunitas yang nilai-nilai telah diserang. Konflik ini berpusar pada konsepsi mempertahankan komunitas. Banyak gerakan kontemporer di India seperti Shiv Sena di Maharashtra, Jharkhand di Bihar, Gorkhaland di Bengal dan Uttarakhand di Uttar Pradesh, merupakan atau dapat dilihat sebagai contoh ekspresi perilaku konflik dari Touraine.
- e. Kekuatan politik. Menurut Touraine, konflik ini bertujuan untuk melakukan perubahan aturan main, dan bukan hanya keuntungan relatif dalam sebuah sistem yang given.
- f. Mempertahankan status dan hak istimewa (privilege). Konflik jenis ini menjelaskan cara sebuah kelompok kepentingan berupaya mempertahankan kepentingannya dengan atas nama kepentingan nasional dari kelompok kepentingan tersebut.
- g. Kontrol sosial arus kebudayaan utama. Touraine menangkap pola-pola kebudayaan dalam tiga jenis, yaitu; sebuah model pengetahuan, semacam investasi dan prinsip-prinsip etis.
- h. Penciptaan sebuah tatanan baru.

Ciri Utama Teori Gerakan Sosial Baru

Teori Gerakan Sosial Baru memiliki beberapa ciri utama yang pertama, menempatkan aksi gerakan sosial menjadi suatu aksi kolektif yang memiliki nilai positif dan rasional. Kedua, mengoreksi serta mengkontekstualisasikan teori-teori gerakan sosial pada era-era sebelumnya, misalnya teori eksploitasi kelas oleh Karl Marx menjadi teori keluhan yang lebih cocok digunakan di era kontemporer, bahwa aksi-aksi kolektif tidak hanya didorong oleh eksploitasi kelas terhadap buruh oleh pemilik alat produksi. Ketiga, kajian gerakan sosial kian beraneka ragam karena semakin banyaknya praktik gerakan dan studi gerakan sosial di luar wilayah Amerika dan Eropa. Keempat, Gerakan Sosial Baru mampu mengidentifikasi faktor yang memfasilitasi berkembangnya gerakan, kekuatan atau kelemahan dan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari suatu gerakan social.⁶¹

Gerakan Sosial Baru secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan Gerakan Sosial Lama, maka model gerakan sosial baru tidak terjebak ke dalam diskursus ideologi seperti anti-kapitalisme (anticapitalism), revolusi kelas (class revolution),

⁶¹ Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 25

dan perjuangan kelas (class struggle). Perubahan bentuk gerakan sosial dipengaruhi oleh terjadinya perubahan bentuk masyarakat. Perkembangan masyarakat dari masyarakat modern (modernist society) menuju masyarakat pasca-modernitas (post-modernist/postsociety) menggambarkan terjadinya perubahan bentuk dari Gerakan Sosial Lama (Old Social Movement) yang meliputi klasik dan neo-klasik menuju bentuk Gerakan Sosial Baru (New Social Movement)⁶².

Selain beberapa ciri yang membedakan Gerakan Sosial Baru dengan Gerakan Sosial Lama sebagaimana yang diuraikan diatas, berikut ini ciri-ciri lebih detail tentang Gerakan Sosial Baru:

1. Memiliki partisipan yang plural dari segi umur, gender, orientasi seksual atau profesi.
2. Tak lagi menggunakan ideologi sebagai alat pemersatu perjuangan, tetapi cenderung menggunakan identitas dan nilai kultural yang beragam. Ia cenderung menuntut reformasi institusi untuk memperbesar partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Mereka menginginkan demokratisasi kehidupan, dan menghapus dimensi politik di masyarakat.
3. Cenderung menggarap isu kultural yang berkaitan dengan identitas, seperti kepercayaan, nilai, simbol dan makna yang menjadi sentimen solidaritas bersama, yang membedakannya dengan kelompok sosial lain.
4. Relasi antar individu dan kelompok tidak jelas. Beberapa gerakan sosial kontemporer bersifat aksi individu atau personal. Seperti gerakan hak perempuan atau gay. Gerakan sosial baru juga tidak memiliki basis dan struktur yang kaku. Beberapa gerakan merupakan gerakan penegasan diri. Contoh seperti gerakan dalam peristiwa Mei 1968 di Perancis.
5. Gerakan sosial baru kerap melibatkan aspek intimasi dan perasaan manusia. Seperti gerakan kesehatan atau anti-rokok, gerakan transformasi diri termasuk mengubah perilaku fisik atau seksual. Ia bahkan berpengaruh sampai pada kehidupan sehari-hari: apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati.
6. Gerakan sosial baru menunjukkan pola mobilisasi anti-kekerasan dan pembangkangan yang menantang norma dominan dengan aksi pertunjukan dramatis.
7. Pengorganisasian dan penyebaran kelompok gerakan sosial baru berhubungan dengan krisis penyaluran partisipasi publik dalam sistem demokrasi. Krisis ini merupakan

⁶² Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 119.

faktor motivasi bagi aksi kolektif dalam pencarian bentuk alternatif partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

8. Gerakan sosial baru bersifat desentral, tersegmentasi dan menyebar. Bentuknya bervariasi tergantung kebijakan otoritas lokal. Diskusi dan perdebatan perihal kebijakan kerap mengukuhkan otonomi otoritas lokal terhadap otoritas nasional.⁶³

C. Diskriminasi Agama Lokal dan Munculnya Gerakan Sosial Baru

Agama lokal adalah istilah yang disematkan pada sistem kepercayaan asli nusantara, yaitu agama tradisional yang telah ada sebelum kedatangan agama-agama besar seperti, Hindu, Budha, Islam dan Kristen di bumi Nusantara ini. Banyak kalangan masyarakat yang tidak lagi mengetahui bahwa sebelum kedatangan agama „resmi”, masuk ke Indonesia di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli, seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat; agama Buhun di Jawa Barat; Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur; agama Parmalim, agama asli Batak; agama Kaharingan di Kalimantan; kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara; Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di Lombok; Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dan lain-lain.

Di dalam Negara Republik Indonesia, agama-agama asli Nusantara tersebut di degradasi sebagai ajaran animisme, penyembah berhala / batu atau hanya sebagai aliran kepercayaan. Hingga kini, tak satu pun agama-agama dan kepercayaan asli Nusantara yang diakui di Indonesia sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, Akta Kelahiran, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, Agama Asli Nusantara semakin punah dan menghilang, walaupun ada yang menganutnya, biasanya berada didaerah pedalaman seperti contohnya pedalaman Sumatra dan pedalaman Irian Jaya.

Sekalipun secara Antropologis, kepercayaan-kepercayaan asli Indonesia atau biasa disebut agama lokal, dapat disebut agama, namun sampai saat ini pemerintah belum memasukkan kepercayaan Asli Indonesia tersebut sebagai agama yang diakui sah untuk dipeluk oleh orang yang meyakiniya. Fakta ini tampaknya bersumber dari definisi agama yang

⁶³ Prasisko, Yongky Gigih. "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3.2 (2016), Hlm. 10-12.

diberlakukan pemerintah, sehingga agama-agama tersebut tidak dikategorikan sebagai agama, maka agama Lokal hanya dipandang sebagai kepercayaan primitif yang para penganutnya boleh dijadikan sasaran penyebaran agama resmi⁶⁴.

Dari optik kebudayaan, agama adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang meyakini kebenaran ajarannya, sehingga agama berkembang menjadi pengetahuan dan keyakinan yang suci, berbeda dengan pengetahuan sehari-hari yang bersifat profan. Dengan demikian, fenomena keagamaan merupakan bagian dari fenomena budaya yang dalam pengertian luas adalah struktur atau pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku (Royyani 2004). Agama dan ritual-ritual yang dimiliki masyarakat dalam kajian antropologi merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam setiap tindakannya bukan agama yang ada dalam teks-teks suci. Dengan demikian, maka tindakan yang dilakukan oleh para masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka dalam keseharian dan berinteraksi dengan sesama manusia maupun alam semesta akan berlandaskan pada etos agama yang diyakini (Royyani 2004). Ritual tradisi dalam agama lokal menjadi unsur yang penting dalam menanamkan pengaruh ajaran agama pada masyarakatnya dan mendominasi pandangan hidup para penganutnya. Menurut Patji (2005) ritual agama yang dilakukan oleh para penganut agama lokal sangat erat kaitannya dengan kebudayaan lokal, mereka lebih mengutamakan pemahaman ajaran ke dalam kalangan para pengikutnya (internal orientation) dari pada berusaha menyebarkan ke luar (eksternal orientation)⁶⁵.

Sejak masa kemerdekaan, baik masa Ode lama, Orde baru hingga saat ini, komunitas agama lokal masih terus mendapat perlakuan diskriminatif. Melalui Inpres No 14/1946 tentang agama yang sah dan agama yang terlarang, pemerintah Indonesia hanya mengakui 5 agama resmi, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Inpres ini oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid dicabut dan diganti melalui Keppres No 6/2000, yang menjadikan Konghucu sebagai agama resmi.⁶⁶

Meskipun Gusdur sudah mengakui Konghucu sebagai agama resmi, agama lokal masih belum diakui sebagai sebuah agama. Mereka masih disebut sebagai aliran kepercayaan, yang oleh banyak orang disebut sebagai sesat. Aliran kepercayaan ini berada dibawah kontrol

⁶⁴ Ahmad Mutaqin, "Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais Di Cigugur Kuningan Jawabarat)," *Al-Adyan* 8, no. 1 (2017): 89–90.

⁶⁵ Mohammad Fathi Royyani, "Upacara Seren Taun Di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan.," *Jurnal Biologi Indonesia* 4, no. 5 (2017): 412.

⁶⁶ Daud Azhari, "Gus Dur: Nasionalis plus Pluralis," *Jurnal Kajian Kebudayaan dan Demokrasi Pesantren Ciganjur*, VI, (2010), 66

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena hanya sebatas aliran kepercayaan, mereka tidak mendapat hak-hak sebagai agama pada umumnya, seperti pencatatan pernikahan, berbagai ritual, perayaan hari suci, dsb. Adanya diskriminasi terhadap penganut agama lokal ini merupakan sebuah ironi, karena keberadaan mereka yang sering disebut sebagai “agama asli” Nusantara dan mengklaim sebagai penjaga warisan budaya Nusantara, namun kerap mendapat diskriminasi di Negerinya sendiri⁶⁷.

Menurut Steenbirk, Modernisme, Monotheisme dan Militerisme adalah 3 faktor yang membuat terjadinya diskriminasi terhadap penganut agama lokal. Modernisme telah merusak warisan budaya leluhur, monotheisme telah menghancurkan kekayaan spiritual Nusantara, untuk hanya mengakui agama yang memiliki prinsip tauhid (1 tuhan), sehingga Steenbirk yang mengutip Utami mengatakan, jika militer harus kembali ke barak, dan tidak boleh mencampuri urusan sipil, maka para agamawan termasuk Kyai dan para pastur juga harus kembali ke barak, tidak boleh mencampuri kekhasan sekaligus kekayaan warisan budaya Nusantara⁶⁸.

Berbagai diskriminasi terhadap penganut agama lokal tersebut membuat mereka tergerak untuk melawan dengan melakukan gerakan sosial. Salah satu hasil dari gerakan sosial yang dilakukan adalah terbitnya keputusan MK No. 97 Tahun 2016 tentang kolom KTP Penghayat. Melalui putusan MK ini, agama lokal mulai diakui keberadaannya dengan dicantumkannya kata penghayat pada kolom KTP agama. Meskipun demikian, bukan berarti gerakan sosial yang dilakukan penganut agama lokal berhenti. Hal ini disamping pencantuman kata “penghayat” masih bersifat umum, belum mencantumkan masing-masing agama lokal yang beragam, juga diskriminasi masih terus terjadi, meskipun telah diterbitkannya putusan MK tersebut.

⁶⁷ Wawancara dengan Dewi Kanti, putri pangeran Ramajati (pimpinan komunitas Agama Djawa Soenda/ADS). Wawancara dilakukan tanggal 14 Juli 2022 di Paseban, Cigugur, Kuningan)

⁶⁸ Karel Steenbrink, “The Reformasi of Ayu Utami; Attacking the Monopoly of the Great Religions,” *Wacana* 15, no. 2 (2014).

BAGIAN TIGA.

SEJARAH BERDIRI, AJARAN POKOK, PENDIDIKAN NILAI SERTA GERAKAN SOSIAL YANG DILAKUKAN 3 AGAMA LOKAL DI INDONESIA

1. MENGENAL AGAMA LOKAL AGAMA DJAWA SOENDA (ADS)

A. Sejarah berdiri

Agama di Indonesia tidak hanya enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, masih banyak agama lokal yang hidup di negara ini. Salah satunya ialah Sunda Wiwitan yang berada di Kuningan Jawa Barat. Agama ini berdiri pada tahun 1848 oleh Pangeran Madrais Alibasa Widjaja Ningrat. Sunda Wiwitan atau ADS juga dikenal dengan Madraisme karena mengambil nama pendirinya. Pangeran Madrais dipercaya oleh masyarakat Sunda sebagai keturunan Sultan Gebang Pangeran Alibasa I yang masih ada hubungan dengan Kasultanan Cirebon. Sedangkan menurut Pangeran Djatikusumah, yaitu cucunya yang masih hidup, nama Madrais ini berasal dari Muhammad Rais yaitu sebuah nama yang identik dengan kultur Islam.⁶⁹

Pada usia muda Pangeran Madrais mendapat pendidikan pesantren, hal tersebut merupakan pengaruh kakek dari pihak ibu yang mengasuhnya. Namun dari beberapa catatan yang diketahui, beliau menunda pelajarannya dan pergi mengembara ke berbagai "*paguron*" atau perguruan yang ada di Jawa Barat.⁷⁰ Hasil dari Pengembaraan Pangeran Madrais merupakan babak penting dalam sejarah ADS, berawal dari pengembaraan itulah ADS beserta pokok-pokok ajarannya lahir. Secara teologis, ada yang memandang bahwa ajaran-ajaran ADS merupakan hasil ramuan tasawuf Islam dengan mistisme Jawa yang dirangkai dengan unsur-unsur kebudayaan Sunda.⁷¹

Dinamai Sunda Wiwitan karena Kyai Madrais sering mengupas dan mengajarkan mengenai nilai-nilai kebangsaan dalam tradisi budaya spiritual Jawa dan Sunda. Beliau mendirikan ADS ini dengan maksud terselubung yaitu ingin membangkitkan kesadaran masyarakat Kuningan Jawa Barat, khususnya masyarakat Cigugur guna melawan penjajahan Belanda dalam sistem perdagangannya pada VOC. Untuk tujuan tersebut, ADS bergabung dengan Mataram. Akibatnya, pada tahun 1901 Kyai Madrais pernah ditangkap kemudian dibuang oleh Belanda ke Boven Digul Papua Barat.⁷²

⁶⁹ Lihat majalah Tempo, terbitan 29 Januari 1983

⁷⁰ Strathof, *Sadjarah Ngadegna Agama Djawa Sunda (ADS)*, Garut, 1970, h.1

⁷¹ Ahmad Mutaqin, "*SPIRITUALITAS AGAMA LOKAL (Studi Ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawabarat)*." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8.1 (2013): 92

⁷² Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda, 2008

Pada tahun 1939 Kyai Madrais wafat dan kepemimpinan ADS di gantikan oleh Pangeran Tedja Buwana Alibassa, yang merupakan anak kyai Madrais. Di bawah kepemimpinan Pangeran Tedja, ADS diajukan pada Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI) dan Sejak saat itulah para penganut ADS dapat menjalankan kegiatan keagamaan mereka nyaris tanpa halangan.⁷³ Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 September 1964, Pangeran Tedjabuana sebagai pimpinan ADS terpaksa membuat pernyataan bermeterai mengenai pembubaran organisasi ADS, ia dan keluarganya menyatakan diri masuk ke agama Katolik. Selain menandatangani surat tersebut, pimpinan ADS juga meminta agar para pengikutnya tidak lagi meneruskan organisasi ADS, baik secara perorangan ataupun secara kolektif. Hal tersebut sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan Panitia Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Kuningan tertanggal 18 Juni 1964, yang menetapkan bahwa perkawinan ADS yang selama itu dianggap sah secara adat, kini dianggap perkawinan liar dan tidak lagi sah menurut hukum.

Singkat cerita, pada tahun 1981 setelah Himpunan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa (HPK) didirikan dan ADS dapat bangkit kembali di bawah pimpinan Pangeran Djatikusumah, ADS memmanifestasikan diri dalam Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) serta terdaftar sebagai lembaga formal dengan nomor 192/R.3/N. 1/1982 pada Direktorat Jenderal Bina Hayat yang berwilayah kerja di Jawa Barat dan sekitarnya.⁷⁴

B. Ajaran pokok

Pada zaman penjajahan di Indonesia, Sunda Wiwitan atau biasa di sebut dengan ADS mengajarkan mengenai bagaimana setiap orang memiliki rasa kepribadian dan persatuan bangsa sebagai dasar nasionalitas guna melawan penjajahan Belanda pada masa itu.⁷⁵ Selain itu, sejak awal Pendiri ADS yaitu Kyai Madrais sangat menonjolkan unsur-unsur budaya spiritual Sunda dan menganalisis hakikat ajaran agama-agama resmi yang ada seperti Kristen, Islam, Hindu dan sebagainya dengan tujuan menemukan titik persamaan mengenai rasa kebutuhanan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar timbulnya cinta dan kasih diantara sesama, serta tumbuhnya toleransi antar umat beragama.⁷⁶

⁷³ *Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang*, 1995, Cigugur-Kuningan Jawa Barat, h.4

⁷⁴ *Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang*, 1995, Cigugur-Kuningan Jawa Barat, h.4

⁷⁵ Kushendrawati, Selu Margaretha. "Komunitas Agama Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan, Jawa Barat." (2012) : h.37

⁷⁶ Kushendrawati, Selu Margaretha. "Komunitas Agama Djawa-Sunda... h.37

Menurut paham ADS, seharusnya manusia dipandang dalam konteks keseluruhan dengan bentuk keanekaragaman hidup masing-masing. Seperti ungkapan kaum ADS saat dilakukan penelitian oleh Kushendrawati. Kushendrawati mengungkapkan bahwa Komunitas ADS menampakan adanya regionitas serta pluralitas dengan semboyannya bahwa "Semua umat Tuhan, sepengetahuan tetapi bukan sepengekuan".⁷⁷

ADS merupakan identitas milik komunitas Sunda dan Jawa (karena Kuningan merupakan daerah frontier antara Jawa Barat dan Jawa Tengah). Keduanya merupakan sinkretisme warisan agama serta kebudayaan Sunda-Jawa sejak masa lampau. Dengan demikian, ADS merupakan kearifan lokal di masyarakat Jawa Barat khususnya di daerah Kuningan Jawa Barat. ADS memiliki beberapa ritual adat yang memuat unsur-unsur peribadatan tertentu, seperti *Seren Taun* atau upacara yang selalu diadakan setiap tahun secara rutin sebagai sebuah ritual keagamaan (jika dapat dikategorikan seperti itu) sebagai bukti puji dan syukur mereka dihadapan Yang Maha Esa⁷⁸ atas kehidupan dengan segala karunia dan nikmat dalam rahmat-Nya. Objek di dalam upacara *Seren Taun* yaitu terdiri dari tanam-tanaman terutama padi. Kemudian ada Adat Karuhun Urang atau disingkat menjadi AKUR. Adat Karuhun Urang adalah budaya spiritual ADS yang berisikan tuntunan-tuntunan luhur tentang bagaimana manusia harus berperilaku. Dalam kosmologi mistisisme Jawa, isi dari adat tersebut dikenal dengan sebutan "Sangkan Paraning Dumadi" yaitu pandangan yang menyadarkan mengenai asal-usul kehidupan, perkembangan serta tujuan hidup manusia.

Dari semua ritual adat yang ada, ajaran Madrais merupakan ajaran yang mendasar pada ajaran asli Sunda atau dikenal dengan sebutan Sunda wiwitan. Konsep ajaran Sunda Wiwitan ini dikenal dengan sebutan *Pikukuh tilu* yang menekankan kesadaran tinggi kodrat manusia (*cara ciri manusia*), dan kodrat kebangsaan (*cara ciri bangsa*), serta mengabdikan kepada yang seharusnya (*madep ka ratu raja*). Terdapat kunci untuk memahami konsep ajaran ini (*Pikukuh tilu*), yaitu Tuhan, manusia dan manusia sejati. Tuhan menurut aliran ini adalah diatas segala-galanya.⁷⁹

Pikukuh tilu atau *tri tangtu* merupakan konsep atau gagasan berpikir filosofis yang rasionalitasnya berguna dalam menjaga keselarasan hidup, baik secara vertikal maupun horizontal. Filosofi *tri tangtu* adalah, "tiga untuk ber-satu, satu untuk ber-tiga". Prinsipnya adalah "tiga hal" sebenarnya adalah "satu hal", begitupun sebaliknya. Bersifat paradoksal,

⁷⁷ Kushendrawati, Selu Margaretha. "Komunitas Agama Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan, Jawa Barat." (2012) : h.38-39

⁷⁸ Istilah Yang Maha Esa oleh ADS biasa di sebut dengan "Kang Sawiji-wiji"

⁷⁹ Yayasan Trimulya, *Pikukuh Adat Karuhun Urang*, pemaparan Budaya spiritual, Cigugur Kuningan, 2000, h.16

menyatu ke dalam dan mengembang ke luar. Dari luar nampak tenang, teguh, satu, akan tetapi di dalamnya aktif dengan berbagai macam aktivitas. *Tri tangtu* ini merupakan pakem atau “*kitab ahlak budaya*” sebagai dasar dalam berperilaku. Konsepnya meliputi tiga aspek berkehidupan, yaitu *tri tangtu dina raga* atau *salira*, *tri tangtu di buana*, dan *tri tangtu di nagara*. Masing-masing gagasan dan konsep berkehidupan tersebut memiliki pembagian, peranan, tatacara, serta pelaksanaannya masing-masing.

Konsep *tri tangtu dina raga*, adalah pakem atau tuntunan yang menyangkut pribadi sebagai manusia. Gagasan konsep ini senantiasa mengingatkan kita pada moralitas kehidupan atau akhlak budaya. Konsep ini pun menyadarkan kita tentang pentingnya “*hidup dalam berketuhanan*” dan “*hidup dalam berkemasyarakatan*”.

2. MENGENAL AGAMA LOKAL PARMALIM

A. Sejarah Berdiri

Agama local Parmalim berasal dari suku bangsa Batak Toba yang berada di selatan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Loguboti. Parmalim (*Ugamo* Malim) adalah penyebutan istilah “agama” untuk sistem kepercayaan ini. Kata *Ugamo* dalam bahasa Batak artinya hal-hal yang berkatitan dengan *Ngolu Portandin* (alam spiritual), yaitu hubungan manusia dengan alam ruh. Sementara itu para pengikut dari agama ini disebut Parugomo Malim atau biasa disingkat *Parmalim*⁸⁰. Istilah Parmalim terdiri dari kata *Par* dan *Malim*. Kata *Par* dalam bahasa Batak Toba adalah *prefiks* (awalan) aktif yang artinya orang yang mengerjakan atau menganut sesuatu. Sedangkan *Malim* adalah kata serapan dari bahasa arab yaitu *Alim* yang artinya orang yang berilmu atau memiliki ilmu agama⁸¹. Menurut penganutnya, parmalmim berarti orang yang mengikuti tuntunan ajaran kesucian⁸² *Ugamo* Malim memiliki kepercayaan untuk menyembah *Debata Mulajadi Nabolon* (Tuhan Yang Maha Esa) sebagai tuhan mereka yang menciptakan alam semesta dan roh nenek moyang orang Batak Toba⁸³.

Jauh sebelum masa pendudukan Belanda, tanah Batak sudah didatangi oleh misionaris Eropa, yaitu zending Jerman Rheinesche Mission Gessellschaft (RMG). Kedatangan misionaris Eropa tersebut dilatarbelakangi oleh misi penginjilan atau

⁸⁰ Gultom, Ibrahim. 2010. Agama Malim Di Tanah Batak. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 198

⁸¹ Lihat H. M. Lange, *Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger Ter Westkust Van Sumatra (1819- 1845)*. (Hertogenbosch: Gebroeders Muller, 1852), P. 16.

⁸² Wawancara dengan Jaya Damanik, Kepala Bidang Pendidikan Ulun Pungan Parmalim. Wawancara dilakukan tanggal 5 Desember 2022 di Balige, Toba, Sumatera Utara

⁸³ Gultom, Ibrahim. 2010. Agama Malim Di Tanah Batak. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 124-126

menyebarkan agama kristen dengan kitab injil.⁸⁴ Namun ternyata sebelum kedatangan misionaris Eropa, ajaran Islam telah lebih dulu menyentuh tanah Batak. Islam hadir dibawa oleh pasukan perang Padri dibawah pimpinan Tuanku Rao sekitar awal tahun 1800-an.⁸⁵ Selain itu masyarakat tanah Batak dahulu juga banyak yang menganut paganisme, animisme, dan dinamisme. Sehingga seluruh kehidupan pribadi dan sosialnya pada dasarnya banyak diresapi dengan nilai-nilai agama. Hampir seluruh lingkaran kehidupan masyarakat Batak kuno selalu diiringi oleh motif religius dan konsep supranatural.⁸⁶

Kaitannya dengan pengaruh agama-agama lain pada ajaran Parmalim, Tichelman menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena adanya kontak kebudayaan sehingga menghasilkan produk religi “sinkretis”.⁸⁷ Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya beberapa elemen Katolik dalam ugamo Malim, seperti “Jahowa” (Jehovah, nama Tuhan dalam ajaran Katolik), “Maria, Yesus”, dan nama-nama orang suci lain dalam ajaran Katolik. Pengaruh Islam juga terdapat di dalam ajaran tersebut, seperti “parmalim” yang berasal dari kata “malim”, yang dalam bahasa Melayu “malim” artinya “ahli dalam pengetahuan agama” (dalam bahasa Arab “muallim”). Bereda dengan Tichelman, interpretasi Horsting⁸⁸ terhadap historiografi religi Parmalim memiliki perspektif tersendiri. Menurutnya religi Parmalim merupakan percampuran (blend) dari ajaran Jahudi, Katolik, Islam dan ajaran Sipelebegu. Tuhan mereka adalah Jehovah yang mengirim/menghadirkan Sisingamangaraja untuk menggantikan diri-Nya. Setelah kematiannya, para pengikut Parmalim percaya bahwa jiwanya mendapat tempat “di sisi tangan kanan dari Jahowa”

Ugamo Malin secara kelembagaan diakui secara formal pada awal tahun 1900-an, tak lama setelah kematian Sisingamangaraja XII diumumkan Belanda. Eksistensi Ugamo Malim meningkat ketika kemunculan Raja Nasiakbagi yang diyakini masyarakat tanah Batak sebagai titisan Sisingamangaraja. Raja Nasiakbagi, melalui raja mulia Naipospos merupakan orang yang mencetuskan untuk melembagakan Ugamo Malim. Kalimat seruan yang terkenal dari Raja Nasiakbagi kepada murid-muridnya untuk menganut Ugamo Malim yaitu, “*Malim ma hamu*” (malimlah kalian).⁸⁹

⁸⁴ Schreiner, Lothar. 2003. Adat Dan Injil: Perjumpaan Adat Dengan Iman Kristen Di Tanah Batak. Jakarta: Gunung Mulia. Hlm. 22.

⁸⁵ Hadler, Jeffrey. 2010. Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, Dan Kolonialisme Di Minangkabau.

⁸⁶ J. C. Vargouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), h. 79.

⁸⁷ Tichelman, „De Bataksche Sekte Der Parmalims...”, H. 27-8

⁸⁸ Horsting, „Een En Under Over De Parmalims...”, H. 163-4.

⁸⁹ Katimin, Pertumbuhan Dan Perkembangan Parmalim Di Sumatera Tahun 1885-Sekarang, Vol.1.Analytica Islamica. 2012. Hlm.203

Peristiwa kematian Sisingamangaraja XII akibat tembakan Belanda, banyak tidak dipercaya oleh penganut Parmalim. Keberadaan Nasiakbagi yang menuntun Raja Mulia Naipospos mencetuskan peristiwa yang disebut Marhamalimon menandai era baru bagi Parmalim. Era baru ini, Parmalim mencetuskan perubahan pusat peribadatan, berbagai ritual yang rutin dilakukan, sekaligus pengorganisasian Parmalim. Era Marhamalimon ini diyakini para penganut Parmalim untuk sebagai titah Mulajadi Nabolon, untuk merespon tantangan zaman. Tantangan paling utama adalah penjajahan Belanda dan missionaris Kristen yang sering disebut sebagai proyek zending.⁹⁰

Secara singkat, pembagian era Parmalim terbagi kedalam:

1. Era Raja Udi. Ini adalah era pertama, dimana Raja Udi menjadi pemimpin wilayah dan pemimpin iman sekaligus. Raja udi diutus Mulajadi Nabolon untuk memberikan ketentraman. Pada masa ini, masyarakat Batak diyakini mendapatkan kehidupan yang damai dan tentram. Namun, seiring berjalannya waktu, karena banyak masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai luhur, maka diutus kembali pada era sesudahnya;
2. Era Simarimanbulubosi. Raja Simarimanbulubosi tidak memimpin wilayah, hanya memimpin iman. Pada era ini, masyarakat kembali memegang nilai-nilai luhur masyarakat batak, mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Namun, seiring berjalannya waktu, karena banyak masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai luhur, maka diutus kembali pada era sesudahnya;
3. Era Sisingamangaraja I-XII. Raja Sisingamangaraja I-XII merupakan pemimpin wilayah dan iman sekaligus. Masyarakat Kembali mendapatkan kedamaian dan ketentraman dibawah kepemimpinan Sisingamangaraja. Namun, seiring berjalannya waktu, karena banyak masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai luhur maka datanglah penjajah, merusak tatanan nilai dan budaya Batak, sekaligus penyebaran agama Kristen (Zending). Nilai dan budaya Batak habis, yang tersisa adalah Parmalim yang gigih menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan budaya Batak tersebut. Maka, Mulajadi Nabolon Kembali mengutus pada era sesudahnya.
4. Era Rajamulia Naipospos. Sebetulnya, raja mulia Naipospos merupakan salah satu pemimpin cabang (Parbaringin). Namun, karena penembakan Belanda terhadap Raja Sisingamangaraja, melalui Nasiakbagi yang dipercaya sebagai titisan Sisingamangaraja, Raja Mulia Naipospos melanjutkan kepemimpinan Parmalim. Pada

⁹⁰ Wawancara dengan Raja Monang, pemimpin tinggi Parmalim yang diberi gelar Ihutan, 6 Desember 2022 di rumahnya.

era ini, dibuat berbagai strategi untuk menghadapi berbagai tekanan Belanda dan Zendingnya. Maka mulailah era yang disebut sebagai Marhamalimon⁹¹.

Pada tahun 1921 kelembagaan Ugamo malim diakui secara legal dan formal bersamaan dengan dikeluarkannya Controleur van Toba. Setelah itu Raja Mulia Naipospos mendapatkan titah dari Sisingamangaraja XII untuk mendirikan *Bale Pasogitt* (pusat peribadatan dan spritualitas masyarakat Batak pada masa itu) untuk menggantikan *Bale Pasogitt* di Huta Bakkara yang telah hancur terbakar ketika perang toba. Sejak saat itu Hutatinggi menjadi kiblat atau pusat peribadatan umat Parmalim. Raja Mulia Naipospos dinobatkan sebagai pemimpin ugamo Malim pada waktu itu. Namun sebelumnya Raja Mulia Naipospos adalah seorang Raja Parbaringin bius Laguboti. Berkat semangat dan tekadnya yang kuat dalam melawan misionaris Belanda, ugamo Malim dapat eksis hingga kini.

Umat ugamo malim tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Toba-Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten, Labuhanbatu, kota Medan, Batam, Pekanbaru, Duri, hingga sampai ke pulau Jawa, Kalimantan, dan Irian Jaya. Sebagian besar umat Parmalim tinggal di desa Hutatinggi, dan paling tidak dua kali dalam setahun mereka mengunjungi Hutatinggi pada saat upacara besar tahunan (Sipaha Sada dan Sipaha Lima).

Walaupun desa Hutatinggi kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dianggap sebagai kiblat umat Parmalim, namun di beberapa wilayah terdapat sekte-sekte yang menamakan diri sebagai Parmalim. Seperti Kecamatan Pintupohan Meranti Tobasa, Tanah Datar Asahan, Jangga Tobasa, Onanganjang - Humbahas, Panamparan Tobasamosir, dan lain-lain. Pada tahun 1995 salah satu sekte Parmalim yang mengorganisir Golongan Siraja Batak dan ikut pemilihan umum, namun hal tersebut gagal. Golongan ini pada tahun 1980-an menyebut dirinya sebagai Malim Marsada. Selain itu ada yang secara politisi mengorganisir PAMBI/PABBI (Persatuan Agama Malim Batak Indonesia) juga mengikuti pemilu tahun 1995.

B. Ajaran Pokok

Tuhan yang disembah Parmalim disebut sebagai *Debata Mulajadi Nabolon*, yakni “Sang Pencipta” segala sesuatu. Umat *Parmalim* menafsirkan *Debata Mulajadi Nabolon* sebagai Tuhan Yang Esa. Tuhan yang Esa bagi Parmalim, memiliki titik persamaan dengan

⁹¹ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

konsep ketuhanan agama mainstream, yakni Tuhan yang maha kuasa maha pengasih, tidak dapat diserupakan dengan apapun dst.⁹²

Dalam menyembah Mulajadi nabolon, Parmalim memiliki peribadatan khusus sebagai sarana untuk mendekati diri kepada-Nya. Contohnya seperti ibadah yang dilaksanakan di *Bale Pasogitt* yang dipimpin oleh Ihutan *Parmalim* atau *Ulu Punguan* (wakil dari *Ihutan*). Sebelum melakukan ibadah/upacara, seluruh umat *Parmalim* wajib berpakaian sopan dan diutamakan memakai baju adat Batak lengkap dengan kain sarung dan bersorban (*martali-tali*). Selain itu seluruh umat *Parmalim* wajib membersihkan diri dengan tidak melakukan perbuatan yang dianggap najis sebelum ibadah dimulai. Setiap pelaksanaan ibadah umat *Parmalim* di *Bale Pasogitt* selalu menggunakan *Pelean* atau sesaji, yang berupa persembahan *Daupa* (dupa) dan *Pangurason* (pensucian).⁹³ Namun penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan ibadah yang dikerjakan. Kecuali *Daupa* dan *Pangurason* yang selalu menjadi *pelean* utama dalam segala ritual peribadatan.

Kepercayaan ugamo Malim memahami keberadaan 3 alam, antara lain adalah Banua Ginjang (alam Debata), Banua Tonga, (alam tengah yang dihuni Manusia) dan Banua Toru (alam setelah Kematian). Banua Ginjang diartikan sebagai Dunia Atas, sementara Banua Tonga berarti Dunia Tengah dan Banua Toru diartikan sebagai Dunia Bawah. Secara umum, segala praktik peribadatan dalam *Ugamo* Malim diatur dalam “Aturan Ni Ugamo Malim”. Berikut tujuh ritual utama dan satu ritual tambahan dalam *Ugamo* Malin:

- a. *Mararisabtu*, merupakan ritual peribadatan umat Parmalim yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10.30 (waktu Toba Samosir) dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh *Debata Mulajadi Nabolon*. Ibadah ini diselenggarakan di *Bale Partonggoan* atau tempat ibadah umat Parmalim. *Mararisabtu* bersifat wajib bagi seluruh umat Parmalim, sehingga seluruh pengikut *Ugamo* Malim wajib hadir di *Bale Partonggoan* ketika ritual ini dilaksanakan.
- b. *Mangan Napaet*, berasal dari bahasa Batak yang memiliki arti “makan makanan pahit”. Dalam *Ugamo* Malim *mangan napaet* merupakan ritual peribadatan untuk pengakuan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ritual ibadah ini dilaksanakan pada siang hari dengan makan makanan pahit secara bersama-sama, seperti biji anggir-anggir, daun papaya dan lain-lain. Selanjutnya menahan diri untuk tidak makan dan minum (puasa) serta

⁹² Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

⁹³ Suharyanto, Agung. Pusat Aktivitas Ritual Ugamo Malim Di Huta Tinggi Laguboti Toba Samosir. Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma). Vol. 4 No. 2. (Desember, 2016).

merokok selama 24 jam penuh. Puasa tersebut akan berakhir keesokan harinya ketika posisi matahari tepat diatas kepala atau sekitar pukul 12 siang. Sebagai penanda waktu puasa berakhir seluruh umat Parmalim kembali berkumpul dan makan bersama. *Mangan Napaet* biasa dilaksanakan sehari sebelum peralihan tahun baru dalam penanggalan ugamo Malim.

- c. *Sipaha Sada*, merupakan ritual peribadatan umat Parmalim yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran tuhan Simarumbulubosi. Ritual ini dilaksanakan pada awal tahun di bulan pertama hari kedua (*ari suma*) dan ketiga (*ari anggara*) berdasarkan kalender Batak. Ritual peringatan hari kelahiran tuhan *Simarumbulubosi* ini diselenggarakan di *Bale Pasogitt Hutatinggi* selama dua hari berturut-turut. Umat Parmalim yang mengikuti ritual ini wajib mengenakan pakaian adat Batak. Pakaian yang dikenakan laki-laki adalah *ulos* dan kain putih yang dililitkan dikepala. Sedangkan untuk perempuan mengenakan kebaya dan *ulos*. Seperti ritual pada umumnya, *Sipaha Sada* juga menggunakan berbagai *Pelean* atau sesaji. Prosesi ritual ini dipimpin oleh seorang imam yang memanjatkan *tonggo-tonggo* atau doa ritus dengan iringan instrumen musik Batak yaitu gondang hasapi.
- d. *Sipaha Lima*, merupakan tradisi dalam *Ugamo Malim* yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dan nikmat yang telah diberikan oleh *Debata Mulajadi Nabolon* (Sang Pencipta). Tradisi tahunan ini dilaksanakan di bulan ke lima dalam perhitungan kalender Batak (*Parhalaan*). *Sipaha Lima*, diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 12 (*Boraspatinitangkup*), 13 (*Singkora Purasa*), dan tanggal 14 (*Samisarapurasa*). Persembahan utama pada tradisi ini adalah hasil panen pertama (*matumona*) umat Parmalim. Tradisi ini diselenggarakan di kompleks *Bale Pasogitt Hutatinggi* dan diikuti oleh seluruh umat Parmalim.
- e. *Martutuhaek*, merupakan tradisi penyambutan bayi sekaligus pemberian nama pada bayi yang baru lahir. Tradisi ini dilakukan di rumah umat Parmalim yang baru mendapat karunia kelahiran seorang anak. *Martutuhaek* dijadikan sebagai ibadah penyambutan roh atau Tondi, dengan pemahaman bahwa *Debata Mulajadi Nabolon* telah menurunkan ruhnya kepada setiap bayi yang baru lahir (Manusia). *Martutuhaek*, dilaksanakan pada hari ke 30 setelah kelahiran sang bayi.
- f. *Pasahat Tondi*, terdiri dari dua kata yaitu *Pasahat* dan *Tondi*. Dalam bahasa Batak *Pasahat* artinya “menyampaikan” dan *Tondi* berarti “Roh” orang yang telah meninggal. *Pasahat Tondi* dapat diartikan sebagai upacara pengantaran roh seorang manusia kepada Sang Pencipta *Debata Mulajadi Nabolon*. Apabila seorang manusia mati, maka hanya

- badannya saja yang mati. Sedangkan rohnya akan kembali kepada Tuhannya. Umat Parmalim biasa menyebutnya "*ngolu dohot hamatean huaso ni Debata*".
- g. *Pardebataan, atau Mardebata* merupakan ritual yang dilakukan secara mandiri oleh umat Parmalim. Ritual ini bertujuan meminta ampunan atau menebus dosa dan syukuran. Hal ini dilakukan jika seorang Parmalim melanggar aturan atau melakukan perbuatan menyimpang dan bisa mengancam status Ke-Parmaliman-nya. Secara khusus ritual ini merupakan penyembahan kepada Debata lewat dengan membuat Pelean atau sesaji serta diiringi oleh Gondang Sabangunan dan Gondang Hasapi.
- h. Mamasumasu, dalam bahasa Batak berarti "memberkati perkawinan". Upacara ini diselenggarakan di *Bale Pasogitt* atau *Bale Parsantian*. Upacara pemberkatan ini dipimpin oleh *Ihutan* atau *Ulu Punguan*. Adapaun ketentuan dari upacara ini adalah kedua mempelai pengantin berasal dari pengikut Parmalim. Apabila mempelai laki-laki bukan pengikut Parmalim, maka harus disahkan menjadi pengikut Parmalim terlebih dahulu. Namun sebaliknya, apabila mempelai wanita belum menjadi pengikut⁹⁴

Dimensi Etika dan Legal

Manusia sebagai makhluk tuhan sudah seharusnya berperilaku sesuai dengan tuntunannya. Dalam Ugamo Malim Tuhan Yang Maha Esa memberikan "penuntun kehidupan di Jalan Tuhan" yang berguna untuk mengatur bagaimana umat Parmalim berperilaku. Raja Nasiakbagi yang mengajarkan tuntunan tersebut mengatakan bahwa, sikap dan perilaku umat Parmalim itu bersumber dari Patik dan aturan ugamo Malim.

Terdapat ajaran ugamo Malim yang berbunyi: "*Ndang marimbar jolaa i di Debata*" atau jika dalam bahasa Indonesia artinya manusia itu sama dihadapan tuhan. "*Manang ise hamu nabonor di Hatangki*" yang artinya Barang siapa yang benar melaksanakan Sabdaku.

⁹⁴ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022; Agung Suharyanto. Makna Ritual Marari Sabtu Pada Ruas Ugamo Malim. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama. Vol. 2. No.1. 2019; Lamahu, Arafat Iskandar. *Ugamo Malim Dalam Diskursus Keagamaan Di Hutatinggi Kabupaten Toba Samosir*. Jurnal Sosiologi Agama. Vol. 14. No. 1. 2020; Wiflihani & Agung Suharyanto. *Upacara Sipaha Sada Pada Agama Parmalim Di Masyarakat Batak Toba Dalam Kajian Semiotika*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 3. No. 1. 2011; Mutia, Hanifah. Penggunaan Tanaman Aren Pada Upacara Sipaha Lima Masyarakat Parmalim. Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan. Vol. 4. No. 2. (Februari. 2018); Elena Simatupang & Flansius Tampubolon. Kearifan Lokal Ritual Marari Sabtu Pada Kepercayaan Parmalim Di Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Jurnal Basataka. Vol.5. No.1. (Juni. 2022)

Pada hakikatnya semua manusia sama dihadapan tuhan, namun yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya.

Ketakwaan manusia dalam ugamo Malim tidak hanya diukur dari seberapa rajin seorang umat menjalankan ibadahnya. Tetapi juga dilihat dari pengamalan Patik Ni Ugamo Malim dalam kehidupan sehari-harinya. Inti ajaran hidup dalam Ugamo Malim yaitu Marroha Hamalimon, Marngolu Hamalimon dohot Martondi Hamalimon. Ajaran ini dapat diuraikan menjadi lima sikap kehidupan, diantaranya:

- a. Malim Panghataion, dalam bahasa Batak panghataion berarti cara bicara. Maksudnya adalah menjaga ucapan agar tidak melanggar ajaran hukum Ugamo Malim.
- b. Malim Pamerengon, dalam bahasa Batak pamerengon berarti cara melihat. Maksudnya adalah semakin banyak yang dilihat, semakin banyak pula pengaruh penglihatan kepada yang melihat.
- c. Malim Parmanganon, dalam bahasa Batak parmanganon berarti cara makan. Maksudnya adalah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus berdasarkan Patik. Untuk itu diajarkan untuk membatasi diri (marsolam). Hasil dari jerih payah dari jalan kebenaran, itulah kenikmatan hakiki.
- d. Malim Parhundulon, dalam bahasa Batak parhundulon berarti posisi duduk. Maksudnya adalah saling menghormati antar umat, terutama dengan yang lebih tua atau dituakan.
- e. Malim Pardalanon, dalam bahasa Batak berarti gerak-gerik tubuh. Maksudnya adalah berjalan (pardalanon) harus fokus pada tujuan yang akan dicapai. Tidak boleh terpengaruh oleh keadaan sekitar yang membuat perjalanan kita terganggu atau tertunda. Bahkan terjerumus melakukan hal yang terlarang atau yang dinilai tabu⁹⁵.

3. MENGENAL AGAMA LOKAL SAPTA DARMA

A. SEJARAH BERDIRI

Salah satu aliran kepercayaan (agama local) lain yang ada di Indonesia adalah Sapta Dharma. Kata Sapta Dharma berasal dari bahasa Jawa, Sapta artinya tujuh dan Dharma artinya kewajiban. Sesuai dengan namanya, Sapta Dharma merupakan sistem kepercayaan yang memiliki 7 kewajiban suci. Kewajiban ini dilaksanakan pengikut Sapta Dharma untuk membangun kerohanian, budi luhur, dan berusaha membina kebahagiaan hidup di dunia dan

⁹⁵ Sitorus, Lenni. Nilai-Nilai Luhur Budaya Batak Toba: Studi Kasus Dalam Masyarakat Ugamo Malim. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. Vol. 1. No. 2. (Oktober. 2022).

akhirat. Aliran kepercayaan ini pertama kali muncul pada tahun 1952 di Pare, Kediri, Jawa Timur oleh Hardjosapuro.⁹⁶ Ajaran Sapta Dharma lambat laun menyebar hingga seluruh Indonesia terutama Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aliran Sapta Dharma muncul atas pengalaman spiritual pendirinya yaitu Hardjosapoeroe yang saat itu berprofesi sebagai tukang cukur dan memiliki usaha lain dibidang perdagangan. Pengalaman spiritual tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 1952, secara tiba-tiba seluruh badan beliau tergerak dengan sendirinya untuk sujud dihadapan Hyang Maha Kuasa. Pelaksanaan sujud itulah yang menjadi cikal bakal peribadatan warga Sapta Darma saat ini. Setelah itu pengalaman spiritualnya tersebut beliau ceritakan kepada teman-temannya. Pada awalnya teman-temannya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Hardjosapuro, namun tanpa diduga teman-temannya juga mengalami kejadian yang sama yaitu sujud dihadapan Hyang Maha Kuasa secara otomatis di luar kehendak. Semenjak itu tersiarlah kabar dari mulut kemulut kegaiban di kota Pare yang dialami oleh Hardjosapuro dan kawan-kawannya. Sejak saat itu pula, Hardjosapuro dikenal sebagai pemimpin aliran Sapta Dharma, beliau dikenal sebagai Bapak Panuntun Agung Sri Gutama.⁹⁷

Penganut aliran kepercayaan Sapta Dharma melaksanakan peribadatan di tempat yang mereka sebut “sanggar”.⁹⁸ Mereka beribadah dengan melakukan sujud menghadap ke arah timur. Sujud tersebut dilakukan paling tidak sebanyak satu kali dalam sehari. Sujud ke arah timur memiliki artian arah semua permulaan kehidupan terjadi. Kepercayaan Sapta Dharma menyembah Allah Hyang Maha Agung serta menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Konsep Tuhan dalam Sapta Dharma sederhana dan abstrak. Konsep ajaran Sapta Dharma mementingkan kehidupan di dunia dan mengabaikan kehidupan di akhirat. Penganut Sapta Dharma akan berusaha untuk membangun etika dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sapta Dharma telah berkembang di Jawa sejak tahun 1952. Namun di tanah Jawa sebelumnya telah banyak didominasi oleh berbagai aliran agama dan kepercayaan. Terdapat agama Hindu-Buddha, aliran animisme-dinamisme, tidak membuat ajaran ini tersingkir begitu saja. Bahkan agama Sapta Dharma melebur dengan peradaban dan tradisi Jawa kuno, yakni tradisi magis-mistis dan Hindu-Buddha yang sangat mengagungkan leluhur atau dewa.

⁹⁶ Imam Budi Santoso, *Nasehat Orang Jawa* (Yogyakarta: Divapress, 2010), 149.

⁹⁷ Arini Sa'adah, *Pola Komunikasi Spiritual Dalam Praktik Sujud Aliran Kepercayaan Sumarah (Pendekatan Fenomenologi Paguyuban Sumarah Di Kabupaten Ponorogo)*. DiplomalAIN PONOROGO. 2019.

⁹⁸ Saraswati, Athaya & Afrilia Sekar Dewanti. Stereotip terhadap Aliran Penghayat Sapta Dharma dan Usaha Penganut Sapta Dharma mengatasinya melalui Konsep Diri. *Jurnal Audiens* Vol. 1, No. 1. (Maret, 2020)

Munculnya berbagai macam aliran kebatinan merupakan perwujudan kebangkitan kultural “orang Jawa abangan”. Jumlah aliran kebatinan yang cukup banyak, memunculkan beragam nama aliran kepercayaan. Berbagai macam nama kebatinan merupakan eksponen sinkretisme. Sebagai bentuk sinkretisme secara historis telah berakar di dalam masa yang sangat panjang dan telah diperkaya oleh berbagai unsur agama yang berbeda yang pernah masuk ke Indonesia yaitu Hindu Budha, Islam dan Kristen, sehingga corak aliran kebatinan itu pun bermacam-macam. Ada yang bercorak animisme, Hindu-Jawaan, ke-Islam-an, dan mistik.⁹⁹

Pada tataran normatif, aliran kebatinan bukanlah suatu bentuk agama, meskipun banyak mengadopsi ajaran-ajaran dari agama tertentu. Oleh sebagian penganut agama, aliran kebatinan dijadikan sebagai pelarian spiritual, pelarian yang dirasakan aman dan nyaman. Dari segi materi maupun ritualnya aliran kebatinan merupakan hasil olah pikir dan olah rasa para pengamalnya. Berbeda dengan ajaran agama yang bersumber dari wahyu Ilahi yang suci. Banyak aliran kebatinan mencampuradukan berbagai macam ajaran agama dalam satu wadah sehingga menumbuhkan kultus individu yang sangat kuat. Hal tersebut dibuktikan dari keanggotaan aliran kebatinan yang dapat diikuti oleh semua orang tanpa memandang agama yang dianut.

Nama kebatinan yang lebih dikenal pada tahun 1950-an sampai sekitar tahun 1960-an muncul dalam berbagai bentuk gerakan atau perguruan kebatinan. Masing-masing perguruan dipimpin oleh guru kebatinan yang mengajarkan ilmunya kepada pengikut-pengikutnya. Ilmu yang diajarkan pada umumnya menurut para guru diperoleh atas dasar wahyu atau wangsit dari Tuhan. Aliran kebatinan mempunyai motivasi dan tujuan berbeda bahkan beberapa menyatakan diri sebagai agama atau minta kepada pemerintah untuk diakui sebagai agama.¹⁰⁰

Pada tahun 1951, pendukung-pendukung aliran kebatinan yang berada dalam wadah organisasi-organisasi politik dan kebatinan yang dimotori oleh Mr. Wongsonegoro aktif mengorganisasi kebatinan dalam Panitia Penyelenggara Pertemuan dengan mendatangi berbagai sekte mistik dan mengajak untuk berorganisasi di bawah pengayomannya.

Pada tahun 1952, Departemen Agama mengeluarkan syarat minimum tentang agama yang memuat unsur-unsur penting antara lain: mempunyai nabi, kitab suci, dan ada pengakuan internasional. Definisi tersebut tidak menganggap aliran kebatinan sebagai ekspresi religius yang sah, bahkan menganggap kebatinan di luar hukum karena bagi kebatinan “Tuhan”

⁹⁹ Setyani, Turita Indah, Meniti Sinkretisme Teks Tantu Pangglaran, Kawistara, vol 1, no. 2 (August, 2011): 203-202

¹⁰⁰ Clifford Geertz.1960. The Religion of Java. London: CollierMacMillan Ltd. The Free Press of Glencoe.

mengungkapkan diri secara langsung dalam hati setiap orang tanpa melalui perantara-perantara baik itu berupa para nabi maupun kitab suci. Pada tahun 1953, Departemen Agama melaporkan adanya tiga ratus enam puluh agama baru atau kelompok kebatinan dan pada tahun 1954 Departemen Agama mendirikan Pakem (Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat) sebagai badan yang berwenang mengawasi agama-agama baru dan kelompok-kelompok kebatinan serta kegiatan-kegiatannya.¹⁰¹

Ajaran Sapta Darma semakin menyebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Semarang dan beberapa kota di Jawa Tengah. Pada tahun 1956 ajaran Sapta Dharma dipimpin oleh seseroang yang bernama Sri Gutomo. Kemudian pada tahun 1961 Sapta Dharma dipimpin oleh seorang mahasiswa Faluktas Hukum Universitas Gajah Mada yang bernama Sri Suwartini yang kemudian bergelar Sri Pawenang. Melalui kepemimpinan Sri Pawenang, Sapta Darma semakin berkembang pesat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga berkembang di luar Jawa seperti Palembang, Medan dan Samarinda.

Menurut Sri Pawenang, pendirian ajaran Sapta Darma pada tahun 1952 bukanlah hal yang kebetulan. Bangsa Indonesia pada saat itu memerlukan suatu pegangan hidup agar tidak sampai mengalami kemerosotan moral akibat pemberontakan yang timbul di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Munculnya Kerohanian Sapta Darma adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang ajarannya diwahyukan kepada Hardjo Sapuro. Dengan demikian, Bangsa Indonesia mempunyai cara untuk mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga bangsa Indonesia memperoleh tambahan penguat mental dalam menghadapi problematika pada saat itu.

Pengikut Sapta Darma mengalami kemunduran pada tahun 1965 disebabkan karena adanya Pemberontakan G-30- S/PKI. Pada masa ini masyarakat mulai masuk ke dalam agama-agama yang telah diakui oleh pemerintah, karena pada saat itu masyarakat yang tidak memeluk satu agama dianggap sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia). Walaupun demikian warga Sapta Darma di beberapa daerah masih ada yang tetap menjalankan kegiatan peribadatan di bawah tuntunan para penuntun Sapta Darma. Warga Sapta Darma pada saat itu mendapat pengawasan dari pihak kepolisian. Akan tetapi karena ajarannya dianggap tidak melenceng atau sesat, maka ajaran ini diberi izin dan dibiarkan berkembang. Namun setelah peristiwa G-30-S/PKI, harus dilakukan pendataan ulang bagi warga yang baru, misalnya tanda bersih diri, kartu tanda penduduk dan siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain.

¹⁰¹ Niels Mulder.1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa. Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia.

Seiring berjalannya waktu banyak terjadi perubahan baik jumlah pengikut Sapta Darma yang senantiasa selalu berubah-ubah maupun struktur keorganisasian dan kepengurusan warga Sapta Darma. Ajaran Kerohanian Sapta Darma memiliki pengikut yang sangat besar dan terorganisir dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ajaran Kerohanian Sapta Darma secara administratif dikelola sangat baik dengan manajemen yang rapi sehingga memiliki payung hukum yang legal dari pemerintah. Ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan Sapta Darma memberi keuntungan secara kuantitas perkembangan warga Sapta Darma. Terkait dengan itu, ada beberapa faktor yang menarik masyarakat untuk bergabung menjadi warga Sapta Darma:

1. Sebagian masyarakat di pulau Jawa khususnya yang mayoritas beragama Islam (abangan), Sapta Darma dipandang lebih sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa lokal dibandingkan dengan ajaran agama (Islam) yang menggunakan bahasa Arab.
2. Sapta Darma secara sekilas tidak memiliki bentuk-bentuk ritual dan peribadatan yang lebih rumit dan berat dibandingkan dengan ajaran agama yang lain, karena kebatinan kurang menekankan ibadah, namun lebih menekankan penghayatan Sapta Darma yang dianggap tidak menyita waktu.
3. Dibutuhkan pegangan hidup bagi orang-orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Mereka masuk ke dalam Sapta Darma untuk memperoleh ketenangan jiwa.
4. Berkembangnya warga Sapta Darma juga dipengaruhi adanya payung hukum (perlindungan) dari pemerintah terhadap penganut aliran kebatinan, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para warga Sapta Darma dalam beribadat.

B. AJARAN POKOK AGAMA LOKAL SAPTA DARMA

Kerohanian Sapta Darma tidak menginduk kepada agama besar yang ada Indonesia. Melainkan bercorak budaya lokal, yaitu budaya Jawa. Semua simbol, semboyan, ajaran, ritual, dan bacaan-bacaan dalam sujud dalam ajaran selalu identik dengan bahasa Jawa. Dalam ajaran Sapta Dharma terdapat visi misi sebagai berikut: Pertama. Menanam tebalnya kepercayaan, dengan menunjukkan bukti-bukti dan persaksian bahwa sesungguhnya Allah Hyang Maha Kuasa itu ada dan Esa. kedua, Melatih kesempurnaan sujud atau berbaktinya manusia kepada Hyang Maha Kuasa untuk mencapai budi luhur. ketiga, Mendidik manusia bertindak suci dan jujur, budi, pakerti yang menuju keluhuran dan keutamaan guan bekal hidupnya di dunia dan di alam langeng. keempat, Mengajar warganya untuk dapat mengatur hidupnya. kelima, Menjalankan wewarah tujuh dan Memberantas kepercayaan akan takhayul dalam segala bentuk dan macamnya.

Sapta Darma memiliki ajaran yang dilaksanakan oleh penganutnya, bentuk ajaran Sapta Darma adalah melakukan hening atau sujud yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat lima nama yang harus disebut dalam ritual ening yakni; Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adil, Allah Hyang Maha Wasesa (Penguasa Semesta) Dan Allah Hyang Maha Langgeng.¹⁰² Beribadah memerlukan perjuangan kepasrahan dan keikhlasan untuk istiqamah atau secara rutin. Teologi ibadah merupakan sebuah perencanaan atau persiapan yang akan dilaksanakan dan tujuan dari ibadah sendiri mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰³ Para penganut Sapta Darma menemukan pencapaian diri melalui ening atau sujud guna mendapatkan pencapaian spiritual yang baik sehingga tercipta kesejahteraan spiritualitas yang kokoh (spiritual well-being).¹⁰⁴

Ajaran Sapta Darma memprioritaskan ‘*hening*’ yakni, sujud dengan melafadzkan ‘*Sang Hyang Widhi Wasa*’ atau Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Rahim dan Allah Yang Maha Adil.¹⁰⁵ Kegiatan sujud dilakukan oleh penganut Sapta Darma sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan Hyang Maha Agung. Konsep Tuhan dalam Sapta Darma sederhana dan abstrak yakni, dengan mengedepankan konsep diri dengan perilaku yang suka menolong orang lain tanpa berharap imbalan (kebajikan)¹⁰⁶. Sapta Darma memfokuskan pada samadi untuk olah rasa dan olah raga melalui laku spiritual yakni, ritual sujud, racut dan ening.¹⁰⁷

Warga Sapta Darma sebuah semboyan yang berbunyi "*Ing ngendi bae, marang sapa bae warga Sapta Darma kudu suminar pindha baskara*" (bahasa Jawa). Dalam bahasa Indonesia berarti; di mana saja dan kepada siapa saja (baik seluruh makhluk hidup atau mati). Warga Sapta Darma haruslah senantiasa bersinar laksana surya. Makna dari semboyan ini adalah kewajiban bagi warganya untuk selalu bersikap tolong-menolong kepada semua manusia.

¹⁰² Andriawan Bagus Hantoro and Abraham Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 4, no. 02 (July 10, 2014): 54–73.

¹⁰³ Debora Nugrahenny Christimoty, "Teologi Ibadah dan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah: Sebuah Pengantar," *Pasca: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 1 (November, 2019): 1– 7.

¹⁰⁴ Chirico Francesco, "Spiritual Well-Being In 21st Century: It Is Time to Review the Current WHO's Health Definition" *Journal of Health and Social Science* 1, no. 1 (March, 2016): 11-16.

¹⁰⁵ Reni Tiyu Wijayanti, "Pola Perilaku Religius Aliran Kepercayaan Masyarakat Kerokhanian Sapta Darma di Desa Brengkelan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo," *Aditya - Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa* 3, no. 3 (October, 2013): 52–57.

¹⁰⁶ Athaya Saraswati and Afrilia Sekar Dewanti, "Stereotip terhadap Aliran Penghayat Sapta Dharma dan Usaha Penganut Sapta Dharma mengatasinya melalui Konsep Diri," *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (March 11, 2020): 58–64.

¹⁰⁷ 8Muh. Luthfi Anshori, "Laku Spiritual Penganut Ajaran Kerokhanian 'Sapta Darma' (Kasus Sanggar Candi Busono Kec. Kedung Mundu, Semarang)" (other, Universitas Negeri Semarang, 2013),

Ajaran Kerohanian Sapta Darma terbagi menjadi 3 pola dasar¹⁰⁸, yaitu:

1. Pertama, pola dasar ajaran yang terdiri dari ajaran tentang ketuhanan, ajaran tentang kemanusiaan, ajaran tentang Alam Semesta, dan ajaran tentang kesempurnaan hidup.
2. Ke dua, pola dasar penghayatan yang terdiri dari pedoman penghayatan, perilaku penghayatan, sujud penggalian, dan kelengkapan penghayatan.
3. Ketiga, pola dasar pengamalan budi luhur yang terdiri dari ajaran tentang budi luhur, usaha-usaha penanaman budi luhur, dan pengamalan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pola dasar ajaran-ajaran Sapta Darma tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa manusia hidup karena diberi hidup oleh Hyang Maha Kuasa berupa sinar cahaya Hyang Maha Kuasa yang menjadi getaran-getaran yang meliputi pribadi manusia. Segala sesuatu yang hidup diberi sinar cahaya Hyang Maha Kuasa dan tidak memakai perantara siapa saja. Oleh karena itu cahaya tersebut menjadi utusan Hyang Maha Kuasa dalam hubungan-Nya dengan manusia. Dalam kepercayaan aliran Sapta Darma ini, meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Esa serta memiliki 5 (lima) sifat mutlak, yaitu: Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng (abadi). Manusia yang diciptakan oleh Tuhan wajib menyelaraskan diri dengan sifat Tuhan, sebab kehendak Tuhan tersirat di dalam lima sifat tersebut. Barang siapa yang dapat menyelaraskan sikap dengan lima sifat Tuhan, maka manusia tersebut akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun alam kekal.

Kerohanian Sapta Darma bertujuan untuk kebahagiaan pengikut-pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat. Intisari dari ajaran ini adalah untuk membentuk pribadi manusia yang asli berdasarkan keluhuran budi, serta menjadikan penghayatnya memiliki sikap satria utama. Wewarah tujuh merupakan pedoman hidup yang harus dijalankan warga Sapta Darma. Isi dari Wewarah Tujuh adalah:

1. Setia kepada Allah Hyang; Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng;
2. Dengan jujur dan suci hati melaksanakan perundang-undangan negaranya;
3. Turut serta menyingsingkan lengan baju demi mempertahankan nusa dan bangsanya;
4. Bersikap suka menolong kepada siapa saja tanpa mengharapkan balasan apapun, melainkan hanya berdasarkan pada rasa cinta dan kasih;
5. Berani hidup berdasarkan pada kepercayaan atas kekuatan diri sendiri;

¹⁰⁸ 5Reni Tiyu Wijayanti, "Pola Perilaku Religius Aliran Kepercayaan Masyarakat Kerokhanian Sapta Darma di Desa Brengkelan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo," Aditya - Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa 3, no. 3 (October 28, 2013): 52–57.

6. Sikap dalam hidup bermasyarakat selalu bersikap kekeluargaan yang senantiasa memperhatikan kesusilaan serta halusnya budi pekerti;
7. Meyakini bahwa keadaan dunia itu tidak abadi dan selalu berubah-ubah (anyakra manggilingan - Jawa), sehingga sikap warga dalam hidup bermasyarakat tidak boleh bersifat statis dogmatis, tetapi harus selalu penuh dinamika.

Dalam Sapta Darma, ritus yang digunakan oleh umatnya untuk mencapai kelepaan ialah dengan bersujud dan mengamalkan Wewarah pitu (tujuh petuah). Sikap yang harus diperhatikan dalam sujud antara lain: Orang harus duduk bersila, dan menghadap ke timur, sedangkan tangan harus bersedekap sedemikian rupa, hingga tangan kanan terletak pada tangan kiri. Mata diarahkan ke bawah, memandang tajam ke satu titik di hadapannya pada jarak satu meter. Duduk harus tegak lurus, bersikap tenang, dan tidak memikirkan apa-apa. Kepala tidak boleh menggeleng ke kiri atau ke kanan, juga tidak menengadah ke atas atau menunduk ke bawah.

Tempat ibadah warga Sapta Darma disebut "Sanggar" dengan seorang Tuntunan yang ditunjuk sebagai pemimpin dan bertanggungjawab dalam membina spiritual warga di sanggar tersebut. Warga Sapta Darma mengenal dua nama sanggar yaitu "Sanggar Candi Sapto Renggo" dan "Sanggar Candi Busono". Sanggar Candi Sapto Renggo hanya ada satu di Yogyakarta, adalah pusat kegiatan Kerohanian Sapta Darma sedangkan Sanggar Candi Busono adalah sanggar yang tersebar di daerah-daerah. Sanggar yang berada di Yogyakarta ini sering kali dipakai oleh warga sekitar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya untuk kepentingan warga Sapta Darma namun juga untuk kepentingan warga sekitar seperti ulang tahun kemerdekaan dan pemilihan umum (kepala daerah, presiden), dan sebagainya.¹⁰⁹

Dalam Sapta Darma warga yang masuk dibedakan menjadi tiga, antara lain yaitu;

1. Warga yang beragama; yaitu orang yang sebelum masuk ke dalam ajaran Sapta Darma sudah mengenal dan menjalankan ajaran agama, misalnya sebelum masuk Sapta Darma orang tersebut beragama Islam, Kristen, Budha maupun Hindu, kemudian meninggalkan agamanya dan menjalankan ajaran Sapta Darma.
2. Warga yang beragama dan kepercayaan; yaitu orang yang masuk Sapta Darma, tetapi juga beragama. Jadi orang tersebut selain menjalankan agama, misalnya agama Islam ataupun kristen, juga menjalankan ajaran Sapta Darma.

¹⁰⁹ Perwira, Reza. Perkembangan Kerohanian Sapta Darma di Provinsi DI Yogyakarta. Academia https://www.academia.edu/44887832/Perkembangan_Kerohanian_Sapto_Dharmo_di_Provinsi_DI_Yogyakarta

3. Warga yang hanya mengenal kepercayaan, yaitu orang yang masuk Sapta Darma dan sebelumnya tidak pernah mengenal agama apapun. Jadi orang tersebut pada dasarnya hanya mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam Sapta Darma warga juga dibedakan lagi menurut keaktifan dalam peribadatannya. Pertama warga yang aktif yaitu warga Sapta Darma yang menjalankan sujud dan juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Sapta Darma. Warga Sapta Darma yang aktif biasanya dapat dilihat pada waktu perayaan hari besar Sapta Darma yang jatuh pada malam 1 Suro dalam penanggalan Jawa, atau malam 1 Hijriah dalam penanggalan Islam. Jumlah warga Sapta Darma yang aktif relatif lebih sedikit dibandingkan dengan warga yang tidak aktif. Hal tersebut disebabkan karena di dalam organisasi Sapta Darma setiap warganya tidak memiliki ikatan, keluar masuk menjadi warga Sapta Darma adalah suatu kebebasan. Di sisi lain masih banyak warga yang belum meninggalkan keyakinan agamanya sehingga lebih banyak menjadi partisipan Sapta Darma dan tidak sering melaksanakan sujud sebagai bagian ajaran Sapta Darma.

BAGIAN EMPAT

DISKRIMINASI PENDIDIKAN, PENDIDIKAN UNTUK BERTAHAN DAN GERAKAN SOSIAL BARU 3 AGAMA LOKAL DI INDONESIA

1. Bentuk Diskriminasi Pendidikan 3 Agama Lokal di Indonesia

A. Diskriminasi Pendidikan Agama Lokal Djawa Soenda

Sebagai salah satu kelompok minoritas, agama local ADS kerap mengalami diskriminasi. Tindakan diskriminatif terhadap komunitas ADS dilihat dari aspek historis dimulai pada tahun 1903 ketika para *adal* paguron Madrais melakukan perilaku negatif terhadap para pengikutnya yang ada di Tasikmalaya. Akibatnya Pemerintahan Belanda turun tangan dengan memenjarakan Madrais serta dibuang ke tanah Papua. Setelah peristiwa itu, setiap tindak tanduk komunitas diawasi sangat ketat oleh pemerintah Belanda sehingga paguron spiritual dan budaya itu tidak berkembang sama sekali, walaupun setelah pergantian kepemimpinan dari Madrais ke anaknya hubungan dengan Belanda makin mesra. Di internal umat Islam penolakan terhadap ADS juga bermunculan, karena dari aspek ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan keumuman ajaran Islam. Sejak saat itu, konflik antara ADS dengan para penganut agama Islam dimulai dan terus berlarut-larut sepanjang waktu.

Perubahan dinamika politik dari pemerintahan Belanda ke Jepang ikut memengaruhi eksistensi ADS, baik itu sisi ekonomi, agama, budaya dan lain-lain. ADS, yang dianggap sebagai kelompok keagamaan yang dekat dengan pemerintah kolonial, dipaksa untuk dibubarkan. Kedekatan itu sendiri dibuktikan dengan seringnya sejumlah pejabat colonial Belanda bertandang ke kediaman pemimpin ADS. Hal itu menyebabkan muncul dorongan dari kelompok Islam tertentu kepada Jepang agar ajaran tersebut dilarang karena secara umum dianggap sesat dan menyesatkan. Tahun 1944 ADS resmi dibubarkan dan Tedjabuana selaku pimpinan komunitas ADS beserta pengikut-pengikutnya beralih keyakinan menjadi seorang muslim. Walaupun kemudian kembali lagi kepada keyakinan lama sebagai penganut ADS.

Pada tahun 1950an para pemimpin ADS tengah mengusahakan pembangunan sebuah lembaga pendidikan guna memberantas kebodohan dan buta huruf masyarakat. Tindakan itu direspon negatif kelompok Islam konservatif dan menganggap bahwa itu bagian dari kedok tersembunyi komunitas ADS untuk memasukkan doktrin dan tradisi ADS ke dalam pikiran dan hati anak-anak yang tentu saja dapat mengancam eksistensi Islam di Cigugur. Konsekuensinya terjadi konflik yang berujung pada ditangkapnya sejumlah pemimpin komunitas spiritual dan budaya warisan Madrais, termasuk salah satunya adalah Djabatikusumah.

Pada tahun 1965 Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama. Berkat Undang-Undang ini muncul pemahaman di kalangan masyarakat bahwa negara hanya mengakui agama resmi yang sudah ditetapkan saja, sedangkan aliran keyakinan dan kepercayaan termasuk ADS bukan termasuk agama melainkan budaya dan pelaksanaannya yang bertentangan dengan agama resmi dianggap sebagai penodaan agama. Selanjutnya disusul dengan muncul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/4054 tanggal 18 November 1978 ini menentukan bahwa agama yang diakui pemerintah adalah: Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Budha; serta penulisan kolom agama ditulis (-) bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Kemudian Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang GBHN yang menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, dan pembinaannya tidak mengarah kepada agama baru¹¹⁰. UU digunakan oleh pemerintah sebagai dasar bahwa Negara hanya mengakui lima agama (masa Orde Baru) dan kemudian berkembang menjadi enam agama, setelah Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang pencabutan Inpres No.14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Cina.¹¹¹ Menurut Sutisna, Sesepeuh Adat Sunda ADS Cabang Garut pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran dilayani pemerintah. Akan tetapi, pada kolom Akte kelahiran hanya tertulis lahir dari seorang Ibu karena model dan konsep pernikahan komunitas ADS tidak diakui. Akibatnya, anak-anak yang lahir tersebut sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan bullying terutama di lingkungan sekolah.¹¹²

Pada tahun 2006 muncul UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 yang secara umum mengatur hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan disusul tahun 2013 UU No. 24 Tahun 2013 perubahan terhadap UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengharuskan pencatatan kependudukan melalui KTP elektronik dan KTP berlalu seumur hidup. Konsekuensi dari aturan-aturan ini, komunitas ADS banyak tidak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh Pemerintah. Kemudian, berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya

¹¹⁰ Sukirno, "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal.," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 232.

¹¹¹ Sukirno, *Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil* hal. 237.

¹¹² Wawancara Sutisna; Sesepeuh Komunitas ADS Cabang Garut, 29 Maret 2022

ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik. Dalam hal pekerjaan, di beberapa kasus penganut kepercayaan ini tidak dibenarkan berlibur pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut. Selain hal tersebut juga berkaitan dengan aspek pendidikan keagamaan yang diberikan tidak sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut.¹¹³

Diskriminasi bahkan intimidasi juga pernah dilakukan terhadap komunitas ADS lain, yakni WK. Waktu itu WK sekolah di SMK Benter, tapi sekarang sudah alumni. Dia disuruh pake kerudung, ditanya-tanya tentang agama ADS, bahkan diintimidasi untuk meninggalkan keyakinan ADS nya. Kemudian, setelah dilaporkan ke Paseban, Dewi Kanti mendatangi sekolah tersebut dan memberikan klarifikasi. Setelah itu masalah jadi selesai.¹¹⁴ Berbagai kasus diskriminasi bahkan intimidasi terhadap komunitas adat ADS seringkali dapat diatasi setelah dilakukan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Paseban (pusat kedudukan komunitas ADS di Cigugur, Kuningan).

Berdasarkan pengakuan Purnomo dan Agung, diskriminasi sering dia rasakan ketika masih SD. Berbagai Buliyan, ejekan dan lain-lain sering kami rasakan dengan ungkapan-ungkapan seperti kata “Kafir”, “Sesat”, “tidak sunat” dan lain-lain. Mungkin ketika usia SD, kami masih kecil, jadi banyak diantara warga komunitas mayoritas yang berani membuly. Tapi kondisi ini berbeda dengan masa SMA. Pada masa ini, teman-teman lebih menghargai kami. Paling yang saya kecewa itu adalah keengganan mereka tidak mau menjawab salam keberkatan dari saya, yakni ucapan “Sampurasun”, padahal saya selalu menjawab salam dari mereka.¹¹⁵

Menurut IP, salah seorang masyarakat adat yang kebetulan menjadi guru di SDN2 Cileleu, keberadaan ADS sebagai kaum minoritas, seringkali mendapat diskriminasi, termasuk pada aspek birokrasi. Menurut pengakuannya, pada tahun 2010, dia bersama beberapa komunitas ADS lain pernah dijanjikan untuk pencatatan surat nikah. Mereka juga diminta iuran 1 jt per KK, sekaligus syarat-syarat lainnya. Tapi menurut pengakuan IP, ternyata mereka dijebak harus bersedia menandatangani kesediaan masuk organisasi. Karena, syarat pencatatan nikah memang harus masuk menjadi organisasi. Setelah mengetahui ada syarat masuk ke organisasi, IT tidak bersedia melanjutkan upaya pencatatan pernikahan tersebut, karena masuk kedalam organisasi, berarti mengkhianati perjuangan dan komitmen dengan para pemimpin

¹¹³ Muchimah; Muh. Bachrul Ulum, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, hal. 55

¹¹⁴ Wawancara dengan Ati Sumiyati (komunitas ADS yang sekolah di SMK2 Kuningan). Wawancara dilakukan tanggal 5 April 2022 di Cigugur Kuningan.

¹¹⁵ Wawancara dengan Purnomo (komunitas ADS yang sekolah di PKBM Bina Cahya). Wawancara dilakukan tanggal 19 April 2022 di Cigugur Kuningan; Wawancara dengan Agung (komunitas ADS yang sekolah di SMP Yayasan Tri Mulya). Wawancara dilakukan tanggal 19 April 2022 di Cigugur Kuningan

adat. Jika masuk ke dalam organisasi, maka komunitas ADS akan masuk pada logika birokrasi, sehingga akan mengikuti aturan birokrasi, termasuk sewaktu-waktu bisa dibubarkan.¹¹⁶

Terkait dengan diskriminasi pada aspek pendidikan, menurut IP, komunitas ADS yang sekolah pada lembaga pendidikan formal tidak ada yang mendapat materi pelajaran agama ADS. Hal ini berbeda dengan SMP Tri Mulya yang memang merupakan lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh Paseban. Meskipun tidak ada sekolah yang memberikan layanan pendidikan agama ADS, namun ada beberapa sekolah yang memberikan ijin, untuk ujian pelajaran agama di serahkan kepada para tetua adat di Paseban, tapi banyak juga sekolah yang tidak memberikan ijin. Karena pihak sekolah tidak berkenan memberikan ijin inilah banyak siswa komunitas ADS yang mendapat pelajaran agama yang berbeda dengan keyakinannya.

IP mengaku, diskriminasi terhadap komunitas ADS dari aspek pendidikan juga pernah dialami anaknya. Anaknya yang pernah sekolah di SMK 2 Kuningan pernah mendapat diskriminasi berupa kewajiban menghadiri kegiatan keagamaan agama lain seperti Muludan, Kenaikan Isa Al-Masih dan seterusnya. Di kelas, anak saya dan teman-teman ADS dikurung di dalam kelas tidak boleh keluar. Namun, setelah kami berani protes, tindakan diskriminasi seperti ini tidak terjadi lagi.¹¹⁷

IP melanjutkan, bahwa meskipun ada aspek diskriminasi terkait pelajaran agama komunitas adat, namun jumlah kuantitas komunitas adat di wilayah Cigugur tidak menurun. Hal ini sangat berbeda dengan di daerah seperti yang terjadi di Tasik, Garut, Bandung, Cirebon Majalengka dan Ciamis. Mereka yang tidak kuat didiskriminasikan, akhirnya banyak yang mengikuti agama mainstream. Misalnya saja syarat untuk diterima pada pekerjaan tertentu harus mengikuti agama tertentu dan seterusnya. Penurunan misalnya terjadi, ada yang istrinya pindah agama, ada yang suaminya, ada yang anaknya dan seterusnya. Kalau di pusat (Cigugur) kuantitasnya tidak menurun bisa jadi karena keberadaan komunitas yang masih kuat untuk membangun kepercayaan diri komunitas¹¹⁸.

ADS meyakini, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Menurut Kanti, signifikansi pendidikan bagi ADS adalah untuk meneruskan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Mengingat pentingnya aspek pendidikan ini, pihak Paseban selaku pusat keberadaan ADS berinisiatif membangun yayasan pendidikan formal

¹¹⁶ Wawancara dengan IP (komunitas ADS yang menjadi guru di SDN2 Cileleu), Wawancara dilakukan tanggal 26 April 2022

¹¹⁷ Wawancara dengan IP (komunitas ADS yang menjadi guru di SDN2 Cileleu), Wawancara dilakukan tanggal 26 April 2022

¹¹⁸ Wawancara dengan IP (komunitas ADS yang menjadi guru di SDN2 Cileleu), Wawancara dilakukan tanggal 26 April 2022

bernama Yayasan Tri Mulya. Sekolah ini terletak di Paseban, di depan Gedung Tri Panca Tunggal. Pendidikan formal disini melayani pendidikan tingkat SMP. Selain itu, Yayasan ini juga membuka pendidikan untuk anak usia dini (PAUD). Tujuan dari pembukaan pendidikan ini adalah menyelamatkan generasi muda dengan membekali mereka dari aspek penguatan karakter dengan menjaga nilai-nilai hukum adat, berupa cara-ciri manusia dan cara-ciri Bangsa.¹¹⁹

Menurut Kanti, penanaman karakter yang dilakukan terhadap komunitas ADS tersebut lebih dititikberatkan pada pembentukan kualitas kesejatian manusia, bukan pada kuantitas. ADS tidak peduli berapapun jumlah komunitas yang setia. Yang sangat diperhatikan ADS adalah komunitas tersebut memegang teguh hukum adat, hukum keselarasan, keharmonian, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan melalui semangat ke-Tuhanan pada diri manusia. Melalui pembentukan kualitas ini, maka nilai-nilai luhur yang diwariskan dari para leluhur dapat dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dalam terminologi ADS, masyarakat adat harus mampu memegang teguh cara-ciri Bangsa dan cara-ciri manusia. Disamping dapat menghasilkan keselarasan, memegang nilai-nilai ini juga dapat meneguhkan jati diri dan kepribadian Bangsa. Hal ini disebabkan anggapan bahwa, meskipun kebenaran spiritual itu bersifat universal, tapi resonansi yang dimiliki manusia dalam menangkap energi dari sumber kebenaran itu berbeda-beda. Hal ini bergantung kepada iklim, suasana alam, daya gravitasi dan lain-lain. Misalnya saja, kultur masyarakat Nelayan yang lebih banyak menggantungkan nasibnya dari laut, akan sangat berbeda dengan kultur masyarakat pedalaman yang menggantungkan nasibnya dari kesuburan tanah. Menurut Kanti, perbedaan itu seharusnya untuk dirayakan, dan justru semakin mengukuhkan ke-Maha Besaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, diperlukan peneguhan identitas dan jatidiri Bangsa. ADS sangat peduli terhadap hal itu.¹²⁰

ADS sebenarnya mengakui, bahkan meyakini, bahwa perubahan termasuk perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Meskipun begitu, ADS berusaha agar perubahan sosial itu tidak menggerus identitas dan jati diri Bangsa. Makanya, ADS terus berupaya agar masyarakat adat terus memegang hukum adat berupa cara-ciri Bangsa dan cara-ciri manusia tersebut. ADS juga meyakini, bahwa modernitas tidak perlu dibatasi apalagi dihindari. Berbagai keragaman sekaligus dinamikanya di dunia ini tidak perlu dibatasi,

¹¹⁹ Wawancara dengan Dewi Kanti, putri pangeran Djati kusumah (pimpinan komunitas saat ini), Wawancara dilakukan tanggal 15 Maret 2022 di Paseban Cigugur, Kuningan

¹²⁰ Wawancara dengan Dewi Kanti, putri pangeran Djati kusumah (pimpinan komunitas saat ini), Wawancara dilakukan tanggal 15 Maret 2022 di Paseban Cigugur, Kuningan

termasuk kebebasan dalam menjalankan agama, termasuk perlakuan kita terhadap agama apapun juga tidak usah dibatasi. Meskipun tidak dibatasi, tapi ada nilai-nilai dasar yang bersifat universal yang harus menjadi pegangan, yakni nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini bisa dilakukan dengan tidak berhasrat merubah budaya lain, tapi juga harus menjaga budaya sendiri. Inilah yang terus diperjuangkan oleh ADS.¹²¹

Berdasarkan pengakuan AS, salah satu masyarakat ADS yang juga menjadi siswa di SMK2 Kuningan, pelajaran agama tentang ADS tidak didapatkan di sekolah, tapi di Paseban (pusat komunitas ADS). Disini, kami juga bertemu dengan banyak teman, sehingga ada perasaan percaya diri, ketika mengikuti kegiatan bulanan ini.¹²² Pelajaran agama di ADS dibagi kedalam 2 kategori. Yang pertama kategori umum, untuk siapa saja, semua usia, bahkan dihadiri oleh ADS yang berdomisili di Bandung, Cianjur, Tasik, Majalengka, Cirebon Indramayu. Untuk kategori umum ini dilakukan sebulan sekali, setiap hari minggu di awal bulan. Kategori kedua adalah khusus untuk siswa, atau usia remaja. Kategori kedua ini dilakukan seminggu sekali setiap malam minggu, dan satu semester sekali, setiap libur semester, biasanya dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Kegiatan per semester ini biasa disebut dengan Surasa.¹²³

Pentingnya menanamkan pendidikan untuk menjaga nilai-nilai luhur masyarakat adat yang sudah ditanamkan para leluhur dengan penekanan pada aspek kualitas ketimbang kuantitas sebagaimana disampaikan Kanti sangat beralasan. Hal ini dikarenakan tantangan menganut agama minoritas seperti ADS tidak ringan. Sebagaimana yang disampaikan IP, jika tidak kuat iman, seringkali masyarakat adat berpindah agama untuk menghindari diskriminasi yang terus-menerus mereka rasakan. Jika masih kuat pada dunia pendidikan, belum tentu mereka kuat di dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan bahkan seringkali menyaratkan pekerjaannya untuk menganut agama tertentu yang tentunya berasal dari agama mainstream, atau mayoritas. Menurut IP, pendidikan agama ADS pada keluarga yang tentunya dilakukan oleh orang tua, menjadi kunci kelestarian keberadaan ADS di dunia ini.¹²⁴

¹²¹ Wawancara dengan Dewi Kanti, putri pangeran Djati Kusumah (pimpinan komunitas saat ini), Wawancara dilakukan tanggal 15 Maret 2022 di Paseban Cigugur, Kuningan

¹²² Wawancara dengan AS (komunitas ADS yang sekolah di SMK2 Kuningan). Wawancara dilakukan tanggal 5 April 2022

¹²³ Wawancara dengan AS (komunitas ADS yang sekolah di SMK2 Kuningan). Wawancara dilakukan tanggal 5 April 2022; Wawancara dengan Purnomo (komunitas ADS yang sekolah di PKBM Bina Cahya), Wawancara dilakukan tanggal 19 April 2022

¹²⁴ Wawancara dengan IP (komunitas ADS yang menjadi guru di SDN2 Cileleu), Wawancara dilakukan tanggal 26 April 2022

B. Diskriminasi Pendidikan Agama Lokal Parmalim

Sebagaimana komunitas ADS dan kemungkinan agama lokal lainnya, Parmalim juga kerap mendapatkan diskriminasi. Sebetulnya, diskriminasi Parmalim juga tidak hanya terkait pendidikan, tapi juga terkait dengan berbagai layanan dalam kehidupan bernegara, sekaligus dalam praktek kehidupan sosial sehari-hari. Sebelum membahas lebih jauh diskriminasi pada bidang pendidikan, terlebih dahulu diuraikan sekilas diskriminasi terhadap Parmalim pada aspek diluar pendidikan.

Berdasarkan pengakuan Damanik, Sebelum UU Administrasi Kependudukan (Admindo) tahun 2006 terbit, komunitas Parmalim secara umum hanya memiliki 2 pilihan. Jika ingin memiliki KTP, maka harus memilih salah satu agama resmi yang diakui Negara. Jika tidak, maka mereka tidak bisa memiliki KTP¹²⁵. Bagi komunitas Parmalim, pilihan ini adalah pilihan yang sulit. Karena, jika tidak memiliki KTP, maka berbagai layanan sosial susah untuk diakses. Misalnya saja mendaftar sekolah, pekerjaan, mengakses berbagai bantuan pemerintah, dst. Di sisi lain, jika harus rela mencantumkan agama resmi di kolom KTP, maka itu bertentangan dengan hati nurani.

Menyiasati kondisi ini, banyak komunitas Parmalim yang terpaksa mencantumkan agama lain, khususnya Protestan. Ini dimaksudkan sebagai strategi, agar komunitas Parmalim dapat berkembang, mendapatkan pendidikan yang tinggi, sekaligus memperoleh posisi-posisi strategis di pemerintahan, seperti PNS dan lainnya. Meskipun demikian, keimanan dan perjuangan mereka terhadap kepercayaan Parmalim, khususnya kesetiaan terhadap nilai-nilai luhur tetap dijaga dan dipertahankan.¹²⁶

Selain itu, komunitas Parmalim juga kerap mendapat bully dari masyarakat yang menganut agama mainstream. Stigma sesat, kolot, penyembah berhala (dalam bahasa Batak lebih populer disebut sipelebegu), sering dirasakan komunitas Parmalim. Siregar, salah satu komunitas Parmalim berhasil menjadi pengawas sekolah menuturkan:

“Ketika saya diterima kerja pertamakali sebagai pengawas, saya harus melapor. Ketika melapor dan menyampaikan agama saya adalah Parmalim, pihak sekolah berkata: “Negara sudah semaju ini kok masih mempertahankan agama lokal yang tradisional?” Padahal, itu kan pertanyaan sensitive, karena terkait keyakinan. Setelah saya jawab dengan tegas, ini keyakinan saya pak, dia menjawab: “Ya sudah, kita lihat nanti, sejauhmana bisa bertahan”¹²⁷.

¹²⁵ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

¹²⁶ Wawancara dengan Raja Monag, 6 Desember 2022, wawancara dengan Marubat Sitorus, 5 Desember 2022

¹²⁷ Wawancara dengan Siregar, 5 salah satu komunitas Parmalim, 5 Desember 2022 di rumahnya

Di sekolah, Siregar juga mengaku sering ada candaan dari siswa atau teman kerja, bahwa larangan tidak memakan daging babi (sebagaimana ajaran Parmalim), merupakan sebuah kerugian. Karena, daging babi merupakan daging yang enak. Masyarakat Batak sendiri merupakan masyarakat yang secara umum menjadikan daging babi sebagai makanan sehari-hari. Bagi Siregar yang merasa sudah dewasa, candaan seperti ini tidak terlalu jadi masalah. Tapi, dia khawatir, jika dilakukan kepada anak-anak komunitas Parmalim. Menurut Siregar, anak-anak jiwanya masih labil. Terlebih lagi, berdasarkan pengakuannya, Ketika masih sekolah dulu, pernah “dipaksa” untuk mengikuti agama mayoritas.¹²⁸

Pada konteks pendidikan khususnya pendidikan agama, diskriminasi yang paling terasa adalah kesusahan komunitas Parmalim untuk mendapatkan materi pendidikan agama sesuai agama dan kepercayaannya sendiri. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, khususnya pasal 37 ayat 2, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat kurikulum agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Bahasa.

Bagi komunitas mayoritas, kewajiban pendidikan agama ini tidak ada masalah. Hal ini dikarenakan ketersediaan guru sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa mayoritas. Namun, bagi komunitas minoritas, apalagi agama lokal yang keberadaannya tidak diakui oleh Negara, kewajiban pendidikan agama malah menjadi dilema. Di satu sisi, kewajiban pendidikan agama menuntut siswa Parmalim untuk mengikuti pelajaran agama, di sisi lain, banyak lembaga pendidikan yang tidak mampu menyediakan guru sesuai dengan agama yang dianut. Konsekwensinya, siswa dari komunitas Parmalim, seringkali mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama mayoritas (mainstream).

Berdasarkan pengakuan beberapa komunitas Parmalim, sejak dulu, Ketika sekolah, mereka terpaksa mengikuti pelajaran agama Kristen, khususnya Protestan yang menjadi agama mayoritas.¹²⁹ Setelah terbit Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, komunitas agama lokal mendapat angin segar untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut di sekolah-sekolah. Namun, Permendikbud ini pada tataran praktis belum efektif diberlakukan di berbagai daerah, khususnya di Balige, tempat komunitas parmalmim paling banyak.

Berdasarkan pengakuan Sitorus, beberapa sekolah di Balige baik negeri maupun swasta cukup banyak yang belum bersedia memberikan layanan pendidikan agama bagi komunitas Parmalim. Berbagai lembaga pendidikan tersebut merupakan lembaga pendidikan unggulan

¹²⁸ Wawancara dengan Siregar, 5 salah satu komunitas Parmalim, 5 Desember 2022 di rumahnya

¹²⁹ Marubat Sitorus, 5 Desember 2022; Jaya Damanik, 5 Desember 2022, Erikson, 6 Desember 2022

yang menjadi incaran banyak siswa¹³⁰. Hal ini membuat komunitas Parmalim dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, mereka menginginkan Pendidikan unggul, yang diharapkan dapat memudahkan diterima pada jenjang Pendidikan lanjutan unggulan, di sisi lain, Pendidikan keagamaan Parmalim tidak tersedia, bahkan kadang “dipaksa” untuk mengikuti Pendidikan agama, dengan materi sesuai agama mainstream.

Meskipun sudah terbit Permendikbud No. 27 Tahun 2016, dimana pasal 4 menyatakan: “Pendidik memberikan pelajaran Pendidikan kepercayaan, sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik”, namun, implementasi dari aturan perundangan ini masih sulit dilakukan. Padahal, Balige, Toba Sumatera Utara adalah pusat komunitas Parmalim. Kemungkinan, di daerah lain, persoalan Pendidikan agama di sekolah formal lebih menyulitkan komunitas Parmalim. Hal ini mengingat anggota Parmalim banyak tersebar di berbagai daerah, seperti Meda, Batam, Jakarta dll¹³¹.

Beberapa kasus diskriminasi Pendidikan agama terkait layanan Pendidikan agama ini menimpa komunitas Parmalim. Menurut pengakuan Sitorus, anaknya tidak hanya diwajibkan mengikuti pelajaran agama mainstream, tapi juga pernah dipaksa mengikuti pelatihan natal¹³². Menurut pengakuan Damanik, anak-anaknya dari sejak SD hingga kuliah di perguruan tinggi harus mengikuti pelajaran agama Kristen¹³³. Menurut pengakuan Sihombing, Ketika mendapat tugas belajar di Bogor, anaknya ahrus pindah sekolah kesana. Surat pernyataan sebagai penghayat tidak di respon pada Lembaga Pendidikan di Bogor, konsekwensinya, pada mata pelajaran Pendidikan agama, anak saya harus memilih salah satu agama resmi. Konsekwensinya, pada Data Pokok kependidikan (Dapodik), agama anak saya juga harus mencantumkan agama resmi.¹³⁴ Berbagai kasus diskriminasi terkait layanan pendidikan agama ini bisa jadi penyebabnya karena ketidakterediaan guru agama local di berbagai sekolah tersebut. Jangankan guru agama local, guru agama mainstream yang siswanya menganut agama minoritas di sebuah daerah, bisa jadi tidak bisa mendapat layanan tersebut.

Menyiasati problem diatas, Permendikbud No. 27 Tahun 2016 pasal 3 sebetulnya menyatakan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan organisasi penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa”. Konsekwensinya, guru Pendidikan agama bagi penghayat bisa diserahkan kepada orang yang

¹³⁰ Wawancara dengan marubat sitorus. sekjen ulun pungan parmalmim. 5 Desember 2022

¹³¹ Wawancara dengan Raja Monang, 6 Desember 2022

¹³² Wawancara dengan Marubat Sitorus, 5 Desember 2022

¹³³ Wawancara dengan Jaya Damani, 5 Desember 2022

¹³⁴ Wawancara dengan Imelda Sihombing, 5 Desember 2022

dipercaya oleh komunitas agama local, untuk memberikan materi keagamaan, sekaligus memberikan penilaian. Diskriminasi Pendidikan agama yang banyak terjadi diatas, bisa jadi disebabkan karena ketidaktahuan pihak sekolah terhadap peraturan perundangan dimaksud. Menghadapi hal tersebut, Monang Naipospos, selaku pemimpin tertinggi komunitas Parmalim, mengaku rajin memberikan sosialisasi kepada berbagai pihak, khususnya sekolah terkait peraturan perundang-undangan terbaru¹³⁵.

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan satu anak Bernama Artha Greenary Sirait, siswa Parmalim yang gigih menolak pelajaran agama resmi (mainstream) di sekolahnya. Setiap pelajaran agama mainstream tersebut, dia selalu keluar¹³⁶. Orang tuanya yang memahami aturan Permendikbud No. 27 Tahun 2016 diatas menyiasati dengan meminta nilai pelajaran agama dari penghulu parmalmim (orang yang ditunjuk oleh komunitas Parmalim untuk memberikan materi pelajaran agama kepada siswa penghayat). Namun, masalah terjadi Ketika proses pencantuman nilai pada aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

Pihak penghulu dari Parmalim sebenarnya sudah memberikan nilai pelajaran Penghayat atas nama Artha Greenary Sirait kepada sekolah. Namun demikian, berdasarkan pengakuan wali murid, semua guru yang ada di sekolah tersebut belum ada satupun yang bersedia dipinjamkan namanya untuk meneruskan meng-upload nilai tersebut pada aplikasi Dapodik. Menurut Sihombing, wali murid Artha, jika tidak bersedia pinjam nama, konsekwensinya nilai raport anaknya menggunakan system manual. Caranya, seluruh nilai raport anaknya selain nilai Pendidikan agama di print, kemudian nilai Pendidikan agama di tulis tangan, setelah itu dihitung nilai rata-ratanya secara manual. Opsi ini pun belum diterima oleh pihak sekolah¹³⁷.

Kegigihan Artha dan orang tuanya Imelda Sihombing untuk menolak Pendidikan agama mainstream, sekaligus mendapatkan Pendidikan agama Parmalim sesuai kepercayaannya mendapatkan tantangan. Karena kegigihannya tersebut, alih-alih mendapatkan nilai raport sesuai agama yang dianut, menurut pengakuan Sihombing, dia malah mendapatkan ucapan yang kurang menyenangkan dari sekolah. Berikut petikan wawancaranya:

“Karena saya gigih memperjuangkan Pendidikan agama sekaligus nilai sesuai agama yang saya dan anak saya anut, pihak sekolah sampai ada yang berkata begini: “Sejak dulu, penghayat (baca: Parmalim), yang sekolah disini itu banyak, tapi tidak ada satu pun yang bermasalah seperti ini”. Padahal, saya merasa tidak mencari masalah. Saya hanya menuntut hak sesuai Undang-undang, bahwa anak saya berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya”.

¹³⁵ Wawancara dengan Monang Naipospos, 6 Desember 2022

¹³⁶ Wawancara dengan MP, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

¹³⁷ Wawancara dengan Sihombing, 5 Desember 2022

Menurut Sihombing, perjuangan menuntut hak yang dilakukannya tersebut dianggap menimbulkan masalah, bisa jadi karena sebelumnya tidak ada yang berani memperjuangkan hak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tersebut. Sihombing melanjutkan, bahwa bukti tidak ada yang berani ini bisa dilihat pada data Dapodik. Di Balige, komunitas Parmalim cukup banyak. Tapi, kenapa di data Dappodik, hampir tidak ada data siswa yang beragama penghayat (Parmalim). Sihombing melanjutkan, jika dibiarkan, maka data agama siswa anaknya, mulai dari SD hingga tingkat perguruan tinggi, akan terus-menerus tertulis agama mainstream tersebut. Ini bertentangan dengan nuraninya, karena lambat laun bisa mengancam keberadaan agama Parmalim, yang memperjuangkan lestarnya nilai-nilai luhur masyarakat Batak, sebagai warisan dari para leluhur¹³⁸.

Peneliti berkesempatan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak sekolah. Pihak sekolah mengakui, ada salah satu siswanya Bernama Artha Greenary Sirait yang menganut agama local Parmalim. Menurut pengakuan narasumber, Artha selalu keluar dari kelas Ketika pelajaran agama mainstream. Menurutnya, pihak sekolah menghargai keputusannya tersebut. Pergaulan Artha meskipun minoritas juga berbaur dengan teman-teman lainnya yang mayoritas menganut agama berbeda. Bahkan, prestasi Artha bagus, sehingga mengantarkannya untuk duduk di kelas unggulan. Meskipun begitu, menurut narasumber, untuk nilai raport pelajaran agama, hingga saat wawancara dilakukan, belum ada solusi. Padahal, sebelumnya, semua komunitas penghayat yang sekolah di situ tidak pernah mengalami kendala¹³⁹.

Kegigihan Artha dan orang tuanya Sihombing dalam memperjuangkan idealismenya memang bukan tanpa resiko. Sebagian komunitas Parmalim yang gigih menjaga idealisme dengan tidak bersedia dicantumkan sebagai penganut agama resmi, seringkali kehilangan kesempatan untuk berkiprah pada wilayah public. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada putra Damanik. Belum lama, putranya mendaftar pada sebuah lembaga pendidikan yang memiliki ikatan dinas dengan institusi penting di pemerintahan. Pada aplikasi pendaftaran tercantum pertanyaan agama. Sayangnya, yang tercantum 6 agama resmi. Karena putra Damanik tidak mau dicantumkan kedalam salah satu agama resmi tersebut, dia kehilangan kesempatan untuk mendaftar¹⁴⁰.

Menurut pengakuan beberapa komunitas Parmalim, menghadapi diskriminasi Pendidikan yang dialami, adasemacam consensus di tingkat komunitas, bahwa seluruh siswa

¹³⁸ Wawancara dengan Sihombing, 5 Desember 2022

¹³⁹ Wawancara dengan MP, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di salah satu sekolah Negeri tingkat SMP di Balige

¹⁴⁰ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

Parmalim harus berprestasi. Tidak hanya itu, sikap, tingkah laku, kedisiplinan dst juga harus dijaga. Keberadaan mereka harus menjadi contoh, sehingga secara otomatis kehadirannya diperhitungkan oleh lingkungannya. Dan, faktanya, hampir semua siswa dari komunitas Parmalim berprestasi, sekaligus menonjol di sekolahnya masing-masing¹⁴¹.

C. Diskriminasi Pendidikan Agama Lokal Sapta Darma

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, diskriminasi yang dialami Sapta Darma tidak sebesar yang dialami 2 agama lokal lainnya. Hal ini disebabkan prinsip universal agama yang dimiliki Sapta Darma. Melalui prinsip universal ini, Sapta Darma tidak melihat orang berdasarkan identitas, suku, warna kulit, kebangsaan dst. Siapapun itu, ketika mau melakukan ritual sujud (kepasrahan total pada Allah) sekaligus komitmen pada tuntunan dan kehendaknya, dia diakui sebagai warga Sapta Dharma. Tidak peduli apapun agamanya di KTP, apapun jenis kelamin, warna kulit, suku, kebangsaan dst. Salah satu bukti universalitas ini, di Surabaya, ada warga Sapta Darma yang terdiri dari Kyai (pemimpin agama Islam), pendeta (pemimpin agama Kristen), pemangku (pemimpin agama Hindu), dst. Pada kegiatan sehari-hari, mereka tetap menjalankan peran sosialnya sebagai pemimpin agama masing-masing. Tapi mereka mau melakukan sujud ala Sapta Darma¹⁴².

Berdasarkan pengakuan Warma salah satu warga Sapta Darma yang berasal dari Sindang Indramayu,, dirinya tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikuti agama Sapta Darma. Warma sendiri tidak merubah KTP yang identitas agamanya bertuliskan agama Islam. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya sendiri, ia memberikan kebebasan, apakah menjalankan ritual ala Sapta Darma, ala Islam, atau keduanya. Lebih dari itu, di masyarakat, Warma juga masih menjalankan ritual agama secara sosial seperti tahlil. Bahkan, di mushola, Warma juga pernah dipercaya menjadi imam sholat 5 waktu. Meskipun terlihat fleksibel, tapi Warma merupakan warga Sapta Darma, bahkan ditunjuk sebagai penuntun (pemimpin agama Sapta Darma) di daerahnya. Berdasarkan pengakuan Warma, warga di sekitarnya banyak yang mengetahui identitasnya sebagai warga Sapta Darma. Bahkan, sudah ratusan warga yang meminta berobat secara gratis kepadanya¹⁴³. Pengobatan gratis sendiri merupakan salah satu ciri khas Sapta Darma, khususnya bagi penuntun.

¹⁴¹ Wawancara dengan Sitorus, Siregar, Sihombing dan Damanik, 5 Desember 2022

¹⁴² Wawancara dengan Naen Suryono, Ketua Persada (Persatuan Sapta Darma) pusat. 20 Desember 2022 di Sanggar Pusat Sapta Darma Jogja

¹⁴³ Wawancara dengan Warma, Warga Sapta Darma sekaligus Penuntun wilayah Sindang Indramayu. 20 Desember 2022

Satu nafas dengan prinsip fleksibilitas, Sapta Darma khususnya pada tingkat daerah tidak mempersoalkan Pendidikan agama warganya yang harus mendapatkan Pendidikan agama mainstream. Meskipun begitu, setelah terbit keputusan Mahkamah Konstitusi No. 977 Tahun 2016 tentang kolom KTP penghayat, serta Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang layanan Pendidikan agama penghayat, Sapta Darma aktif Menyusun kurikulum penghayat (agama lokal), untuk Pendidikan agama warganya. Sejak saat itu, Sapta Darma cukup aktif melakukan sosialisasi perlunya Pendidikan agama Sapta Darma kepada warganya yang sudah terang-terangan menunjukkan identitasnya sebagai penganut agama local Sapta Darma (penghayat). Berdasarkan pengakuan Purnomo, sekolah-sekolah yang diberikan sosialisasi mayoritas memahami dan bisa diajak bekerjasama, setelah mengetahui aturan perundang-undangan.¹⁴⁴

Meskipun diskriminasi terhadap Sapta Darma relatif lebih sedikit, bukan berarti tidak ada sama sekali. Berdasarkan pengakuan Jaya, sanggar di daerahnya pernah dibakar oleh massa yang berasal dari agama mainstream.¹⁴⁵ Berdasarkan pengakuan Darpan, warga Telukagung Indramayu, meskipun sudah ada sanggar di daerahnya, tapi warga Sapta Darma dikucilkan karena stigma “sesat”¹⁴⁶. Selain itu, berdasarkan pengakuan ketua Persada pusat Naen Suryono, warga Sapta Darma, khususnya di daerah-daerah yang banyak komunitas keagamaan mainstream radikal, buliyan terhadap warganya masih dirasakan. Bahkan, meskipun sudah terbit keputusan MK Tahun 2016, tentang kolom KTP penghayat, buliyan masih tetap ada, meskipun kami lebih percaya diri menyikapinya¹⁴⁷.

Pada konteks pendidikan, diskriminasi utamanya pada pendidikan agama. Di satu sisi, berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pendidikan agama merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah. Di sisi lain, tidak semua sekolah memiliki guru yang seagama dengan agama siswa, apalagi memiliki jenjang Pendidikan S1. Konsekwensinya, siswa dari warga Sapta Darma seringkali menerima pelajaran agama mainstream. Meskipun begitu, warga Sapta Darma relatif tidak mempermasalahkannya. Kami seringkali menyampaikan kepada para siswa, bahwa pendidikan agama yang diterima itu sekedar sebagai pengetahuan. Tidak perlu diimani¹⁴⁸. Selanjutnya, Purnomo mengatakan:

“Meskipun sudah terbit Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang layanan Pendidikan agama penghayat, namun berbagai pranata sosial belum siap sepenuhnya. Kami Bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia membuat kurikulum Bersama untuk layanan Pendidikan agama penghayat dengan menyatukan nilai-nilai persamaan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bambang Purnomo, Sekretaris Persada Pusat, 19 Desember 2022

¹⁴⁵ Wawancara dengan Jaya, warga Sapta Darma Purbalingga

¹⁴⁶ Wawancara dengan Darpan, warga Telukagung Indramayu Jawa Barat

¹⁴⁷ Wawancara dengan Naen Suryono, 20 Desember 2022

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bambang Purnomo, 19 Desember 2022

diantara agama-agama penghayat. Namun, tetap saja tidak semua warga kami yang tersebar di banyak daerah dipastikan mendapat layanan Pendidikan sesuai dengan agama kami”.

Pasca terbitnya Permendikbud tersebut, pemerintah sebetulnya sudah memfasilitasi dengan memberikan Bimbingan Teknis kepada penyuluh (guru agama) Sapta Darma. Guru yang diberikan Bimtek tersebut mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja, sehingga resmi menjalankan profesi sebagai guru, khususnya untuk pelajaran agama penghayat. Meskipun begitu, tetap saja tidak bisa dipastikan seluruh warga Sapta Darma mendapatkan Pendidikan agama Sapta Darma di sekolahnya masing-masing. Hal ini karena tersebarnya warga Sapta Darma di berbagai daerah di Indonesia.¹⁴⁹

2. Pendidikan Nilai yang diajarkan dan dikembangkan untuk menjaga tradisi

A. Pendidikan Nilai Agama Lokal Djawa Soenda

Dewi Kanti selaku putri Pangeran Djatikusumah (pimpinan komunitas) mengatakan, bahwa kekhawatiran terbesar para tetua adat Sunda Wiwitan adalah pudarnya nilai-nilai adat masyarakat, atau meminjam istilah komunitas ini, pudarnya cara-ciri Bangsa. Padahal, nilai-nilai luhur masyarakat adat merupakan warisan terpenting bagi kehidupan, sekaligus menjadi jatidiri dan karakteristik Bangsa¹⁵⁰. Untuk memastikan terjaganya kelestarian nilai-nilai luhur ini, komunitas adat berinisiatif membangun sebuah lembaga pendidikan formal melalui yayasan bernama Tri Mulya. Lembaga pendidikan ini menyelenggarakan pendidikan formal di tingkat SMP. Pada perkembangannya, peserta didik dari lembaga ini tidak hanya berasal dari komunitas Sunda Wiwitan, tapi juga dari agama-agama mainstream di sekitar Cigugur.

Berdasarkan pengakuan Dewi Kanti, komunitas Sunda Wiwitan membuat Instagram serta website komunitas untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri komunitas, sekaligus memperkenalkan eksistensi mereka ke dunia luar. Melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut, komunitas Sunda Wiwitan juga mempublikasikan berbagai kegiatan adat berikut nilai-nilai yang ada di dalamnya seperti pupuh², tarian², dll.

Masing-masing komunitas memiliki nilai yang sebagai sesuatu yang dianggap penting, serta perlu dijaga dan dilestarikan. Nilai utama yang menjadi ruh untuk dijaga dan dilestarikan ADS adalah keharmonian dan keselarasan dengan alam. Secara spesifik, nilai utama yang diajarkan ADS terangkum dalam konsep *Pikukuh tilu* yang menekankan kesadaran tinggi

¹⁴⁹ Wawancara dengan Naen Suryono, 20 Desember 2022

¹⁵⁰ Wawancara dengan Dewi Kanti, Putri Pangeran Jati Kusumah di Paseban (pusat komunitas Sunda Wiwitan). Minggu, 15 Maret 2022

kodrat manusia (*cara ciri manusia*), dan kodrat kebangsaan (*cara ciri bangsa*), serta mengabdikan kepada yang seharusnya (*madep ka ratu raja*). Terdapat kunci untuk memahami konsep ajaran ini (*Pikukuh tilu*), yaitu Tuhan, manusia dan manusia sejati. Tuhan menurut aliran ini adalah di atas segala-galanya.¹⁵¹

B. Pendidikan Nilai Agama Lokal Parmalim

Raja Monang Naipospos, pemimpin tertinggi Parmalim yang diberi gelar Ihutan mengatakan, Pendidikan merupakan wahana strategis untuk merawat dan melestarikan Parmalim yang menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Batak.

Kepercayaan ugamo Malim sangat menjunjung tinggi adat dan budaya Batak Toba. Seorang penganut Parmalim selama hidupnya wajib mengikuti berbagai ritus dan upacara keagamaan ugamo Malim. Terdapat sembilan upacara keagamaan yang wajib diikuti oleh seluruh umat Parmalim, diantaranya Martutuaek (Kelahiran), Pasahat Tondi (Kematian), Mararisabtu (Peribadatan setiap hari Sabtu), Mardebata (Peribadatan atas niat seseorang), Mangan Mapaet (Peribadatan memohon penghapusan dosa), Sipaha Sada (Peribadatan hari memperingati kelahiran Tuhan Simarimbulubosi), Sipaha Lima (Peribadatan hari persembahan/korban), Mamasumasu (Pemberkatan perkawinan), Marpangir (Menyucikan diri dengan memakai buah jeruk purut)

Terdapat tiga ritus atau upacara yang pelaksanaannya wajib menggunakan gondang (jenis musik tradisional Batak Toba) serta diiringi dengan tari-tarian (*tortor*). Ritus atau upacara tersebut diantaranya Mardebata, Sipaha Sada dan Sipaha Lima. Tujuan penggunaan gondang dalam upacara tersebut adalah untuk mendapatkan kesakralan yang paripurna. Gondang juga dikenal sebagai identitas masyarakat Batak Toba sekaligus juga memiliki dimensi sosial dan spiritual.

Upacara keagamaan ugamo Malim yang lain adalah Marari Sabtu. Seperti namanya, marari sabtu dilaksanakan setiap hari sabtu. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan selama satu minggu dan juga sebagai sarana untuk membersihkan diri dari berbagai penyakit. Dalam upacara marari sabtu seluruh peserta wajib mengenakan pakaian adat Batak Toba. Kaum lak-laku mengenakan ulos Batak kain putih yang diikatkan di kepala. Sementara itu kaum perempuan mengenakan kebaya dan ulos serta sangul. Ulos tidak dapat dipisahkan dari setiap upacara dan kehidupan orang Batak

¹⁵¹ Yayasan Trimulya, *Pikukuh Adat Karuhun Urang*, pemaparan Budaya spiritual, Cigugur Kuningan, 2000, h.16

karena memiliki dimensi spiritual. Pada saat upacara berlangsung, posisi duduk laki-laki dan perempuan terpisah dimana laki-laki mengambil tempat di sebelah kanan dan perempuan disebelah kiri. Tujuan memisahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga kesucian mereka agar tidak berdosa serta mengarahkan umat untuk tetap fokus pada Tuhan yang disembah.

Pemakaian simbol dan berbagai ornamen adat dan budaya Batak Toba tidak hanya dalam upacara atau ritus, dalam bangunan peribadatan pormalim juga mengandung nuansa adat dan budaya Batak Toba. Pada atap bangunan peribadatan pormalim yang disebut dengan Bale Pasogit terdapat lambang tiga ekor ayam yang memiliki warna yang berbeda, yaitu hitam sebagai lambang kebenaran, putih lambang kesucian, dan merah sebagai lambang kekuatan dan kekuasaan. Ketiga warna ini merupakan warna dalam budaya Batak Toba yang juga diyakini sebagai tempat berdiamnya para dewata. Dalam upacara keagamaan, semua laki-laki diwajibkan memakai sorban dan sarung, sementara bagi perempuan memakai sarung dengan rambut di sanggul. Dalam setiap ibadah doa upacara pormalim selalu diiringi dengan iringan musik tradisional.

Umat Pormalim sangat menjaga adat dan budaya leluhur mereka. Selain itu, pola hidup pormalim sangat menekankan kesederhanaan. Nilai-nilai hidup mereka bersumber dari nilai-nilai adat dan budaya Batak Toba. Mereka sangat setia menjalankan tradisi adat Batak Toba. Pengikut pormalim tidak terpengaruh dengan budaya populer. Hal ini dimungkinkan karena Pormalim sangat memegang teguh adat dan kebudayaan lokal.

Kesetiaan dalam menjalankan ajaran menjadi salah satu kunci utama bagi pormalim dalam keberadaan dan eksistensi mereka untuk mempertahankan adat dan budaya Batak Toba dalam setiap ritus yang dijalankan oleh komunitas ini. Derasnya arus modernitas dan globalisasi yang membawa perubahan begitu cepat dalam segala lini tidak mampu mengubah tradisi dan kebiasaan yang dilakoni oleh para penganut agama Malim.

Budaya populer yang menjadi salah satu ciri dari modernitas dan globalisasi tidak mampu mereduksi nilai-nilai tradisional yang dihidupi oleh kelompok pormalim. Kesetiaan dan keteguhan para pormalim dalam menjalankan ritus, upacara dan juga nilai-nilai adat dan budaya menjadi senjata andalan untuk menangkal berbagai dampak yang dibawa oleh arus modernitas dan globalisasi. Sekalipun harus diakui bahwa dalam hal-hal lain, mereka juga dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi.

Umat Pormalim sangat menghidupi ajaran-ajaran agamanya. Salah satu contoh ajaran dalam agama malim yaitu tentang larangan mencuri. Kasus-kasus pencurian tidak akan ada dalam komunitas pormalim, bahkan ketika barang (harta benda) jatuh atau ketinggalan di kompleks atau lingkungan pormalim, bisa dipastikan barang tersebut akan kembali. Pormalim

sangat teguh menjunjung tinggi adat dan budaya Batak Toba, baik dalam ritual-ritual yang mereka jalankan, dalam perilaku hidup sehari-hari serta pada saat berinteraksi sosial dengan orang lain. Mereka tidak tergoda dengan budaya-budaya populer yang sedang berkembang pada masa kini.

Adat dan budaya telah menjadi cara hidup pormalim dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial. Selain itu juga adat dan budaya juga telah mendasar dan melebur dengan nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan Agama Malim sehingga sangat sulit untuk memisahkan adat dan agama karena sudah menyatu dengan kuat. Pola-pola beragama yang didominasi adat dan budaya dan juga telah menjadi bagian dari ritus menjadikan adat dan budaya menjadi sebuah patron yang kuat bagi kelompok pormalim. Menyatunya adat dan budaya dengan kepercayaan memiliki kekuatan yang sangat signifikan yang dapat membentengi para pengikutnya dari berbagai arus gelombang modernisasi dan globalisasi.

Untuk tetap eksis dalam ajaran agamanya, pormalim juga memelihara sentimen keagamaan. Teori sentimen keberagamaan pertama sekali dimunculkan oleh seorang ilmuwan dari Prancis yaitu Emile Durkheim¹⁵². Menurut teori sentimen keberagamaan ini, untuk mempertahankan kepercayaan tetap eksis maka sentimen kemasyarakatan dipelihara. Menurut pandangan teori ini bahwa agama itu muncul pertama sekali karena adanya suatu getaran jiwa dan emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai sesama warga masyarakat. Menurut Durkheim bahwa agama mampu menjaga eksistensinya juga disebabkan oleh faktor adanya sentimen kemasyarakatan. Agama tidak terlepas dari realitas sosial yang membentuknya, dalam hal ini pormalim memiliki realitas agama yang dibentuk keyakinan dan praktik-praktik keagamaan yang didominasi oleh adat dan budaya dalam ritus maupun upacara-upacara yang dilakukan. Ikatan dan perasaan setiap anggota dalam kelompok semakin diperkuat oleh relasi dan interaksi antar sesama.

C. Pendidikan Nilai Agama Lokal Sapta Darma

Nilai utama yang diajarkan Sapta Darma adalah kebermanfaatn hidup. Doktrin utama seseorang yang bergabung dengan Sapta Darma adalah: “ Ing Ngendi Wae, maring Sopo Wae, Warga Sapta Darma Kudu Suminar Pindho Baskoro/ Dimanapun, kepada siapapun, warga Sapta Darma harus bersinar laksana matahari”. Pengertian sederhananya, tujuan utama Sapta

¹⁵² Togua Rambe, “Ragam Ekspresi Beragama: Agama Dalam Perspektif Sosiologi.,” *Studia Sosia Religia* 4, no. 1 (2021): 2021.

Darma adalah memberi kebermanfaatannya seluas-luasnya kepada kehidupan¹⁵³. Inilah tujuan utama hidup yang disebut dengan Sesanti. Menurut Engkus:

Agama itu, seharusnya bisa dirasakan langsung manfaatnya dengan simple dan ringan. Tidak perlu ada debat apalagi konflik memperebutkan kebenaran. Masyarakat yang memilih bergabung dengan Sapta Darma, mayoritas karena merasakan langsung manfaatnya. Bukan karena diajak, dirayu secara berlebihan. Mayoritas, yang bergabung itu karena sakit, tidak mampu berobat ke dokter, akhirnya berobat ke penuntun (pimpinan sanggar) di sebuah daerah, kemudian sembuh. Setelah sembuh, melakukan ritual sujud dengan rutin, hatinya damai, kehidupannya membaik, akhirnya menjadi warga yang militant. Banyak warga Sapta Darma yang mengaku, kehidupannya terus membaik setelah bergabung dengan Sapta Darma. Kesehatan membaik, rizki dimudahkan, hidup damai, tentram dst. Setelah kehidupannya membaik, selanjutnya dia harus membantu siapapun agar kehidupan yang lain juga baik”¹⁵⁴.

Landasan untuk menebar manfaat Sapta Darma tertuang pada doktrin wewarah 7 dan simbol pribadi. Wewarah 7 merupakan arah pegangan warga Sapta Darma, yakni:

Wewarah Tujuh adalah:

1. Setia kepada Allah, yang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng;
2. Melaksanakan perundang-undangan negaranya dengan jujur dan suci hati;
3. Menyingsingkan lengan baju untuk mempertahankan nusa dan bangsanya;
4. Suka menolong kepada siapa saja tanpa mengharapkan balasan apapun, melainkan hanya berdasarkan pada rasa cinta dan kasih;
5. Berani hidup berdasarkan kepercayaan pada kekuatan diri sendiri;
6. Hidup bermasyarakat mengedepankan sikap kekeluargaan, senantiasa memperhatikan kesusilaan serta halusnya budi pekerti;
7. Meyakini dunia tidak abadi dan selalu berubah-ubah (anyakra manggilingan - Jawa). Sehingga warga Sapta Darma tidak boleh statis, dogmatis, tetapi harus dinamis¹⁵⁵.

Adapun simbol pribadi pada Sapta Darma diyakini berawal dari masa pendirinya Hardjosapoero dan 5 orang temannya. Setelah mendapat wahyu berupa ritual sujud, di tembok ruangan Hardjosapoero muncul berkali-kali sebuah gambar. Tidak hanya Hardjosapoero, 5 orang temannya pun melihat hal yang sama. Setelah digambar sama persis sesuai dengan gambar yang muncul, gambar (simbol) itu pun menghilang. Simbol itu menggambarkan jati diri kemanusiaan. Manusia terdiri dari 4 unsur, yang diwakili oleh 4 sudut pada gambar. Yakni

¹⁵³ Wawancara dengan Engkus, Penuntun Propinsi Jawa Barat, 20 Desember 2022

¹⁵⁴ Wawancara dengan Engkus, 20 Desember 2022

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bambang Purnomo, 19 Desember 2022

air suci ayah, air suci ibu, roh suci, dan saripati alam. Simbol pribadi juga menggambarkan unsur kehidupan, ada nafsu, budi, semuanya diolah manusia menuju kesejatan¹⁵⁶.

Dokumentasi Gambar Simbol Pribadi
Diambil dari <https://www.google.com>



Wewarah Tujuh sebagai pegangan warga Sapta Darma secara tidak langsung sudah menganjurkan kepada warganya untuk melakukan hubungan yang baik dengan semua lapisan seperti masyarakat, pemerintah, dan sesama warga Sapta Darma itu sendiri untuk saling menghormati, membantu, dan membina hubungan yang baik dengan berbagai aktivitas seperti kegiatan hari kemerdekaan, pemilu, kerja bakti, dan sebagainya.

Peranan warga Sapta Darma dalam kehidupan sosial dapat dilihat dari kepatuhan warga Sapta Darma terhadap isi wewarah tujuh yang ke enam yang berbunyi “sikap dalam masyarakat, kekeluargaan itu memiliki susila dan halus pekertinya. Warga Sapta Darma harus dapat bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, umur maupun kedudukan. Dengan pengertian bahwa dalam hidup bermasyarakat harus menjunjung moral, sopan santun dan rendah hati. Sebagian masyarakat merespon secara alami eksistensi ajaran ini karena tidak melihat indikasi negatif dari perkumpulan ajaran Kerohanian tersebut. Interaksi mereka dengan masyarakat sangat bagus dan kooperatif dalam kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat maupun kegiatan-kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di sisi lain, sebagian masyarakat setempat melihat ajaran ini hanya merupakan perkumpulan budaya dan kepercayaan.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Jarwanto, Sekretaris Persada Pusat, 19 Desember 2022

Wewarah 7 dan simbol pribadi yang menjadi landasan utama tujuan hidup (sesanti) untuk menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya cukup membantu warga Sapta Darma untuk diterima di masyarakat. Meskipun ada saja kasus pemberian stigma “sesat”, namun, secara umum, warga Sapta Darma yang minoritas, diterima oleh komunitas masyarakat mayoritas yang menganut agama mainstream. Berdasarkan pengakuan Gatot pensiunan salah satu kementerian, perbuatan sehari-hari kita yang sopan, suka menolong, akan membuat orang sekitar menaruh hormat, meskipun mengetahui identitas kita sebagai penghayat. Keterusterangan identitas kita sebagai penghayat, justru mengundang orang lain untuk mengetahui lebih dalam ajaran Sapta Darma¹⁵⁷. Selain Gatot, Purnomo juga mengaku memilih berterus terang dengan identitasnya. Masyarakat justru memilih dia sebagai ketua RW hingga 4 periode. Sederhananya, identitas sebagai penghayat bagi Purnomo, sama sekali tidak menghalangi keleluasaan peran sosial di masyarakat¹⁵⁸.

Selain itu, pada aspek Pendidikan, peran warga Sapta Darma juga dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diraih para siswa yang berasal dari keluarga Sapta Darma. Selain itu, mereka juga aktif mengikuti berbagai kegiatan positif di sekolahnya masing-masing¹⁵⁹.

Identitas diri pada penganut aliran kepercayaan Sapta Darma dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari yang meneladani Hardjosapoero. Identitas diri yang melekat pada penganut sapta darma, yakni:

Pertama, memiliki ketenangan jiwa. Hal seperti ini dirasakan kepada pengikut aliran Sapta Darma di dalam kehidupannya yang diajarkan kepada warganya untuk sekuat mungkin menenangkan jiwanya terutama pada sesuatu yang bersifat keduniawian. Karena dunia bersifat sementara dan tidak dibawa ke alam langgeng, dari situlah para warga dengan sungguh-sungguh memahami ajaran tersebut, karena ajaran dari aliran Sapta Darma ini mengarah kedalam ajaran budi pakerti sehingga terkontrol dalam masalah ketenangan khususnya jiwa. Ajaran Sapta Darma mempunyai dampak yang besar dalam jiwa pengikut aliran Sapta Darma, yakni membawa kebahagiaan, artinya memberikan pedoman dalam hidup untuk mencapai kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam proses hidup yang dijalani.

Kedua, memiliki keyakinan bahwa mereka mengajarkan sesuatu yang benar. Ajaran di dalam Sapta Darma pada umumnya mengajarkan pada hayune bahagianya artinya membimbing manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di alam dunia sampai di alam langgeng, dan ikut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Dengan cara setia tuhu

¹⁵⁷ Wawancara dengan Gatot, Litbang Persada Pusat. 20 Desember 2022

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bambang Purnomo, 19 Desember 2022

¹⁵⁹ Wawancara dengan Jarwanto, 19 Desember 2022

kepada Allah Hyang Maha Rokhim, Maha Agung, Maha Adil, Maha Wasesa Maha Langgeng, dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan perundang-undangan negaranya, turut serta, menegakan berdirinya nusa dan bangsa, menolong kepada siapa saja bila perlu tanpa mengharapkan sesuatu balasan melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih, berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri, sikapnya dalam hidup bermasyarakat kekeluargaan harus beradab serta memiliki budi pekerti yang dapat menjadi petunjuk jalan yang baik, yakin bahwa keadaan dunia itu tidak abadi melainkan selalu berubah-ubah.

Ketiga, memberikan ajaran toleransi. Hal tersebut menjadi identitas diri warga Sapta Dharma karena mereka memberikan keleluasaan terhadap apa yang diyakini, karena dalam ajaran mereka berbuat baik dan mengasihi adalah hal yang utama tanpa memandang apa yang mereka yakini. Selain identitas diri sifat utama yang dimiliki penganut aliran Sapta Dharma yang dapat dikatakan bersifat abstrak, terdapat identitas diri yang bersifat konkret, yakni warga penganut aliran kepercayaan Sapta Darma melakukan ibadah dengan cara sujud menghadap timur dan mereka menyebut tempat peribadahannya dengan sebutan “sanggar”. Selain itu setiap malam jumat wage, mereka melakukan ibadah rutin yang disebut ibadah jumat wage.

8. Gerakan sosial baru yang dilakukan untuk menjaga nilai dan tradisi

A. Gerakan Sosial baru Agama Lokal Djawa Soenda

Untuk menjaga, merawat serta mempertahankan nilai dan tradisi yang dianggap baik dan penting, berbagai Langkah dilakukan oleh ADS, diantaranya adalah:

1). Reorganisasi Baru, dari mulai ADS, PACKU, sampai AKUR

a). Agama Djawa Sunda (ADS)

Pada fase awal (periode Madrais), kepercayaan di Cigugur ini dipimpin oleh masa Kyai Madrais dan Pangeran Tedjabuana. Kepercayaan ini dikenal dengan nama Agama Djawa Sunda (ADS), dikarenakan dasar kepercayaannya banyak mengambil dari unsur kebudayaan Jawa (Cirebon) dan Sunda (Sunda Wiwitan). Madrais semula dibesarkan dalam tradisi Islam, yakni di sebuah pesantren yang ada di Cirebon.

Di samping belajar di pesantren Madrais juga belajar tentang tasawuf (mistisisme Islam), atau sisi batin dari ajaran Islam. Ditambah lagi, ketika remaja dia bekerja pada salah seorang pangeran Cirebon, yang menyayanginya. Dari Pangeran ini, Madrais menerima ajaran mistik Cirebon, yang biasa disebut dengan *ngelmu Cerbon*, *ngelmu Sejati*, atau *ngelmu hakikat*, yang mempelajari tentang hakekat *mikung*, yaitu suatu hakekat tentang *manunggaling kawula lan Gusti* (meleburnya hamba pada ciptaanNya). Dari pengembaraan mencari ilmu, yang dilakukan oleh Madrais, dari sejak di

pesantren Cirebon, mistisisme Islam, *Ngelmu Cerbon*, dan *Sunda Wiwitan* (petuah-petuah leluhur Sunda) yang diperoleh dari pengembaraannya di berbagai wilayah di Jawa Barat, akhirnya Kyai Madrais mendirikan Agama Djawa Sunda (ADS).

Fase kedua adalah periode Tedjabuana yang berlangsung antara tahun 1939-1976. Fase ini dimulai setelah Madrais meninggal tahun 1939 dan pimpinan ADS digantikan oleh anaknya, Tedjabuana. Dia memimpin sampai tahun 1976. Pada masa kepemimpinan pangeran Tedjabuana, ADS berkali-kali dilarang oleh negara, tapi tetap hidup lagi. Tahun 1944 dilarang oleh pemerintahan Jepang, setelah Jepang pergi kemudian tahun 1951 dideklarasikan lagi. Bahkan pada tahun 1955, pangeran Tedjabuana dan beberapa tokoh aliran kepercayaan lainnya seperti Mei Kartawinata, Wongsonegoro, O Romodjati, R. Rumuwisit, R. Sukanto, mengorganisir aliran-aliran kepercayaan dengan mendirikan sebuah organisasi Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI), gabungan dari seluruh aliran kepercayaan atau kebatinan di Indonesia¹⁶⁰.

Tahun 1964, Sunda Wiwitan (ADS) dilarang kembali oleh pemerintah RI, pada saat itu P. Tedjabuana dan sebagian besar pengikutnya konversi masuk ke agama Katolik. Konversi agama ini bukan didasari oleh keyakinan akan kebenaran ajaran Katolik, tetapi dalam rangka mengamankan diri dari tindakan mayoritas agama resmi yang ingin menyudutkan ADS seperti tuduhan sesat, kafir, dan tindakan diskriminatif lainnya.

b). Membentuk PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang)

Bubarnya ADS menandai masuknya fase ketiga bagi agama Djawa Sunda, yang biasa disebut sebagai periode Djatikusumah. Setelah pembubaran, gedung bekas pusat kegiatan ADS oleh Pangeran Tedjabuana di pasrahkan kepada rakyat Cigugur, kemudian dipakai untuk misa gereja. Tahun 1976, pengurusan gedung dan tanggungjawab pelestarian ajaran *karuhun* diserahkan kepada anak P. Tedjabuana yang bernama Pangeran Djatikusumah. Sementara P. Tedjabuana kembali ke keluarga besarnya dan berdiam di Cirebon sampai wafatnya tahun 1978¹⁶¹.

Di bawah kepemimpinan Djatikusumah, hampir mayoritas penganut ADS telah beralih keyakinan menjadi Katolik. Meskipun demikian ikatan emosional dengan pimpinannya masih sangat kuat. Fanatisme dari penghayat ini yang menjadi motivasi Djatikusumah untuk menghimpun kembali penghayat pada satu kepemimpinan. Setelah 17 tahun bergabung dengan agama Katolik karena dianggap tidak memenuhi perjanjian yaitu menggunakan pakaian adat Sunda dalam upacara kebaktian, dan Pangeran Djatikusuma kurang ditokohkan dalam komunitas

¹⁶⁰ Nuhriison M Nuh, *Paham Madrais (AKUR) Di Cigugur Kuningan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), 43.

¹⁶¹ Didi Wiardi, *"Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur" Dalam Sisi Senyap Politik Bising*, Budi Susanto, S.J. (Ed.), (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), 173.

Katolik, maka Pangeran Djatikusuma keluar dari agama Katolik¹⁶². Pada tanggal 11 Juli 1981, Pangeran Djatikusumah bersama pengikut ADS mendirikan organisasi PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang)¹⁶³.

Pendirian PACKU secara implisit adalah usaha menghidupkan kembali ADS yang telah dilarang karena dianggap telah menyimpang. Dengan menggunakan Paguyuban yaitu PACKU, Pangeran Djatikusumah mencoba meyakinkan pemerintah bahwa yang diusahakan adalah sekedar menghidupkan adat Sunda. Di masa kepemimpinan Pangeran Djatikusumah, *Pikukuh Tilu* mulai dikembangkan menjadi konsep olah rasa yang dapat dipraktikkan dan diimplementasikan. Kandungan teologis ajaran tersebut dikembangkan menjadi konsep “*waruga jagad*”. Di dalamnya dibicarakan tentang hubungan antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Sementara dalam tatanan *waruga* manusia dimaksudkan agar manusia dapat mengendalikan dorongan hawa nafsunya untuk mencapai *sampurnaning hurip, sejatining mati*.

Peristiwa keluarnya Pangeran Djatikusuma ternyata diikuti oleh banyak pengikutnya. Karena dituduh mempengaruhi penganut Katolik untuk kembali ke ADS, muncul keresahan di kalangan umat Katolik. Akibatnya ketika mau mengadakan *upacara Seren Taun* pada tahun 1982, ada pelarangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Lebih tegas lagi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan SK.No.44 Tahun 1982 tertanggal 25 Agustus 1982 tentang pelarangan organisasi dan kegiatan PACKU. Meski Organisasi PACKU sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Bina Hayat No.192/R.3/N.1/1982, akhirnya dibubarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat¹⁶⁴.

c). Membentuk Adat karuhun Urang (AKUR)

Ketika P. Jatikusumah membuat PACKU dan secara terang-terangan keluar dari Katolik dan kembali menghayati ajaran karuhun/ ADS, banyak masyarakat Adat Cigugur mengikutinya dan keluar dari agama resmi yang pernah dijadikan sebagai tempat berlindung (*ngiuhan*), namun ada juga sebagian yang tetap pada agama resmi pilihannya karena kepentingan formalitas administrasi kependudukan (mengisi kolom KTP), meski dalam kesehariannya kebanyakan mereka masih tetap menghayati ajaran *karuhun* sebagaimana ketika PACKU masih belum dilarang.

Selanjutnya sejak dilarangnya PACKU tahun 1982 tersebut, Pangeran Djatikusuma dan

¹⁶² Anas Saidi, *Anas Saidi (Ed.), Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru (Jakarta: Desantara, 2004), Hal. 313* (Jakarta: Desantara, 2004), 353.

¹⁶³ Didi Wiardi, “Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur” dalam *Sisi Senyap Politik Bising*, Budi Susanto, S.J. (ed.), (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hal. 174

¹⁶⁴ Didi Wiardi, “Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur” dalam *Sisi Senyap Politik Bising*, Budi Susanto, S.J. (ed.), (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hal. 175

para pengikutnya mengidentifikasi diri komunitasnya sebagai Adat Karuhun Urang (AKUR)¹⁶⁵, sebagai masyarakat adat yang terkadang mereka sebut dengan Sunda Wiwitan. Dengan pernyataan tersebut, keberadaan mereka dapat diterima oleh masyarakat sampai saat ini. Pada masa sekarang, masyarakat adat Cigugur secara resmi menyebut ajarannya dengan sebutan Adat Karuhun Urang (adat nenek moyang kita), disingkat AKUR. Akan tetapi apapun label yang dibuat komunitas ini, masyarakat di luar komunitas biasanya menyebut pemikiran dan kegiatan (kepercayaan dan adat) tersebut dengan sebutan sebelumnya, yaitu penghayat ajaran Madrais, karena memang mereka sebenarnya meneruskan ajaran-ajaran yang telah dirintis oleh Kyai Madrais.

2). Menghidupan Seren Taun

Disamping *reorganisasi*, upaya Sunda Wiwitan untuk mempertahankan keberlangsungan komunitasnya adalah dengan mengadakan Upacara *Seren Taun* diadakan secara turun temurun dari pelaksanaan sebelumnya. Menurut Pangeran Djatikusumah, upacara *Seren Taun* sudah berlangsung rutin sejak manusia mengenal Sang Penciptanya. Upacara *Seren Taun* pada masa lalu bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari dan 40 malam serta dihadiri oleh masyarakat Cigugur dan masyarakat Sunda yang lain seperti Tasik, Bandung, Sumedang, Garut, Banten, dan lain-lain¹⁶⁶.

Perayaan *Seren Taun* ini dimaksudkan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rizki hasil panen yang dilimpahkan pada tahun sebelumnya, sebagai ungkapan do'a berharap berkat untuk tahun berikutnya. Upacara *Seren Taun* dikemas menjadi acara budaya bukan upacara keagamaan (kepercayaan). Nampaknya, strategi yang terakhir ini cukup berhasil, sehingga mereka leluasa mengamalkan ajarannya.

Warga Cigugur Kuningan menganggap *Seren Taun* tergolong dalam suatu acara budaya yang berasal dari leluhur yang dikategorikan sebagai tradisi Sunda. Maka wajar jika acara ini diikuti oleh banyak pihak. Perihal biaya dan keperluan upacara *Seren Taun*, diperoleh dari: a) Swadaya masyarakat Cigugur, dengan kesadaran sendiri masyarakat mempersiapkan segala hal yang diperlukan; b) para donatur, yang peduli dan ingin ikut serta turut ambil bagian masalah dana; c) Bantuan pemerintah, setiap penyelenggaraan Upacara *Seren Taun* mendapatkan bantuan dana melalui Departemen Pariwisata¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Didi Wiardi, "Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur" dalam *Sisi Senyap Politik Bising*, Budi Susanto, S.J. (ed.), (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hal. 174-176

¹⁶⁶ Nuhrison M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR) di Cigugur Kuningan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 43

¹⁶⁷ Asep Saeful, *Upacara Seren Taun: Potret Kerukunan Sosial Antarumat Beragama di Cigugur*, Kuningan, Jawa Barat, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), hal. 27

Saat ini upacara tersebut dijadikan sebagai agenda budaya masyarakat Kuningan. Pada acara pembukaan biasanya dihadiri para pejabat dan perangkat pemerintah kabupaten, dan dibuka oleh Bupati Kabupaten Kuningan. Susunan kepanitiaannya melibatkan semua unsur masyarakat dari berbagai suku dan agama. Dengan demikian acara Seren Taun bukan lagi milik anggota ADS/AKUR saja tetapi sudah menjadi milik masyarakat Cigugur dan warga sekitarnya. Langkah pimpinan AKUR menjadikan upacara ritualnya menjadi acara budaya merupakan strategi yang bagus. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan perhatian. Gedung Paseban yang mereka miliki sebagai Cagar Budaya memperoleh bantuan biaya pemugaran yang berjumlah cukup besar. Bantuan juga diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum. Acara Seren Taun digunakan sebagai arena promosi oleh pimpinan AKUR untuk memperoleh bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan informasi, melalui acara Seren Taun dapat dikumpulkan padi berton-ton jumlahnya. Sebab setiap mereka yang datang akan membawa persembahan berupa padi dan tanaman lainnya, yang kemudian dikumpulkan¹⁶⁸.

3). Rekonstruksi Identitas

Selain reorientasi organisasi dan menghidupkan kembali Seren Taun, upaya yang dilakukan Sunda Wiwitan untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan rekonstruksi identitas. Selama tiga generasi, ADS berulang kali menghadapi ancaman larangan dan dominasi negara, dan berulang kali juga ADS melakukan konversi ke agama resmi, tapi kemudian hidup dan eksis kembali. Dalam merespon larangan dan dominasi negara, ADS dihadapkan pada tiga pilihan solusi *exit, voice, loyalty*⁸⁵. Solusi yang dipilih ADS adalah *voice*, menyetujui sepenuhnya konstruksi negara dan melakukan konversi berada dalam subordinasi agama resmi, Katolik. Namun tetap bersuara melakukan negosiasi, bahkan dalam situasi yang dipandang ‘aman’ menghidupkan lagi ADS. Meski melakukan konversi ke agama Katolik, komunitas ADS tetap ‘bersuara’ dengan melakukan negosiasi dengan pihak Katolik agar dalam ritual Katolik juga mengakomodasi sebagian kekhasan praktik ADS dalam rangka melestarikan ajaran warisan karuhun Sunda.

ADS beberapa kali melakukan reorganisasi diri, ini juga merupakan bagian dari strategi mempertahankan eksistensi ajaran ADS, bahkan dilakukan dengan merekonstruksi identitas keagamaannya ke dalam representasi identitas adat karuhun. Hal ini dilakukan oleh komunitas ADS untuk membangun identitas baru dan selalu beradaptasi dengan konteks sejarah yang sedang dihadapi, agar bisa berdamai dan diterima oleh kelompok mayoritas. Sebuah

¹⁶⁸ Nuhri M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR) di Cigugur Kuningan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 48

perubahan representasi dari identitas keagamaan ke representasi identitas adat.

Inisiatif ADS/Penghayat ajaran Madrais mereorganisasi diri menjadi organisasi paguyuban adat Sunda dan berusaha mengubah representasi identitas kelompoknya sebagai representasi komunitas adat, adalah solusi yang dipilih untuk menghindari adanya pelarangan negara dan tindakan kelompok mayoritas yang menyudutkan mereka, karena adat tidak mungkin dilarang sebagaimana di berbagai daerah lain dimana komunitas masyarakat adat juga berkembang. Termasuk dengan menghidupkan kembali upacara *Seren Taun*, sebuah upacara adat yang menjadi bagian dari perayaan masyarakat adat Sunda pada umumnya. Sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan berharap panen-panen berikutnya bisa lebih baik. Perayaan seren taun, juga masih dirayakan oleh masyarakat adat di Sukabumi, Ciamis, Garut, dan sekitarnya¹⁶⁹

Kini, komunitas ADS/Penghayat ajaran Madrais lebih nyaman disebut sebagai komunitas masyarakat adat/penghayat Adat Karuhun Urang (AKUR) dalam representasi identitas adat, daripada disebut sebagai komunitas Agama Djawa Sunda (ADS)/penghayat ajaran Madrais dalam representasi identitas keagamaan. Kalau dulu ada tuntutan dari pengikut Madrais agar dapat diakui sebagai agama lokal, dalam perkembangan terakhir tuntutan itu sudah tidak muncul lagi. Rupanya tuntutan tersebut dianggap kurang menguntungkan mereka. Apalagi pemerintah sudah memberikan pelayanan yang dulu menjadi tuntutan mereka seperti, tidak adanya kewajiban untuk menuliskan agama dalam kolom "agama" dalam KTP dan KK, diterbitkan akta kelahiran dan akta perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan dengan mengikuti syarat yang diberikan oleh pihak berwenang.

Menurut Dewi Kanti, sejak masa reformasi, kebijakan pemerintah terhadap AKUR sudah banyak mengalami perkembangan. Perayaan *Seren Taun* bahkan dihadiri oleh para pejabat baik dari pusat maupun dari Kabupaten. Bupati selalu hadir dalam acara tersebut. Demikian pula halnya, para pengunjung datang dari berbagai penjuru nusantara, baik dari utusan adat maupun masyarakat biasa. Para utusan itu ditampung di rumah-rumah penduduk walaupun bukan pengikut Madrais. Para pendatang tersebut ada yang memberikan uang pada tuan rumah sebagai ucapan terima kasih tetapi ada juga yang tidak, karena memang tidak ada tuntutan untuk itu.

Kini, ADS atau yang dikenal dengan sebutan AKUR (Adat Karuhun Urang) di Cigugur, bagi para pemuka agama dan warga Cigugur pada umumnya tidak menjadi persoalan. Walaupun mereka sebenarnya tahu apa yang dinamakan dengan AKUR itu isinya sama dengan komunitas ADS/penghayat ajaran Madrais

¹⁶⁹ Kushendarwati, Selu Margaretha, *Komunitas Agama Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan – Jawa Barat* (Universitas Indonesia, 2012), hal. 369

Gerakan Sosial Baru yang dilakukan

Perasaan terdiskriminasi dan termarginalkan membentuk kesadaran kolektif sebuah komunitas untuk melakukan perlawanan dalam menghilangkan diskriminasi tersebut. Teori untuk menjelaskan gerakan perlawanan komunitas marginal, saat ini yang menjadi perhatian banyak sarjana adalah teori Gerakan Sosial Baru (GSB). GSB ini merupakan sebuah teori lanjutan dari teori sebelumnya, yakni teori gerakan sosial.

Gerakan Sosial Baru sudah dilakukan oleh komunitas Sunda Wiwitan dan agama-agama lokal lainnya selaku komunitas marginal sejak lama. Salah satu bentuk GSB yang dilakukan oleh Sunda Wiwitan adalah dengan membentuk paguyuban yang bernama Agama Djawa Sunda (ADS), kemudian melakukan reorganisasi dengan mengganti nama menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU), dan berubah lagi menjadi Adat Cara karuhun Urang (AKUR). Selain membentuk paguyuban didalam komunitas sendiri, Sunda Wiwitan juga melakukan GSB dengan berkomunikasi dengan agama-agama lokal di Indonesia. Karena perasaan semakin terdiskriminasi, kelompok penghayat se Indonesia tersebut mengadakan Kongres Nasional yang pertama di Semarang pada tanggal 19-21 Desember 1955. Kongres yang dihadiri oleh 680 perwakilan dari 67-70 organisasi tersebut berhasil membentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) dengan menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai ketua¹⁷⁰. Organisasi tersebut membantu mengantisipasi pudarnya eksistensi agama lokal yang ada. Setiap ada ancaman dan tekanan, mereka menjadwalkan kongres untuk mencari jalan keluar terhadap ancaman dan tekanan tersebut¹⁷¹.

Dalam Kongres Nasional BKKI di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka mengeluarkan beberapa pernyataan, bahwa: (1) prinsip kebatinan ialah *sepi ing pamrih, rame ing gawe; Memayu-hayuning bawana*; (2) pendidikan moral guna pembangunan karakter harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi; dan (3) Pikiran dan praktik kehidupan sehari-hari harus dilandasi pada ketuhanan.¹⁷² Poin kedua tersebut jelas sebagai respon dari ancaman yang muncul bagi keturunan kelompok kebatinan,

¹⁷⁰ Samsul Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).

¹⁷¹ Samuel Agustinus Patty, *Aliran Kepercayaan" a Socio-Religious Movement in Indonesia (Disertasi)* (Washington: Washington State University, 1986), 71–72.

¹⁷² Samuel Agustinus Patty, *"Aliran Kepercayaan" a Socio-religious Movement in Indonesia (Disertasi)* (Washington State University, Department of Anthropology, 1986), h.71-72

pasalnya anak-anak mereka tidak memperoleh pendidikan kebatinan yang mereka yakini, akan tetapi akan mendapatkan pendidikan agama (bukan kebatinan).

Berkaitan dengan aspek kebatinan ini, Dewi Kanti selaku putri Pangeran Djatikusumah (pimpinan komunitas) mengatakan, bahwa kekhawatiran terbesar para tetua adat Sunda Wiwitan adalah pudarnya nilai-nilai adat masyarakat, atau meminjam istilah komunitas ini, pudarnya cara-ciri Bangsa. Padahal, nilai-nilai luhur masyarakat adat merupakan warisan terpenting bagi kehidupan, sekaligus menjadi jatidiri dan karakteristik Bangsa¹⁷³. Untuk memastikan terjaganya kelestarian nilai-nilai luhur ini, komunitas adat berinisiatif membangun sebuah lembaga pendidikan formal melalui yayasan bernama Tri Mulya. Lembaga pendidikan ini menyelenggarakan pendidikan formal di tingkat SMP. Pada perkembangannya, peserta didik dari lembaga ini tidak hanya berasal dari komunitas Sunda Wiwitan, tapi juga dari agama-agama mainstream di sekitar Cigugur.

Sunda Wiwitan bersama agama-agama lokal lain di Indonesia juga kembali mengadakan kongres di Jakarta, tepatnya pada 14-15 November 1959 yaitu mendiskusikan mengenai pendidikan nasional serta merekomendasikan agar kebatinan menjadi prinsip berbangsa dan bernegara¹⁷⁴, mereka juga menolak definisi agama yang telah diusulkan oleh kementerian agama¹⁷⁵. Sebelumnya, Kementerian Agama yang pada waktu itu masih bernama Departemen Agama mengusulkan, bahwa pengakuan negara terhadap suatu agama berdasar pada beberapa syarat minimum, syarat minimum tersebut yaitu harus memiliki nabi, memiliki kitab suci, serta memiliki pengakuan internasional¹⁷⁶. Persoalannya, tidak semua agama atau aliran kepercayaan mampu memenuhi syarat minimum tersebut. Karenanya, syarat minimum ini tentu saja memberatkan agama lokal, termasuk Sunda Wiwitan.

Melalui BKKI, Sunda Wiwitan dan agama-agama lokal lainnya mengirim surat dan meminta Presiden Soekarno untuk mengakui status kebatinan setara dengan agama, serta mengusulkan 5 perwakilan dari mereka sebagai anggota Dewan Nasional.¹⁷⁷ Namun, usaha

¹⁷³ Wawancara dengan Dewi Kanti, Putri Pangeran Jati Kusumah di Paseban (pusat komunitas Sunda Wiwitan). Minggu, 15 Maret 2022

¹⁷⁴ Samuel Agustinus Patty, *"Aliran Kepercayaan" a Socio-religious Movement in Indonesia (Disertasi)* (Washington State University, Department of Anthropology, 1986), h.71

¹⁷⁵ Djoko Dwiyanto, *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta: Pararaton, 2010), 285.

¹⁷⁶ Amos Sukamto, "Amos Sukamto, 'Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik', *Jurnal Teologi Indonesia* 1/1, (Juli 2013):H.31," *Jurnal Teologi Indonesia* 1, no. 1 (July 2013): 31.

¹⁷⁷ Samuel Agustinus Patty, *"Aliran Kepercayaan" a Socio-religious Movement in Indonesia (Disertasi)* (Washington State University, Department of Anthropology, 1986), h.70

komunitas penghayat itu tidak didengarkan oleh Pemerintah, yang lebih berpihak pada tuntutan masyarakat dari agama mainstream.

Berbagai diskriminasi terhadap penganut agama lokal tersebut membuat mereka tergerak untuk melawan dengan melakukan gerakan sosial. Salah satu hasil dari gerakan sosial yang dilakukan adalah terbitnya keputusan MK No. 97 Tahun 2016 tentang kolom KTP Penghayat. Melalui putusan MK ini, agama lokal mulai diakui keberadaannya dengan dicantumkannya kata penghayat pada kolom KTP agama. Meskipun demikian, bukan berarti gerakan sosial yang dilakukan penganut agama lokal berhenti. Hal ini disamping pencantuman kata “penghayat” masih bersifat umum, belum mencantumkan masing-masing agama lokal yang beragam, juga diskriminasi masih terus terjadi, meskipun telah diterbitkannya putusan MK tersebut.¹⁷⁸

Bentuk gerakan sosial baru yang dilakukan oleh Sunda Wiwitan juga dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan pengakuan Dewi Kanti, komunitas Sunda Wiwitan membuat Instagram serta website komunitas untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri komunitas, sekaligus memperkenalkan eksistensi mereka ke dunia luar. Melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut, komunitas Sunda Wiwitan juga mempublikasikan berbagai kegiatan adat berikut nilai-nilai yang ada di dalamnya seperti pupuh2, tarian2, dll.

Berdasarkan karakteristik Gerakan Sosial Baru yang disampaikan Nash, bahwa ciri utama GSB adalah gerakan yang tidak bersifat material, maka gerakan yang dilakukan oleh komunitas Sunda Wiwitan untuk melestarikan hukum adat ini bisa dikategorikan sebagai bentuk Gerakan Sosial Baru. Sunda Wiwitan meyakini, jika Bangsa Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang menjadi cara-ciri Bangsa, maka Bangsa Indonesia akan memiliki karakteristik dan jatidiri Bangsa yang kuat, dan akan bertahan di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi.

B. Gerakan Sosial baru Agama Lokal Parmalim

Sebagai komunitas mayoritas yang sering diberikan stigma sesat, kolot, tradisional dst, parmalmim melakukan upaya untuk bertahan. Dalam teori Gerakan sosial, upaya Parmalmim agar bisa bertahan, sekaligus menjaga nilai-nilai dan tradisi masyarakat Batak tersebut dapat disebut

¹⁷⁸ Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan>. Diakses pada 5 April 2022

sebagai Gerakan sosial baru. Hal ini dikarenakan berbagai gerakannya banyak dilakukan dengan melakukan framing, sebagai salah satu ciri utama Gerakan sosial baru.

Gerakan sosial yang utama dan pertama dilakukan oleh Parmalim adalah apa yang disebut dengan Marhamalimon. Melalui Marhamalimon, berbagai ritual ditetapkan, pusat peribadatan yang baru ditetapkan, serta struktur organisasi parmalmim juga ditetapkan. Marhamalimon ini dilakukan oleh Raja Mulia Naipospos yang diyakini mendapat bimbingan dari Nasiakbagi. Nasiakbagi sendiri diyakini sebagai jelmaan dari Raja Sisingamangaraja XII yang dikabarkan tertembak oleh Belanda. Dengan demikian, tongkat kepemimpinan dari Sisingamangaraja ke Naipospos masih nyambung. Raja Mulia Naipospos sendiri merupakan salah satu pemimpin cabang (Parbaringin), pada era Raja Sisingamangaraja XII masih berkuasa.¹⁷⁹

Melalui Marhamalimon, pusat peribadatan berpindah dari Bakara (era Sisingamangaraja), ke Bale pasogit yang masih digunakan sebagai pusat peribadatan hingga saat ini. Pelembagaan Parmalim juga dilakukan pasca marhamalimon. Sebelum Marhamalimon, tidak ada pelembagaan Parmalim, sekaligus ritual-ritualnya. Diantara Parmalim, ada yang masih memegang nilai-nilai luhur masyarakat Batak, dan tidak mau mengikuti Marhamalimon. Dampaknya, mereka tidak memiliki system pengorganisasian, berjalan apa adanya, sehingga lebih rentan terancam punah. Padahal, Marhamalimon diperlukan untuk merespon semakin beratnya tantangan, merepon misionaris, serta agama-agama lain yang sudah lebih dulu terlembaga. Kalau tidak dilakukan Marhamalimon, susah menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Batak¹⁸⁰.

Dokumen Bale Pasogit, pusat peribadatan Komunitas Parmalim
Diambil langsung oleh peneliti, tanggal 7 Desember 2022



¹⁷⁹ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

¹⁸⁰ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022



Pada konteks pengorganisasian, pasca Marhamalimon, secara garis besar Parmalim membagi 2 organisasi, yakni ada organisasi resmi Parmalim, dan ada ugamo malim secara tradisional. Untuk organisasi resmi (Ormas), dilengkapi dengan perangkat organisasi lengkap dengan AD/ART, ijin operasional resmi, struktur yang lengkap dst. Fungsinya untuk merespon dinamika perkembangan sosial terkini, menjawab berbagai persoalan yang dihadapi komunitas, membahas strategi menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Batak dalam wadah Parmalim, dan bagaimana menyikapinya¹⁸¹.

Organisasi yang kedua, yakni ugamo malim hanya terkait dengan iman dan nilai-nilai (tradisionalitas). Tugasnya memimpin ritual dan memberikan fatwa. Keberadaan organisasi tradisional Ugamo Mali mini melekat dengan ormas resminya. Setia pada ormas parmalmim, otomatis disitu ada ugamo malim (tradisionalnya). Saat ini ada ada 38 cabang Parmalim. Untuk Ugamo Malim, baik pusat maupun cabang dipimpin oleh 4 orang struktur kepengurusan (Suhu ni Ampang Naopat). Yakni satu orang Pargomgom/Ulu Punguan, satu orang Pangumei, satu orang Partahi, dan satu orang Namora. Jika kita kaitkan dengan organisasi modern maka Pargomgom merupakan penanggung jawab, Pangumei merupakan ketua, Partahi merupakan sekretaris dan Namora merupakan bendahara. Sebagai kormas resmi Parmalim, maupun ugamo malim, kepemimpinan tertingginya adalah Ihutan. Dalam tradisi Batak, pemegang kepemimpinan sekaligus keputusan tertinggi itu disebut "Partohap Nagok". Saat ini, Ihutan Parmalim yang meneruskan kepemimpinan Raja Mulia Naipospos dipegang oleh Raja Monang Naipospos¹⁸².

¹⁸¹ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

¹⁸² Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

Selain 2 organisasi induk diatas, pada konteks pengorganisasian, Parmalim juga memiliki *Ugasan Torop*. *Ugasan torop* adalah organisasi yang bergerak dibidang ekonomi. Organisasi ini menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat dan nantinya juga untuk kemaslahatan masyarakat. Organisasi ini dipimpin oleh Pangula Ugasan Natorop. Ditingkat pusat disebut Pangula Ugasan Natorop Bale Pasogitt, sementara di cabang disebut dengan Pangula Ugasan Natorop Pungan¹⁸³.

Ugasan torop merupakan sebuah lembaga keuangan yang Umat parmaliim diyakini sudah ada sejak zaman Raja Sisingamangaraja I dan masih eksis hingga kini. Pengelolaan keuangan dari organisasi ini pun masih dilakukan secara tradisional. Hingga saat ini ugasan torop masih memberikan kontribusi kepada para penganut agama Parmalim. Lembaga Ugasan Torop milik ugamo malim sangat berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya dalam lembaga keuangan konvensional (Bank) ada produk atau apapun yang ditawarkan oleh setiap Bank, atau Lembaga keuangan semi konvensional yang mengedepankan sistem bagi hasil. Namun Ugasan Torop milik ugamo Malim tidak memiliki produk atau tawaran apapun¹⁸⁴.

Ugasan Torop adalah lembaga sosial yang yang ditujukan untuk menolong penganut agama Parmalim yang miskin, yatim, janda, dan orang-orang yang tidak mampu. Sebagai sebuah lembaga yang hanya dimiliki khusus oleh ugamo Malim, tidak berarti bahwa lembaga ini hanya menyediakan dana yang ada untuk kemaslahatan umatnya semata. Secara umum lembaga ini juga ada membantu umat agama lain yang sedang kesusahan, seperti terdampak bencana alam. Dalam Ugasan torop tidak ada tujuan mengumpulkan laba ataupun provit, semuanya dilakukan atas dasar keyakinan kepada Mulajadinabolon (tuhan)¹⁸⁵.

Selanjutnya adalah Tunas Naimbaru, merupakan organisasi yang diperuntukkan untuk pemuda pemudi Parmalim. Organisasi ini didirikan oleh Raja Ungkap sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan Malim (marhamalimon) kepada generasi muda. Salah satu pesan Raja Ungkap terhadap generasi muda Parmalim adalah “naposo tundun di jolo osang-osang di pudi”. Maksud dari ungkapan tersebut adalah “generasi muda adalah penerus orangtunya untuk meneruskan keimanan Parmalim”. Organisasi Tunas Naimbaru diresmikan pada tahun 1953¹⁸⁶.

¹⁸³ Wawancara dengan Jaya Damanik, 5 Desember 2022

¹⁸⁴ Wawancara dengan Manurung, pengelola Ugasan Torop

¹⁸⁵ Wawancara dengan Manurung, pengelola Ugasan Torop

¹⁸⁶ Wawancara dengan Jaya Damanik

Pada aspek Pendidikan, selain Parmalim School, dalam komunitas Parmalim juga terdapat BAPPAR (Bale Pangaradoti Parguruan Parmalim). BAPPAR adalah organisasi Parmalim yang mengatur bidang pendidikan keagamaan Parmalim. Salah satu program BAPPAR adalah *Marsikola*, dalam bahasa Indonesia artinya bersekolah. Marsikola merupakan aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di sore hari. Materi yang diajarkan dalam kegiatan ini adalah seputar pendidikan keagamaan ugamo Malim. Hal ini dilakukan sebagai pengganti pembelajaran agama yang tidak didapatkan anak-anak Parmalim di sekolah formal¹⁸⁷..

Gerakan sosial yang dilakukan Parmalim utamanya adalah membendung Gerakan missionaris (mereka menyebutnya dengan *zending*), yang membawa agama baru. Melalui agama baru yang datang dari luar tersebut, komunitas Parmalim yang setia menjaga nilai-nilai dan tradisi masyarakat Batak distigmakan sebagai sesat, kolot dan tradisional. Keberadaan *Zending* dan agama baru ini menggempur tatanan nilai-nilai luhur yang dibangun oleh Sisingamangaraja. Dibuat stigma, orang-orang yang menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat Batak sebagai bodoh, berada pada kegelapan, penyembah berhala, pengikut animisme, dinamisme, dst. Mereka datang membawa lilin untuk menerangi kegelapan. Stigma itu membuat masyarakat Batak merasa malu dengan nilai leluhurnya sendiri, sehingga banyak yang meninggalkan. Inilah titik awal dan menentukan kerusakan nilai-nilai luhur masyarakat Batak¹⁸⁸.

Pada konteks Pendidikan, menurut pengakuan Raja Monang, Belanda memberikan syarat siapapun yang masuk di sekolah yang didirikannya, harus masuk agama yang mereka bawa. Menyikapi ini, komunitas parmalmim mendirikan Parmalim School pada tahun 1939. Parmalim school dimaksudkan sebagai wadah Pendidikan bagi komunitas Parmalim yang tidak diterima pada sekolah yang didirikan Belanda. Setelah era kemerdekaan, dimana tidak ada lagi paksaan untuk masuk agama tertentu sebagai syarat diterima di sebuah sekolah, keberadaan Parmalim School dianggap tidak dibutuhkan lagi, sehingga dibubarkan¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Jaya Damanik

¹⁸⁸ Wawancara dengan Raja Monang, 6 Desember 2022

¹⁸⁹ Wawancara dengan Raja Monang, 6 Desember 2022

Dokumentasi Parmalim School Diambil dari dokumen yang dimiliki Raja Monang



Gerakan sosial Parmalim sangat menekankan aspek Pendidikan. Raja Monang yang pernah menjabat sebagai ketua komisi C (bidang Pendidikan) DPRD Kab. Toba meyakini, jika Pendidikan komunitas Parmalim tinggi, maka keberadaannya akan diperhitungkan. Menjawab berbagai stigma negatif kepada mereka harus dijawab dengan berbagai prestasi di bidang Pendidikan. Semangat pada bidang pendidikan selalu ditekankan. Hasilnya, mayoritas anak Parmalim berprestasi di sekolahnya masing-masing. Selain itu, tidak sedikit diantara komunitas Parmalim yang menempuh Pendidikan tinggi. Melalui Pendidikan tinggi, maka berbagai posisi strategis bisa diisi oleh komunitas Parmalim. Belum lama, salah satu komunitas Parmalim ada yang diterima sebagai PNS pada Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat (KMA). Menurut Monang, Direktorat ini focus mengurus agama penghayat, maka idealnya berbagai posisi yang tersedia diisi oleh komunitas Penghayat. Untuk itu, Raja Monang menghimbau warganya untuk kuliah di Untag, sebagai satu-satunya kampus yang menyediakan Jurusan Kepercayaan Kepada TYME¹⁹⁰.

C. Gerakan Sosial baru Agama Lokal Sapta Darma

Sebagai komunitas minoritas, agama local Sapta Darma melakukan berbagai upaya agar keberadaan mereka diakui, atau minimal bertahan. Karena prinsip universalitas yang dimiliki, sehingga resistensi terhadap Sapta Darma tidak sebesar 2 agama lokal lain yang dibahas disini, tapi tetap saja aspek agama yang sensitif membuat Sapta Darma sedikit banyak

¹⁹⁰ Wawancara dengan Raja Monang, 6 Desember 2022

mengalami stigma negatif dari masyarakat, seperti sesat, dll. Berbagai upaya yang dilakukan Sapta Darma untuk menghadapi hal itu dapat disebut sebagai gerakan sosial.

Pada aspek pengorganisasian, Sapta Darma membagi organisasinya ke dalam 3 bentuk, yakni Persada (Persatuan Warga Sapta Darma), ada organisasi spiritual, dan ada Yayasan Sapta Darma. Persada merupakan wadah organisasi resmi yang memiliki seluruh perangkat organisasi yang dibutuhkan, yakni AD/ART, ijin resmi, serta struktur kepengurusan lengkap dari tingkat pusat, hingga tingkat daerah. Kepengurusan Persada saat ini tersebar di 13 Propinsi di Indonesia. Untuk ketua Persada pusat, saat ini diketuai oleh Naen Suryono yang berasal dari Surabaya. Sebagaimana organisasi biasanya, penentuan ketua Persada dilakukan melalui pemilihan yang dilakukan oleh perwakilan anggota. Masa aktif kepengurusan 5 tahun sekali, untuk selanjutnya bisa dipilih Kembali pada forum pemilihan. Meskipun menggunakan paradigma pengorganisasian modern, tapi aspek spiritualitas tetap menjadi ruh perjalanan organisasinya. Misalnya, setiap kali pemilihan ketua atau menentukan sebuah kebijakan, Persada selalu mendahuluinya dengan hening dan ritual sujud, memohon petunjuk kepada Allah yang maha kuasa.¹⁹¹

Untuk aspek spiritual, organisasi dalam Persada dipimpin oleh penuntun. Berbeda dengan Persada, penuntun berlaku seumur hidup. Penuntun ini merupakan pemimpin agama yang ada pada semua tingkatan, baik di pusat, maupun cabang-cabang di Propinsi, hingga ke Desa, jika ada komunitas Sapta Darma di desa itu. Biasanya, jika didirikan sebuah sanggar di sebuah daerah, akan ditunjuk seorang penuntun. Penuntun ini bertugas untuk memimpin ritual agama warga Sapta Darma dari mulai ritual pernikahan, kelahiran, kematian dll. Selain itu, penuntun juga bertugas untuk melakukan pengobatan secara spiritual kepada siapapun yang meminta pertolongan pengobatan. Pengobatan secara spiritual ini merupakan salah satu ciri khas Sapta Darma. Orang yang mampu melakukan ritual sujud dengan hening dan khusyu, biasanya memiliki kemampuan melakukan pengobatan berbagai macam penyakit dengan cara spiritual. Karena penuntun ditunjuk sebagai pemimpin agama, maka diberikan pembekalan (disebut penggalian), kepada para penuntun. Mereka diundang ke sanggar pusat yang ada di Jogja untuk dilakukan penggalian ritual sujud pada bulan September dan Desember setiap tahun. Setiap kali momen penggalian, para penuntun dari berbagai daerah ini dibekali selama 7 hari berturut-turut¹⁹²

¹⁹¹ Wawancara dengan Gatot, 20 Desember 2022

¹⁹² Wawancara dengan Naen Suryono, 20 Desember 2022

Photo dokumentasi penggalan untuk Penuntun
Photo diambil tanggal 20 Desember 2022 di sanggar dwi Paria Jogja



Selain Persada dan Penuntun, organisasi Sapta Darma juga memiliki Yayasan. Pimpinan Yayasan dan Penuntun diketuai oleh orang yang sama. Yayasan ini focus menangani sanggar, serta keuangan, khususnya sumbangan dari para warga. Warga Sapta Darma meyakini, ritual sujud yang dilakukan dengan totalitas hening dan kepasrahan akan membawa kehidupan yang lebih baik, hati yang damai, dan berdampak juga pada perbaikan ekonomi. Tidak sedikit warga yang merasa mengalami perbaikan ekonomi setelah bergabung dengan Sapta Darma, mau menyumbang kepada Yayasan. Bangunan sanggar di pusat (Jogja) ini pun menghabiskan anggaran 14 M. Hampir semua dananya dikumpulkan dari sumbangan sukarela warga. Di sanggar pusat ini, tersedia ruang pertemuan, ruang makan, bahkan ruang penginapan. Doktrin berupa kerelaan warga untuk menyumbang Yayasan sering disebut dengan "*Bokor Kencana*". Artinya, siap menyumbang dan berkorban untuk Yayasan. Pada momen penggalan, warga yang datang dari jauh hingga Papua, Sumatera dan Sulawesi, rela membiayai transport sendiri, sekaligus membayar iuran minimal Rp. 250.000,- selama satu minggu¹⁹³.

Menurut Gatot, meskipun ciri khas utama Sapta Darma terletak pada aspek spiritual, tapi aspek pengorganisasian harus diperhatikan. Ini merupakan salah satu kunci Sapta Darma bisa berkembang. Pada pengorganisasian itu, diperlukan pembagian tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satu bukti perhatian Sapta Darma pada aspek pengorganisasian adalah adanya kriteria dan syarat administratif bagi calon ketua Persada. Sapta Darma memang tetap menekankan aspek ritual sujud memohon kepada Tuhan diberikan

¹⁹³ Wawancara dengan Naen Suryono dan Gatot, 20 Desember 2022

petunjuk pemimpin yang terbaik. Meskipun begitu, aspek legal formal juga tidak luput dari perhatian mereka. Pada Sapta Darma, tidak ada kriteria pemilihan ketua berdasarkan aspek keturunan. Kriteria utama adalah petunjuk dari Tuhan melalui ritual sujud yang dilakukan, meskipun tetap harus didukung dengan kelengkapan administratif.¹⁹⁴

Gatot menambahkan, strategi Gerakan sosial agar Sapta Darma terus berkembang atau minimal bertahan juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi, atas perubahan perundangan yang mendukung diakuinya keberadaan agama local seperti Sapta Darma. Misalnya saja, Ketika diberlakukan Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang layanan Pendidikan komunitas penghayat, Persada aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya yang ada warga Sapta Darma di sekolah tersebut, memastikan warga Sapta Darma mendapatkan Pendidikan agama sesuai keyakinannya sesuai amanat Permendikbud. Selain itu, Ketika tahun 2016 MK memutuskan diakuinya Penghayat pada kolom KTP, Sapta Darma melalui Persada juga aktif melakukan sosialisasi ke berbagai instansi terkait. Sosialisasi ini memastikan layanan kependudukan komunitas penghayat khususnya Sapta Darma dilayani dengan baik sesuai aturan yang berlaku¹⁹⁵.

Berdasarkan analisa peneliti, Gerakan sosial yang dilakukan Sapta Darma memang tidak spesifik sebagaimana yang dilakukan ADS dan Parmalim. Bisa jadi, hal ini disebabkan karena prinsip universalitas Sapta Darma sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Sapta Darma tidak terlalu mempermasalahkan warganya yang masih memegang identitas agama mainstream secara formal, meskipun mereka aktif mengikuti kegiatan Sapta Darma. Hal ini membuat resistensi terhadap Sapta Darma relatif lebih kecil disbanding 2 agama local lainnya yang diteliti. Meskipun demikian, Sapta Darma tetap melakukan Gerakan sosial, khususnya pada aspek pengorganisasian, untuk memastikan keberadaan mereka dapat berkembang, atau minimal bertahan.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Gatot, 20 Desember 2022

¹⁹⁵ Wawancara dengan Gatot, 20 Desember 2022

BAGIAN LIMA

PENUTUP

Diskriminasi Pendidikan yang dialami ADS, Parmalim dan Sapta Darma secara umum adalah tidak diberikannya layanan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Di satu sisi, berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan agama merupakan salah satu pelajaran wajib yang harus ada di setiap sekolah, di sisi lain, tidak semua sekolah mampu menyediakan guru sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa. Adanya Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang layanan Pendidikan agama bagi komunitas penghayat juga tidak otomatis membuat persoalan selesai. Hal ini disamping karena terbatasnya SDM yang dimiliki sekolah, juga keterbatasan komunitas penghayat menyediakan guru agama (penyuluh) di semua sekolah yang tersebar luas di Indonesia. Kondisi ini membuat tidak sedikit penganut 3 agama lokal di Indonesia diteliti, mendapatkan Pendidikan agama yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka.

Pendidikan agama yang dilakukan 3 agama local di Indonesia mayoritas dilakukan di komunitas masing-masing. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk anak dan remaja menyampaikan nilai-nilai agama lokal yang mereka yakini sebagai pedoman hidup. Selain itu, mereka juga melakukan Pendidikan agama secara ketat pada keluarga di rumah. Perkawinan yang dilakukan juga dihimbau sesama komunitas mereka, untuk memastikan komunitas mereka tetap ada. Pola yang cukup ketat seperti ini utamanya dilakukan oleh ADS dan Parmalim. Untuk Sapta Darma lebih lentur, karena prinsip universalitas yang mereka miliki.

Gerakan sosial yang dilakukan 3 agama lokal yang diteliti bermacam-macam. Untuk ADS, dilakukan dengan merevitalisasi upacara seren taun (upacara panen), strategi adaptasi identitas di KTP, serta melakukan reorganisasi, dari ADS, PACKU hingga AKUR. Untuk Parmalim, gerakan sosial utamanya dilakukan dengan Marhamalimon. Melalui Marhamalimon ini, tampuk kepemimpinan yang sacral beralih dari Sisingamangaraja XII yang dikabarkan tewas tertembak Belanda ke Raja Mulia Naipospos dan keturunannya. Marhamalimon juga merubah pusat peribadatan Parmalim dari Bakara ke Bale Pasogit. Komunitas Parmalim secara kelembagaan juga lahir, lengkap dengan berbagai waktu ritual yang ditetapkan, serta struktur kepengurusan. Berbagai upaya ini dilakukan untuk mengimbangi massifnya Gerakan missionaris (zending) yang dianggap merusak warisan nilai-nilai luhur masyarakat Batak. Untuk Sapta Darma gerakan sosial yang dilakukan relative lebih sederhana. Hal ini bisa jadi karena prinsip universalitas yang dimiliki, sehingga resistensi terhadap komunitas agama mainstream tidak sebesar pada ADS dan Parmalim. Meskipun begituu, Sapta Darma tetap melakukan gerakan sosial, berupa pengorganisasian dan pembagian tugas yang jelas, serta

sosialisasi intensif kepada berbagai pihak terkait untuk memastikan Sapta Darma dapat berkembang, minimal bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arifin, Akhmad Hidayatullah. "Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praksis Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 1, no. 1 (2012).
- Amirin, Tatang M. "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 1, no. 1 (2012).
- Arifianto, Alexander R. "Practicing What It Preaches? Understanding the Contradictions between Pluralist Theology and Religious Intolerance within Indonesia's Nahdlatul Ulama." *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 241–64.
- Armiwulan, Hesti. "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015).
- Asrawijaya, Enkin. "Dinamika Gerakan Sosial Gafatar." *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 1, no. 1 (2018): 47–66.
- Azhari, Akyas. *Psikologi Umum Dan Perkembangan*. Bandung: Teraju Mizan Publika, 2004.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Azwar, Wellhendri. *Gerakan Sosial Kaum Tarekat*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Banks, James A. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon, 2002.
- Bondan, Molly. *Molly Bondan, Spanning a Revolution: Kesaksian Eks-Digulis Dan Pergerakan Nasional Indonesia*, Penerj. Hesri Setiawan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hlm. 97. Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.
- Dewi, Intan Sri. "Gerakan Perlawanan Ideologi Patriarki Di Bali Dalam Karya Sastra Oka Rusmini Tahun 2000-2012." *Jurnal Politika* 1, no. 1 (2017).
- Djemari, Mardapi. *Pengukuran Penilaian & Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Kredit Rakyat Di Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Driyakarya. *Tentang Pendidikan*. Jakarta: Kanisius, 1980.
- Dwiyanto, Djoko. *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pararaton, 2010.
- Elia, Heman. "Peran Ayah Dalam Mendidik Anak." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 1, no. 1 (April 2000).
- Fulthoni. *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Bergama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.
- Green, M.J, and C.C Sonn. "Problematising the Discourse of the Dominant: Whiteness and Reconciliation." *Journal of Community & Applied Social Psychology*, no. 16 (n.d.).
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Kiki Muhamad Hakiki, 'Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)'. Analisis: Jurnal Studi Keislaman 11.1 (2011): 159-174, Hal. 161." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2011): 159–74.
- Haraldson, Sixten SR. "Role of Education in Preserving Traditional Cultures and as Development Factor." *Health Policy and Education* 3, no. 4 (1983): 289–302.
- Haris, Ahmad. "The Role of Muslims in the Struggle Against Violent Extremist Ideology in Indonesia." *Connections* 5, no. 4 (2006).
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat. *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Hasse, J, Bernard Adeney Risakotta, and Zainal Abidin Bagir. "Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia: Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Tawani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi." *Jurnal Kawistara* 1, no. 2 (2011).
- Hayadin. "Layanan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa Di Sekolah." *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2017).
- Horton, B.P. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1999.

- Ibrahim, Rustam. "Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Addin* 7, no. 1 (2015).
- Idris, Zahara. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Padang: Angkasa Raya, 1987.
- Ingleson, John. *Perkotaan, Masalah Sosial Dan Perburuhan Di Jawa Masa Kolonial*, Penerj. Iskandar P. Nugraha. II. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis Dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Jamil, Abdul. "Islam Dan Kebangsaan: Teori Dan Praktik Gerakan Sosial Islam Di Indonesia (Studi Atas Front Umat Islam Kota Bandung)." *Harmoni* 12, no. 1 (2013).
- Jones, J.M. *Prejudice and Racism*. 2nd ed. New York: The McGraw-Hill Companies Inc, 1997.
- Kamaruddin, Syamsu A. "Pemberontakan Petani UNRA 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Sulawesi Selatan Pada Masa Pendudukan Jepang)." *Hubs-Asia* 10, no. 1 (2012).
- Kartodirdjo, S. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- KBBI, Nopember 2022. <https://kbbi.web.id/diskriminasi>.
- Kettenis, Peggy. *Parental Factors and Transsexualism" Dalam Carlo Perris, Willem A. Arrindell Dan Martin Eisemann (Eds.), Parenting and Psychopathology*. Chichester: John Wiley & Sons, 1994.
- Khobir, Abdul, and Nur Khasanah. *POTRET DISKRIMINASI PENDIDIKAN: Gerakan Sosial Baru Dan Perlawanan Agama Lokal "Agama Djawa Soenda*. Pekalongan: NEM, 2020.
- Kholiq, A. "Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 12, no. 1 (2013): 116–29.
- Lauer, J. *The New Theoretical Movement", Dalam Neil J. Smelser (Ed.), Handbook of Sociology*. Newbury Park: Sage, 1976.
- Ma'arif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2017.
- Madyaningrum, Monica Eviandaru. "Diskriminasi Berdasar Identitas Sosial-Budaya Dan Pendidikan HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Insan Media Psikologi* 12, no. 1 (2012).
- Makin, Al. *Nabi-Nabi Nusantara; Kisah Lia Eden Dan Lainnya*. Yogyakarta: UIN Suka Pers, 2017.
- Maksum, Ali, and Luluk Yunan Ruhendi. *Paradigma Pendidikan Universal*. Yogyakarta: IRCICOD, 2004.
- Manulu, Dimpos. "GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara." *Populasi* 18, no. 1 (2007).
- Melucci, Alberto. *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*, Ed. by John Keane and Paul Mier. London: Hutchinson Radius, 1989.
- Meria, Aziza. "Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dalam Membangun Karakter Bangsa." *Al-Ta'lim Journal* 19, no. 1 (2012): 87–92.
- Miesel, Robert. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Miharja, Deni. "Adat, Budaya Dan Agama Lokal Studi Gerakan Ajeg Bali Agama Hindu Bali." *Kalam* 7, no. 1 (2013).
- Moerti, Wisnoe. "Jalan Panjang Penganut Aliran Kepercayaan Sampai Diakui Negara.," November 8, 2017. <http://www.merdeka.com>.
- Mutaqin, Ahmad. "Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais Di Cigugur Kuningan Jawabarot)." *Al-Adyan* 8, no. 1 (2017).
- Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Nelson, G, and Prilleltensky. *Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Wellbeing*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Nuh, Nuhri M. *Paham Madrais (AKUR) Di Cigugur Kuningan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.

- Nursananingrat, Basuki. *Umat Katolik Cigugur: Sejarah Singkat Masuknya Ribuan Orang Penghayat ADS Menjadi Umat Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1977.
- Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. I. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Patty, Samuel Agustinus. *Aliran Kepercayaan" a Socio-Religious Movement in Indonesia (Disertasi)*. Washington: Washington State University, 1986.
- Perris, Carlo. *Linking the Experience of Dysfunctional Parental Rearing with Manifest Psychopathology: A Theoretical Framework*", Dalam Carlo Perris, Willem A. Arrindell Dan Martin Eisemann (Eds.), *Parenting and Psychopathology*. Chichester: John Wiley & Sons, 1994.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Sotosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Hindia Belanda, Edisi Pemutakhiran*,. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Prasisko, Yongky Gigih. "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 Dan Proses Demokratisasi Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3, no. 2 (2016).
- "Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas," 2004.
- Qodim, Husnul. "Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur." *Kalam* 11, no. 2 (2017): 329–64.
- Rahim, Rahmawaty. "Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2012).
- Rambe, Togua. "Ragam Ekspresi Beragama: Agama Dalam Perspektif Sosiologi." *Studia Sosia Religia* 4, no. 1 (2021): 2021.
- Raper, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, 1998.
- Renaldi. "Diskriminasi Belum Tentu Berakhir Walau Gugatan Agama Asli Indonesia Menang Di MK.," November 8, 2017. <https://www.kaskus.co.id>.
- Rini, Nicken Sarwo. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan,." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018).
- Royyani, Mohammad Fathi. "Upacara Seren Taun Di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan." *Jurnal Biologi Indonesia* 4, no. 5 (2017).
- Rumagit, Stev Koresy. "Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).
- Rusmanto, Joni. *Gerakan Sosial : Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan Dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2013.
- Saidi, Anas. *Anas Saidi (Ed.), Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru (Jakarta: Desantara, 2004), Hal. 313*. Jakarta: Desantara, 2004.
- Sairin, Syafri. *Telaah Pengelolaan Keresasian Sosial Dari Literature Luar Negeri Dan Hasil Penelitian Indonesia*. Jakarta: Kemenag KLH dan UGM, 1992.
- Sarnoto, Ahmad Zain. "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Educhild: Pendidikan Dan Sosial* 1, no. 1 (2013): 30-4-.
- Setara Institute. "Putusan MK Yang Kabulkan Kolom Kepercayaan Bagi Komunitas Agama Lokal Di KTP Patut Diapresiasi," July 11, 2017. <http://www.tribunnews.com>.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan, 2009.
- Singh, Rejedra. *Gerakan Sosial Baru. Penerjemah Eko P. Darmawan*. Yogyakarta: Resist Book, 2010.
- Sirozi, M. "The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia: Ja'far Umar Thalib of Laskar Jihad (Jihad Fighters) and His Educational Background." *The Muslim World* 95, no. 1 (2005).
- Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Soekiman, Djoko. *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Soemanto, Wasty. *Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), Hlm. 64-65*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.

- Steenbrink, Karel. "The Reformasi of Ayu Utami; Attacking the Monopoly of the Great Religions." *Wacana* 15, no. 2 (2014).
- Suharko. "Gerakan Sosial Baru Di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2006).
- Sukamto, Amos. "Amos Sukamto, 'Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik', *Jurnal Teologi Indonesia* 1/1, (Juli 2013):H.31." *Jurnal Teologi Indonesia* 1, no. 1 (July 2013).
- Sukirno. "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 231–39.
- Sukmana, Oman. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Sulaiman. "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah." *Jurnal SMART* 4, no. 2 (2018).
- Sulfasyah, and Hanis Nur. "Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 2 (2016): 607–47.
- Sumar, Warni Tune. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1 (2004): 158–82.
- Susanto, Nanang Hasan. "Gerakan Sosial Petani Desa Banjarnayar Dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2015): 295–314.
- Sutarjo, Adisusilo. *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi Dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Tannock, Stuart. "The Problem of Education-based Discrimination." *British Journal of Sociology of Education* 29, no. 5 (2008): 439–49.
- Tendi. "Islam Dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial." *Al-Tahrir* 16, no. 1 (2016): 47–68.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial, Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Undang-undang Dasar 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Beserta Amandemennya*. Solo: Adzana Putra, 2004.
- "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1," n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1," n.d.
- "UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Ayat 3," n.d.
- Wiardi, Didi. *"Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur" Dalam Sisi Senyap Politik Bising, Budi Susanto, S.J. (Ed.)*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Zamroni. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011.

Wawancara

Wawancara dengan Abah Arga, 6 Maret 2022.

Wawancara dengan Agung, Komunitas ADS Yang Sekolah di SMP Tri Mulya, 19 April 2020.

Wawancara dengan AS (komunitas ADS yang sekolah di SMK2 Kuningan), wawancara dilakukan tanggal 5 April 2022.

Wawancara dengan Ati Sumiyati; Komunitas ADS Yang Sekolah di SMK2 Kuningan, 5 April 2022.

Wawancara dengan Dewi Kanti, putri pangeran Djati kusumah (pimpinan komunitas saat ini).
Wawancara dilakukan tanggal 15 Maret 2020 di Paseban Cigugur, Kuningan.

Wawancara dengan Gumirat Barna Alam, 6 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Ika Pasir, Komunitas ADS yang Menjadi Guru di SDN2 Cileleu, 26 April 2022.

Wawancara dengan IP (komunitas ADS yang menjadi guru di SDN2 Cileleu), Wawancara dilakukan tanggal 26 April 2022.

Wawancara dengan Ira Indrawardana, 06 Maret 2022.

Wawancara dengan Mulyati Gustina, Komunitas ADS Yang Sekolah di SMK 2 Kuningan, 5 April 2022.

Wawancara dengan Oki Satrio, 06 Maret 2022.

Wawancara dengan Purnomo (komunitas ads yang sekolah di PKBM Bina Cahya), Wawancara dilakukan tanggal 19 April 2022.

Wawancara dengan Restu Buana, Komunitas ADS Yang Sekolah di SMK2 Kuningan, 12 April 2022.

Wawancara dengan salah seorang penduduk Cigugur, Abdul Mujtahid, 6 Maret 2020.

Wawancara dengan Sutisna (sesepuh adat sunda ADS cabang Garut). Wawancara dilakukan tanggal 29 Maret 2022.

Wawancara dengan Tri Sri Mulyani, Komunitas ADS Yang Sekolah di SMK2 Kuningan, 12 April 2022.

Wawancara Dengan Jaya Damanik. Kepala Bidang Pendidikan Ulun Punguan Parmalim. Toba,
5 Desember 2022

Wawancara Dengan Marubat Sitorus. Sekjen Ulun Punguan Parmalim.
5 Desember 2022

Wawancara Dengan Melda Sihombing. Pns Puskesmas Balige
5 Desember 2022

Wawancara Dengan Ibu Siregar. Orang Tua Parmalim Yang Anaknya Sekolah Dsekolah Umum
5 Desember 2022
Wawancara Dengan Marubat Sitorus (Sekjen Punguan Parmalim)
5 Desember 2022

Wawancara Dengan Manurung (Pengelola Bappar) 5 Desember 2022

Wawancara Dengan Erikson (Bidang Humas Punguan Parmalim) 5 Desember 2022

Wawancara Dengan Raja Monang. Pemimpin Tertinggi (Ihutan) Parmalim

6 Desember 2022

Wawancara Dengan Bapak Manumpak Panjaitan (Guru Ipa, Menjabat Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan)

7 Desember 2022

Wawancara Dengan Litman Harianja (Guru Pkn, Menjabat Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Smp Budhi Dharma Toba) 7 Desember 2022

Wawancara Dengan Bambang Purnomo Ketua Persada (Pengurus Warga Sapto Dharmo, Propinsi Jawa Tengah) (Gedung Dwi Paria (Sanggar) Jogja, 19 Desember 2022)

Wawancara Dengan Jarwanto (19 Desember 2022) (Sekretaris Persada Pusat)

Wawancara Dengan Naen Suryono (Ketua Persada Pusat) (20 Desember 2022)

Wawancara Dengan Sihono (Sukoharjo), Dan Santoso (Tegal) (20 Desember 2022)

Wawancara Dengan Pak Gatot (Bagian Litbang Persada Pusat) (20 Desember 2022)

Wawancara Dengan Pak Engkus (Pimpinan Tuntunan Propinsi Jawa Barat) (20 Desember 2022)

Wawancara Dengan Pak Warma (Warga Indramayu Jawa Barat, Sekaligus Penuntun Cabang Indramayu) (20 Desember 2022)

Wawancara Dengan Pak Jaya (Pimpinan/ Penuntun Cabang Purbalingga) (20 Desember 2022)